

**INOVASI SISTEM INFORMASI DATA
KELURAHAN BERBASIS *WEB* SEBAGAI
PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI
KELURAHAN DI KOTA PASURUAN**

(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Heny Mayorita
NIM. 145030100111003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”

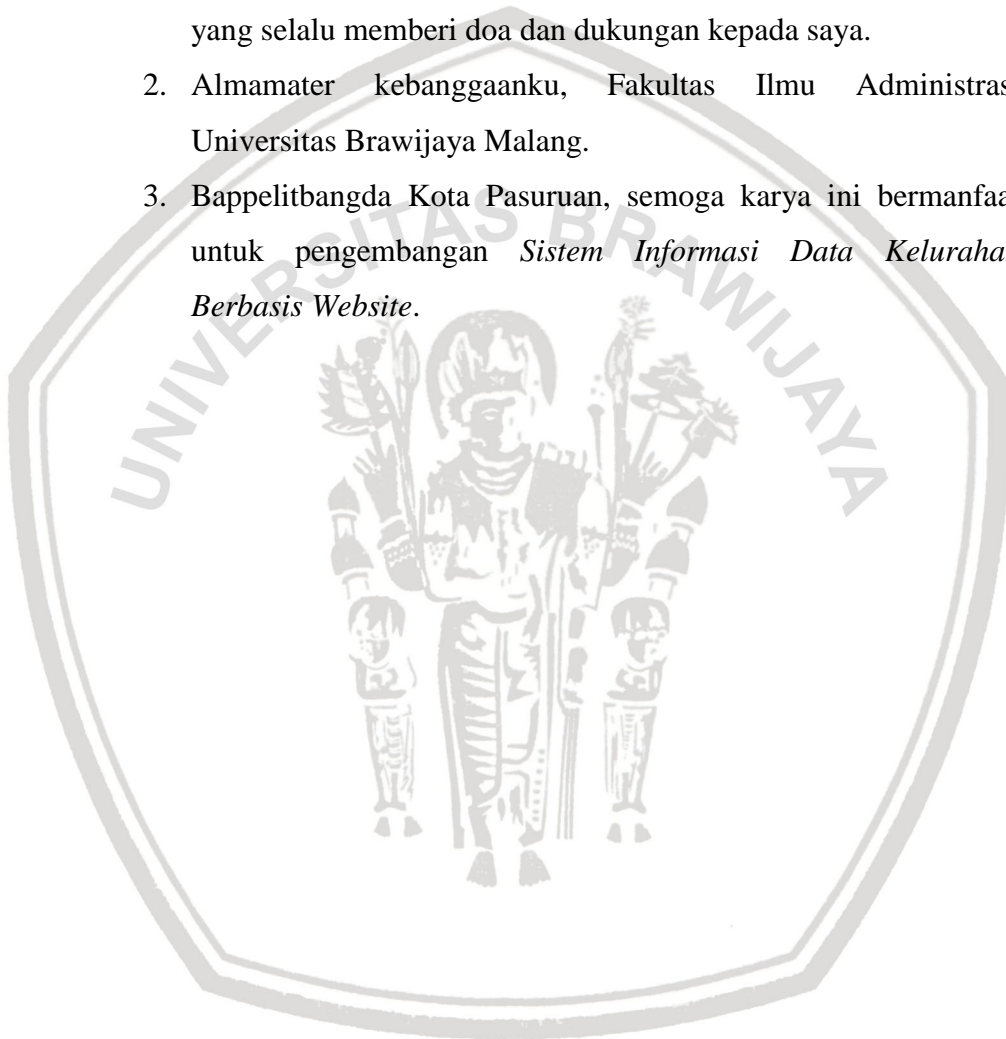
(Hadits riwayat Tirmidzi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim saya persembahkan skripsi ini untuk,

1. Kedua orang tuaku, Ibu Jamilah & Bapak (Alm) Priyono serta kedua kakakku, Mbak Fitriyah Fitrotin & Mas Roy Tanjung yang selalu memberi doa dan dukungan kepada saya.
2. Almamater kebanggaanku, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bappelitbangda Kota Pasuruan, semoga karya ini bermanfaat untuk pengembangan *Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Website*.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sebagai
 Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan
 (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
 Pengembangan Daerah Kota Pasuruan)

Disusun Oleh : Heny Mayorita

NIM : 145030100111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 19 Maret 2018

KOMISI PEMBIMBING

Ketua

Anggota



Drs. Abdul Wachid, MAP
 NIP. 19561209 198703 1 008



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
 NIP. 83012903110275

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 April 2018
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Heny Mayorita
Judul : Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 83012903110275

Anggota



Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP. 19860716 201404 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Februari 2018

Mahasiswa



Nama : Heny Mayorita
NIM : 145030100111003

RINGKASAN

Heny Mayorita, 2018. **Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web Sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: (1) Drs. Abdul Wachid, M.AP, (2) Nurjati Widodo, S.AP, M.AP. 192 halaman + xix.

Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki inovasi sistem informasi berbasis website untuk layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan, bernama Sistem Informasi Data Kelurahan. Inovasi ini digagas sejak tahun 2013 namun baru diluncurkan pada akhir 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis website, faktor penghambat dan pendukung inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis website.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pegawai Bidang Litbang dan Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan, pegawai kantor Kelurahan Gentong; Sebani; dan Bukir, serta dokumen resmi mengenai Sistem Informasi Data Kelurahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Cresswell.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini sudah mengarah pada pemberian layanan informasi kelurahan untuk masyarakat Kota Pasuruan, namun sampai saat ini (Maret 2018) website ini belum bisa dinikmati karena data yang akan disajikan belum diinput ke dalam website. Ini dikarenakan pihak kelurahan yang belum mengantongi *security system* untuk mengakses website.

Namun, kebutuhan yang tinggi akan informasi kelurahan untuk masyarakat Kota Pasuruan menjadi faktor pendukung untuk terus menjalankan inovasi ini. Saran penulis adalah Bappelitbangda Kota Pasuruan segera mengadakan pelatihan lanjutan, memberikan *reward and punishment* untuk kelurahan sebagai motivasi, dan mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin, dan melakukan pemeliharaan website bersama pihak ketiga.

Kata Kunci: Inovasi, Sistem Informasi,

SUMMARY

Heny Mayorita, 2018. **Innovation of Web-Based Database Information System for Kelurahan Information Service Supporter in Pasuruan City (Study at Development Planning Agency of Research and Development of Pasuruan City)**. Undergraduate Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: (1) Drs. Abdul Wachid, M.AP, (2) Nurjati Widodo, S.AP, M.AP. 192 pages + xix

Bappelitbangda of Pasuruan city has a website-based information system innovation for kelurahan information service in Pasuruan City, named Kelurahan Data Information System. This innovation was initiated since 2013 but only launched at the end of 2017. This study aims to find, describe, and analyze the innovation of website-based information data system of Kelurahan, and its supporting and inhabiting factors.

The type of this research is descriptive with qualitative approach. The data sources of this research are employees of Research, Development and Social Culture Division of Bappelitbangda Pasuruan City, employees of Kelurahan Gentong; Sehani; and Bukir, as well as official documents about Kelurahan Data Information System. Data collection techniques used by researchers are observation, interview, and documentation. The data analysis used is Creswell model.

The results show that this system has led to the provision of kelurahan information services for the citizen of Pasuruan city, but until now (March 2018) this website can not be enjoyed because the data that will be presented still not entered into the website yet. This is because Kelurahan has not yet secured the security system to access the website.

However, the high demand for kelurahan information for the people of Pasuruan city is a supporting factor to continue this innovation. The author's suggestion is Bappelitbangda of Pasuruan city to conduct further training, give reward and punishment for kelurahan as motivation, and conduct monitoring and evaluation activity regularly, and doing website maintenance with third party.

Keywords: Innovation, Information System



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya. Sebab atas anugerah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Berkenaan dengan diluncurkannya sebuah inovasi dari Bappelitbangda Kota Pasuruan, yakni program Sistem Informasi Data Kelurahan, penulis berkehendak untuk melihat dan menganalisis latar belakang digagasnya inovasi tersebut dan mengetahui perkembangan dan arah kedepannya. Maka, oleh penulis dituangkan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 2) Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 3) Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 4) Bapak Drs. Abdul Wachid, MAP dan Bapak Nurjati Widodo, S.AP, M,AP selaku kedua dosen pembimbing, yang telah sabar dan teliti mengoreksi

penulisan, serta memberikan banyak dukungan, arahan dan masukan untuk skripsi ini.

- 5) Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 6) Ibu Ratih dari Bappelitbangda dan Ibu Dian, Bapak Ainur Rofiq, Bapak Sutrisno, dan Bapak Abdullah dari kantor kelurahan Gentong; Sebani; dan Bukir yang banyak membantu selama proses penelitian untuk skripsi ini.
- 7) Keluarga besar penulis di Pasuruan.
- 8) Sahabat-sahabat penulis di Malang yakni Asadah, Tias, Nenny, Renna, Tiwi, Cintia, Ummi, Tiara, Ria, Ayika, dan Fian yang telah banyak memberikan cerita selama di Malang, memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Sahabat-sahabat di Pasuruan yakni Rizqi, Nahila, Ida, Esti, Sherlynda, Nindya, Merrra, dan Gita yang juga tak lupa selalu membantu dengan doa dan semangat.
- 11) Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Konsep Administrasi Publik.....	12
1. Pengertian Administrasi	12
2. Pengertian Administrasi Publik.....	13
B. Konsep Pelayanan Publik.....	14
C. Konsep Sistem Informasi Manajemen	16
1. Pengertian Sistem Informasi	16



2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen	22
D. Konsep Data	25
E. Konsep Inovasi	28
1. Konsep Inovasi	28
2. Prinsip Inovasi	31
F. Konsep E-Government	32
1. Pengertian E-Government	32
2. Manfaat E-Government	32
3. E-Government berbentuk <i>Website</i>	34
G. Konsep Keterbukaan Informasi Publik	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Pengamatan (observasi)	45
2. Interview (wawancara)	47
3. Dokumen	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Teknik Analisis Data	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan	55
1. Kondisi Geografis dan Administrasi	55
2. Kondisi Fisik Dasar	58
3. Kondisi Sosial Kependudukan	61



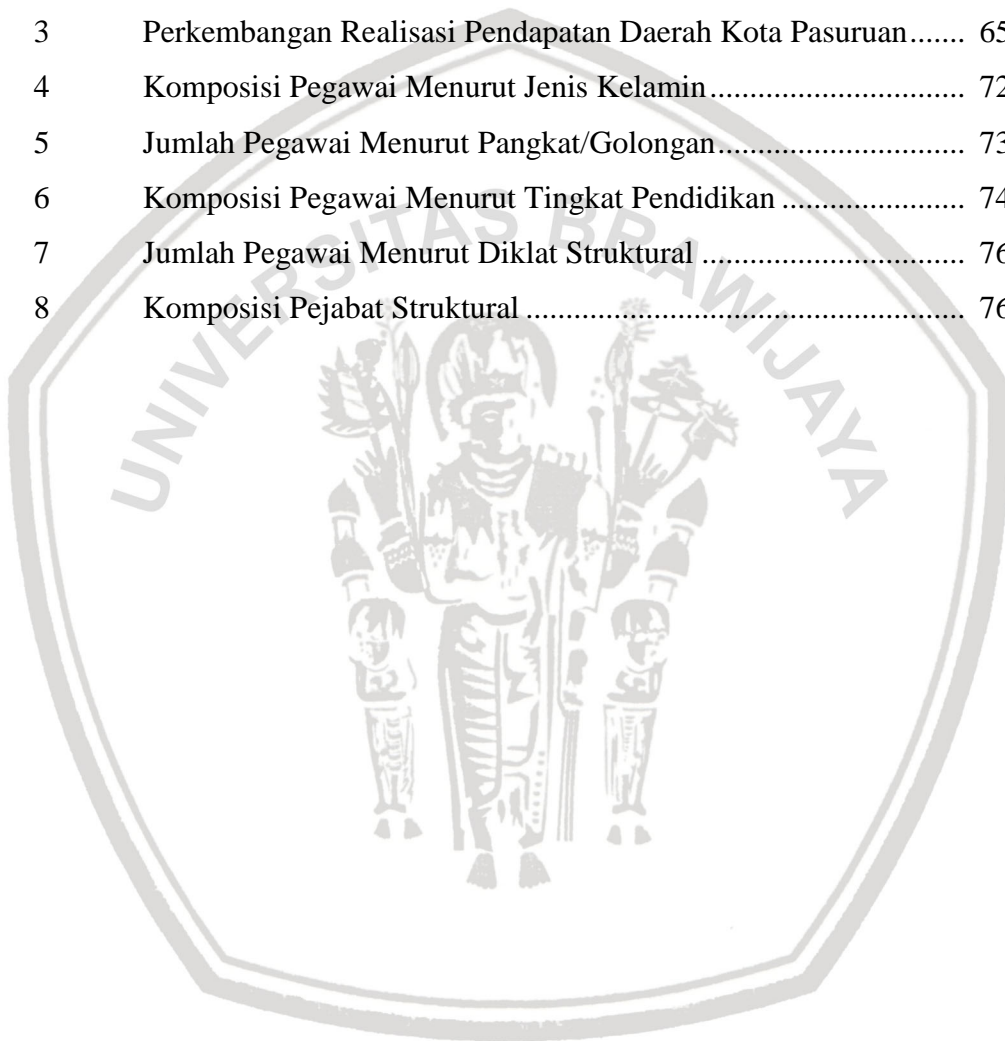
4. Kondisi Penggunaan Lahan dan Distribusi Fasilitas.....	62
5. Kondisi Ekonomi.....	64
B. Profil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.....	66
1. Tugas Pokok dan Fungsi	66
2. Struktur Organisasi.....	70
3. SDM Pegawai.....	71
C. Penyajian Data	77
1. Inovasi dan Aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sebagai pendukung layanan informasi kelurahan	77
a. Gagasan terciptanya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan.....	77
b. Input data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan	91
c. Process mengolah data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan....	94
d. Output dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah layanan informasi kelurahan berbasis website	108
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis <i>Web</i>	128
a. Faktor Penghambat.....	128
b. Faktor Pendukung	133
D. Analisis dan Interpretasi	138
1. Inovasi dan Aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sebagai pendukung layanan informasi kelurahan	138
a. Gagasan terciptanya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan.....	139
a. Input data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan	144
b. Process mengolah data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan....	147
c. Output dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah layanan informasi kelurahan berbasis website	151
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis <i>Web</i>	160
a. Faktor Penghambat.....	160

b. Faktor Pendukung	167
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	172
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	175



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pasuruan	57
2	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan	62
3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.....	65
4	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	72
5	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	73
6	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	74
7	Jumlah Pegawai Menurut Diklat Struktural	76
8	Komposisi Pejabat Struktural	76

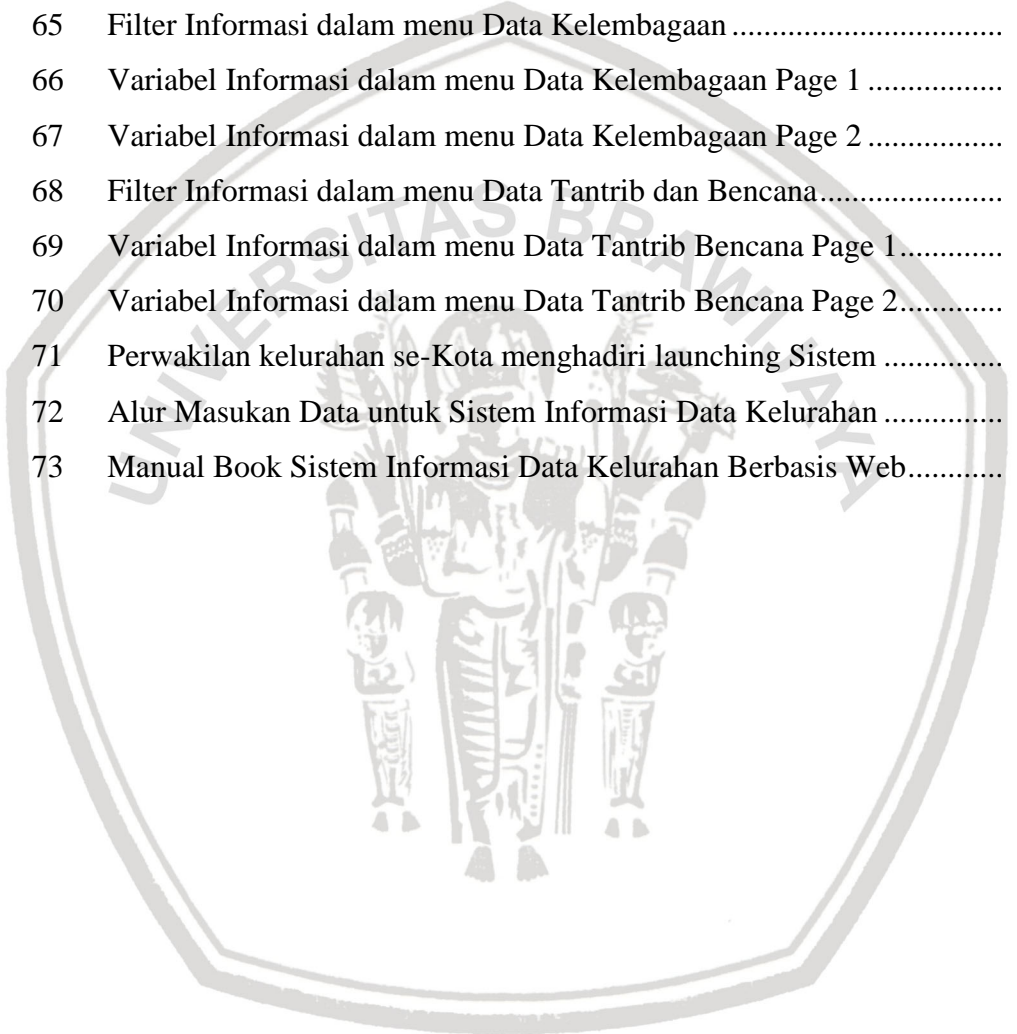


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Transformasi data menjadi informasi	20
2	Komponen dan Aktivitas Sistem Informasi	23
3	Proses Analisis Data Kualitatif Model Cresswell	52
4	Diagram Persentase Penggunaan Lahan Kota Pasuruan.....	64
5	Bagan Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Pasuruan	71
6	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	72
7	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	74
8	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	75
9	Papan Data Monografi Kelurahan Gentong th 2014.....	80
10	Papan Data Monografi Kelurahan Bukir th 2015	81
11	Papan Data Monografi Kelurahan Sebani th 2017	81
12	Tanggal Pengerjaan SIMDASKEL oleh CV Khasanah Konsultama	83
13	Kegiatan Launching dan Pengenalan 22 Desember 2017.....	85
14	Kegiatan Launching dihadiri oleh seluruh kelurahan se-Kota.....	85
15	Tampilan Website Lama SIMDASKEL	88
16	Data Kependudukan Kelurahan di Kota Pasuruan	88
17	Menu Informasi Pada Website Lama.....	89
18	Menu Monografi Data Statis Pada Website Lama.....	90
19	Menu Monografi Data Dinamis Pada Website Lama	90
20	Data Monografi th 2017 milik Kelurahan Gentong	93
21	Halaman Login Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web.....	95
22	Submenu Kecamatan dalam Menu Data Master.....	95
23	Pilihan untuk mengubah data kecamatan.....	96
24	Data Master: Kecataman.....	96
25	Submenu Kelurahan dalam menu Data Master	97
26	Pilihan Ubah Data Kelurahan	97
27	Tampilan utama Data Master Kelurahan	98

28	Sub Menu Data Umum pada menu Data Monografi Kelurahan	99
29	Filter data pada sub menu Data Umum	99
30	Sub Menu Data Personil pada Menu Data Monografi Kelurahan	100
31	Filter data pada sub menu Data Personil	100
32	Sub Menu Data Kewenangan pada menu Data Monografi Kel.....	101
33	Filter data pada sub menu Data Kewenangan.....	101
34	Sub Menu Data Keuangan pada menu Data Monografi Kel	102
35	Filter data pada sub menu Data Keuangan	102
36	Sub Menu Data Kelembagaan pada menu Data Monografi Kel.....	103
37	Filter data pada sub menu Data Kelembagaan.....	103
38	Sub menu Data Tantrib dan Bencana pada menu Data Monografi	104
39	Filter data pada sub menu Data Tantrib dan Bencana	104
40	Sub Menu User Login pada menu Pengaturan	105
41	Ubah Data User pada Pengaturan	106
42	Tampilan User untuk admin	106
43	Manajemen Pengaturan User	107
44	Pengaturan Profil User	108
45	Tampilan Baru website Sistem Informasi Data Kelurahan	109
46	Pilihan Filter Informasi Kelurahan dalam Data Umum.....	110
47	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum.....	111
48	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 1	112
49	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 3.....	112
50	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 4.....	113
51	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 5.....	113
52	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 6.....	114
53	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 7.....	115
54	Variabel Informasi yang disajikan dalam Data Umum Page 8.....	115
55	Filter Informasi Pada Menu Data Personil	116
56	Variabel Informasi yang disajikan Data Personil Page 1.....	117
57	Variabel Informasi yang disajikan Data Personil Page 2.....	118
58	Variabel Informasi yang disajikan Data Personil Page 3.....	118

59	Filter Informasi Pada Menu Data Kewenangan.....	119
60	Variabel Informasi dalam menu Data Kewenangan	120
61	Filter Informasi dalam menu Data Keuangan.....	120
62	Variabel Informasi dalam menu Data Keuangan Page 1	121
63	Variabel Informasi dalam menu Data Keuangan Page 2	122
64	Variabel Informasi dalam menu Data Keuangan Page 3	122
65	Filter Informasi dalam menu Data Kelembagaan	123
66	Variabel Informasi dalam menu Data Kelembagaan Page 1	124
67	Variabel Informasi dalam menu Data Kelembagaan Page 2	125
68	Filter Informasi dalam menu Data Tantrib dan Bencana.....	126
69	Variabel Informasi dalam menu Data Tantrib Bencana Page 1.....	127
70	Variabel Informasi dalam menu Data Tantrib Bencana Page 2.....	128
71	Perwakilan kelurahan se-Kota menghadiri launching Sistem	135
72	Alur Masukan Data untuk Sistem Informasi Data Kelurahan	146
73	Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web.....	148



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Pedoman Wawancara	178
2	Surat Ijin Pra Penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi	180
3	Surat Ijin Penelitian ke Bappelitbangda Kota Pasuruan dari Fakutas.....	181
4	Surat Ijin Penelitian ke Kelurahan dari Fakultas	182
5	Surat Ijin Pra Riset dari Bakesbangpol Kota Pasuruan	183
6	Surat Ijin Riset/Penelitian untuk Bappelitbangda Kota Pasuruan.....	184
7	Surat Ijin Riset/Penelitian untuk Kelurahan.....	185
8	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	186
9	Permendagri No 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa.....	187
10	Operator Sistem Informasi Data Kelurahan dari Bappelitbangda.....	195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Adapun pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayan publik.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan informasi sebagaimana penjelasan mengenai pelayanan publik di atas. Hal ini selaras dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Indonesia telah memulai momentum baru dalam era keterbukaan sejak tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang E-Government, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang berjalan mengarah pada Media Jatim Menuju *E-Government* yang melalui Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur wajib menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaannya agar menuju terwujudnya *E-Government*. Sehubungan dengan hal ini, maka seluruh kabupaten/kota beserta SKPD-nya di Jawa Timur sedang giat-giatnya melaksanakan *e-government* hingga banyak inovasi-inovasi yang digagas

mendapatkan penghargaan dan masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kota Pasuruan sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur juga tak luput dari semangat membangun *e-government* yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2014, Kota Pasuruan menggagas program-program “Menyongsong Era Digital”. Jadi program *e-government* yang diciptakan adalah dalam rangka menyongsong era digital. Salah satu SKPD di Kota Pasuruan yang membuat inovasi adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang sejak Tahun 2017 ini berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan. Mereka mempunyai inovasi-inovasi sendiri untuk mengisi, meramaikan, dan mendukung gerakan pemerintah menyongsong era digital. Menurut West & Farr (Ancok, 2012:34) bahwa inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat.

Bappelitbangda Kota Pasuruan mempunyai inovasi *e-government* diantaranya, Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah (SIPPD); e-Monev; e-Lakip; Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) yang kini berubah menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*; dan e-Ampeg. Sejak 2015, Keenamnya dapat dijumpai dalam *website* resmi Bappelitbangda Kota Pasuruan dan terdapat menu *e-government*.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Salah satu inovasi dari Bappeda Kota Pasuruan yang menarik adalah Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Dapat dikatakan menarik sebab ini adalah sebuah layanan informasi mengenai data seluruh kelurahan di Kota Pasuruan yang berbasis *website* dan dapat diakses pada *website* resmi Bappelitbangda Kota Pasuruan, di <http://bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel>, mereka membuat inovasi ini untuk mengumpulkan data tentang kelurahan di Kota Pasuruan yang akan digunakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan, selain itu Bappelitbangda Kota Pasuruan juga ingin memfasilitasi seluruh kelurahan di Kota Pasuruan dalam menginformasikan data-data tentang kelurahannya, sebab selama ini informasi tentang kelurahan dibuat dengan papan data informasi yang ada di tiap-tiap kantor kelurahan dan umumnya data yang ditampilkan tidak *update*. Hal ini terbukti dari papan data informasi milik Kelurahan Gentong, Kelurahan Sebani, dan Kelurahan Bukir yang terpampang di kantornya adalah data-data tahun lalu.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* adalah sebuah gagasan atas permasalahan ketersediaan data atau informasi tentang desa yang sering terjadi pada pelayanan masyarakat di tingkat desa. Meskipun cakupannya di tingkat desa, secara akumulatif akan menjadi pemasalahan yang lebih luas yaitu di tingkat nasional karena pemerintah desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang pelayanannya langsung berhadapan dengan masyarakat. Sebab

dekatnya pelayanan pemerintah desa dengan masyarakat dapat memberikan indikasi bahwa data-data tentang desa dan semua atribut – atribut lainnya seperti penduduk, potensi desa, profil desa, data statistik desa yang lainnya adalah data yang paling real. Data-data dari desa ketika diakumulasikan, maka akan menjadi data nasional. Ketika data real yang di desa tidak valid yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non teknis, maka data nasional pun akan menjadi tidak valid. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dasar pembangunan bangsa adalah berdasarkan data real di lapangan dan itu diperoleh langsung dari perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Adapun dasar hukum program ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* diklaim oleh Bappelitbangda sebagai sistem yang baru dan memiliki kebermanfaatan diantaranya dapat menampilkan data umum kecamatan yang berisi data umum kecamatan; data pejabat kecamatan; data umum Desa/Kelurahan; data pejabat desa/kelurahan. Sistem ini juga dapat menampilkan data statistik yang di *grouping* berdasarkan kebutuhan statistika pemerintahan, serta dapat menampilkan informasi data monografi yang bisa digunakan untuk pihak kelurahan sebagai alat bantu pencatatan dan proses rekap dalam pelaporan monografi diwilayahnya ke Pemerintah Kota. Inovasi ini pada awalnya ditangani bagian Sub Bidang Statistik, dimana tugasnya melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengelolaan data

serta menghimpun hasil-hasil penelitian yang selanjutnya akan membantu melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan statistik khusus, survei antar sensus dan survei berskala nasional di tingkat kota dan digunakan untuk melaksanakan penyusunan statistik data pembangunan daerah. Hal ini berarti inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* diciptakan untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan dan mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sebab informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadinya. Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Sistem informasi ini semula bernama Sistem Informasi Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL), lalu berganti nama menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sejak 2017, dengan pergantian nama ini juga diikuti pula oleh penambahan beberapa konten *website* yang berisi informasi mengenai kelurahan. Dalam situs resminya, banyak menu seputar profil yang ditampilkan seperti data kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pasuruan, jumlah penduduk di tiap kelurahan, pejabat kelurahan dan kecamatan, data lokasi kelurahan, monografi, dan banyak lainnya.

Penelitian ini dilakukan di kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan sebab program Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini dilaksanakan oleh pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan. Penelitian ini menyoroti inovasinya, untuk mengetahui seperti apa gagasan yang dibawa, proses yang dikerjakan sistem informasi ini dari awal mendapatkan data hingga informasi diterima masyarakat,

kendala yang dihadapi sehingga menghambat waktu *launching*, hal-hal yang membuat inovasi ini tetap dipertahankan dan harapan-harapan untuk pelaksanaannya nanti. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak Bappelitbangda dan pihak-pihak yang terlibat seperti kelurahan Se-Kota Pasuruan dan CV Khasanah Konsultama dalam mengoptimalkan cara kerja Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam inovoasi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan)”**. Inovasi dalam hal ini berorientasi pada seperti apa konsep dan gagasan yang dimiliki Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*, yang sedang berupaya memenuhi ketersediaan informasi seputar data kelurahan di Kota Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimanakah inovasi dan aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan inovasi dan aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis faktor penghambat dan pendukung inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* untuk layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan.
3. Membantu Bappelitbangda Kota Pasuruan dan pihak-pihak yang terkait, yakni kelurahan se-Kota Pasuruan dan CV. Khasanah Konsultama untuk memaksimalkan inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta dapat memperkaya kajian tentang penerapan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya mengenai Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* bagi instansi pemerintah.
4. Bagi masyarakat, sebagai media informasi tentang inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang masalah yang melatarbelakangi penulis mengambil judul dan melakukan penelitian ini. Rumusan masalah yang menjelaskan pokok-pokok masalah yang akan peneliti teliti sesuai judul skripsi. Kemudian ada tujuan penelitian berisi maksud yang ingin dicapai peneliti terhadap penelitian skripsi ini, sedangkan manfaat berisi kontribusi peneliti bahwa penelitian ini dipersembahkan atau dapat dimanfaatkan untuk siapa saja, serta yang terakhir ada sistematika penulisan yang menjelaskan secara singkat bagian-bagian yang ada dalam penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang semua landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya ada konsep administrasi publik, pelayanan publik, konsep sistem informasi manajemen, konsep data, konsep inovasi, konsep

e-government, dan konsep keterbukaan informasi publik. Dasar teori yang terlalu umum, cukup ditulis secara ringkas. Sebaliknya, dasar teori yang benar-benar menjadi dasar teori dalam penelitian ini dikupas secara mendalam, lengkap dengan referensinya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, diantaranya ada jenis penelitian, fokus penelitian yang digunakan untuk memfokuskan apa yang ingin diambil saat penelitian di lapangan, lokasi dan situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, jenis dan sumber data yang menjelaskan data yang diambil oleh peneliti berasal dari mana, teknik pengumpulan data menjelaskan cara-cara peneliti dalam mendapatkan data, instrumen penelitian yang menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam penelitian, dan analisis data menjelaskan tentang bagaimana peneliti mengolah data yang telah didapat selama penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat mengenai hasil dan pembahasan hasil penelitian. Peneliti dalam bab ini menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh selama penelitian yang meliputi: uraian tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan baik data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya menguraikan pembahasan dan analisis yang merupakan penganalisisan data yang telah disajikan dan kemudian diinterpretasikan teori dengan kondisi lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang secara garis besar memuat temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metode teknis serta implikasi dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran alternatif peneliti yang mungkin bisa diambil dan dikembangkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi kerap dikaitkan dengan dunia perkantoran. Biasanya, urusan perkantoran yang berhadapan langsung dengan publik dikenal dengan istilah administrasi. Menurut Siagian (1992:2), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Definisi administrasi menurut Siagian di atas menunjukkan paling sedikit tiga hal. Pertama, administrasi merupakan suatu seni sekaligus proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional. Administrasi selalu terikat pada kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkandung pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan tercapainya tingkat dan mutu pekerjaan yang semakin meningkat. Kedua, administrasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua orang atau lebih, orang-orang tersebut bekerja bersama dalam hubungan yang sifatnya formal dan

hirarkhis, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu. Ketiga, administrasi sebagai proses kerjasama bukanlah merupakan hal baru karena administrasi sesungguhnya timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Dengan alasan itulah sering dikatakan bahwa administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial. Dari penjelasan Siagian, dapat kita ketahui bahwa administrasi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih sebagai seni ataupun proses. Seni yang berarti administrasi bersifat fleksibel dan kondisional, sedangkan proses berarti administrasi dilakukan dan tumbuh seiring apapun kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok.

2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu seni dan ilmu yang digunakan pada saat kegiatan pelayanan publik. Administrasi publik juga merupakan suatu manajemen serta organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siagian dalam Ibrahim (2008:15), bahwa administrasi publik diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dijelaskan pula oleh Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja dalam Ibrahim (2008:4), apabila di Indonesia ini pengkajian administrasi publik lebih ditekankan pada administrasi pembangunan, yang ditafsirkan sebagai teori, strategi dan kebijakan mengenai pembangunan administrasi negara yang ditujukan kepada

peningkatan kemampuannya dalam merumuskan, melaksanakan mengawasi dan menilai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan.

Dua kutipan yang diambil oleh Ibrahim di atas menunjukkan administrasi publik lebih diartikan kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Khususnya urusan pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Maka dari administrasi publik cakupannya luas, mulai dari kelompok kecil yang hanya berjumlah dua orang hingga kelompok atau organisasi yang besar seperti pemerintahan. Semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut.

B. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang menjadi fokus studi disiplin Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Kurniawan dalam Lijan (2008:5) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang

tersebut bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dua pengertian pelayanan publik di atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pelayanan yang sampai ke masyarakat kerap dibantu dengan berbagai media dan teknologi. Penyampaian tersebut tentunya didukung oleh sebuah sistem yang baik dalam menyampaikan pelayanan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 23 UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Dimana penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. profil penyelenggara
- b. profil pelaksana
- c. standar pelayanan
- d. maklumat pelayanan
- e. pengelolaan pengaduan
- f. penilaian kinerja

Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

C. Konsep Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi sering terdengar dengan kata komputer dan dikaitkan dengan sistem informatika padahal sebenarnya pengertian informasi dan informatika sangat berbeda. Pengertian Sistem Informasi memiliki beberapa komponen teknologi informasi, hal inilah berkaitan pada tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu juga, Sistem Informasi membantu untuk mengontrol suatu proses kinerja. Menurut Ibrahim (2008:29), teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi negara, karena administrasi negara sendiri adalah suatu sistem. Dalam analisisnya pun memerlukan pendekatan sistem, dengan model dan teknik analisis yang sesuai pula. Dari beberapa pendapat yang dirangkum oleh Ibrahim (2008:29), konsep sistem antara lain sebagai berikut:

- a. Pengertian sistem secara umum ialah suatu totalitas (entitas) yang kompleks yang terdiri dari seperangkat bagian-bagiannya (subsistem-subsistem) yang saling berinteraksi sesamanya dan lingkungannya dalam bentuk saling ketergantungan yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Ciri-ciri sistem antara lain:
- 1) Pada umumnya sistem bersifat terbuka (kalau tidak terbuka ia mati atau *mandek*), selalu berinteraksi dengan lingkungannya.
 - 2) Terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan setiap sub sistem terdiri dari beberapa sub-sub yang lebih kecil, demikian selanjutnya.
 - 3) Antar sub sistem terjalin saling ketergantungan dalam arti bahwa satu subsistem membutuhkan masukan (*input*) dari subsistem lain, dan keluaran (*output*) dari subsistem tersebut diperlukan sebagai masukan bagi subsistem yang lain lagi, *vise-versa*.
 - 4) Setiap sistem memiliki kemampuan menyesuaikan diri (*adaptation*) dengan lingkungan, melalui mekanisme umpan balik (*feed back*)
 - 5) Sebuah sistem pada dasarnya mempunyai kemampuan/kehandalan mengatur dirinya sendiri (*self regulation*).
 - 6) Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai.
 - 7) Setiap sistem melakukan kegiatan transformasi, mengubah masukan menjadi keluaran, karenanya sistem berfungsi sebagai *processor* atau transformator. Suatu sistem merupakan suatu kebulatan yang utuh menyeluruh (*wholism*), sinergik/interaktif/sigmatik bukan penjumlahan subsistemnya secara aritmetis.

- 8) Bersifat entropi (tidak bersifat abadi)
- 9) Mempunyai regulasi, hirarki, diferensiasi, dan *equinafinally* (terbuka sekaligus berbatasan serta berinteraksi dengan lingkungan/eksternalnya)

Menurut Brien dan Marakas (2014:27), sistem memiliki tiga fungsi dasar:

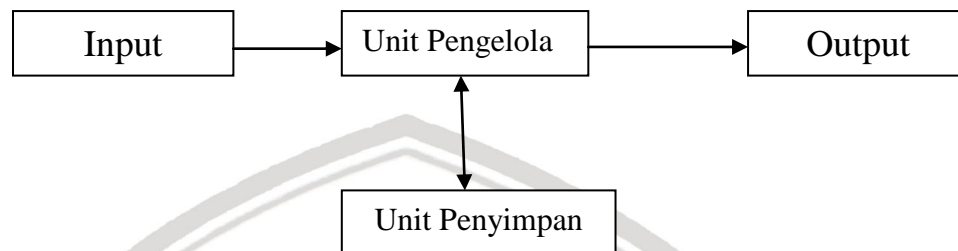
- a. Masukan: melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Sebagai contoh, bahan baku, energy data, dan usaha manusia harus diamankan dan diorganisasi untuk pengolahan
- b. Pengolahan: melibatkan proses transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Contohnya proses manufaktur, proses bernapas manusia, atau perhitungan matematika.
- c. Keluaran: melibatkan pemindahan elemen yang telah dihasilkan oleh sebuah proses transformasi ke tujuan akhir mereka. Sebagai contoh, produk jadi, jasa manusia, dan manajemen informasi harus dikirimkan kepada pengguna manusia mereka.

Beberapa pendapat dari Ibrahim tentang sistem di atas, masing-masing menekankan bahwa sistem memakai pendekatan pada elemen atau komponen yang bisa mengerjakan suatu proses dari *input* hingga *output*. Begitu pula diperkuat dengan fungsi sistem menurut Brien dan Marakas. Artinya, bahwa sistem haruslah terdiri atas berbagai komponen/elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mengerjakan apa-apa yang sudah menjadi tujuan. Dalam penelitian ini sistem yang dimaksud adalah sistem informasi.

Informasi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi didengar di telinga kita. Informasi memang sangat penting sekali dan sangat di butuhkan untuk kita dalam menambah wawasan dan pengetahuan, bukan hanya untuk para anak-anak yang sekolah saja ataupun para mahasiswa yang membutuhkan yang namanya informasi. Akan tetapi informasi di butuhkan oleh semua orang tanpa memandang yang namanya siapa dan usia berapa. Adapun informasi menurut Sutanta (2011:13) merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sutanta bahwa untuk memperoleh informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengelola. Contoh: informasi adalah daftar pegawai berdasarkan departemen, daftar pegawai berdasarkan golongan, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir bulan, rekapitulasi transaksi penjualan pada akhir bulan, dan lain-lain.

Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah diberi makna yang memiliki arti tertentu. Informasi bisa juga diartikan sebagai media pengetahuan yang mana didapat dari suatu pembelajaran dan pengalaman. Sebagaimana pendapat Anggadini (2011) bahwa informasi merupakan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga berubah bentuknya menjadi informasi. Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Dalam gambar tersebut input adalah data yang akan diolah oleh unit pengolah, sedangkan output adalah informasi sebagai hasil pengolahan data yang telah

diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpan (memori sekunder) diperlukan sebagai alat penyimpan data dalam bentuk basis data.



Gambar 1. Transformasi data menjadi informasi
Sumber: Sutanta (2011)

Informasi diperlukan oleh para pemakai (manajemen) pada seluruh level manajemen dalam seluruh fungsi organisatoris. Informasi tersebut dapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan, memberikan standar keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan (Sutanta, 2011:15).

Dua pendapat ahli tentang informasi di atas, menjelaskan bahwa adanya informasi akan memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasar informasi yang diperoleh. Adapun menurut Nugroho (2010:16), informasi yang baik harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Akurat

Maksud akurat ialah informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bebas dari bias. Bebas dari kesalahan berarti bahwa informasi tersebut benar-benar menyatakan apa yang harus dinyatakan. Bebas dari bias berarti bahwa informasi tersebut harus teliti.

b. Tepat waktu

Jelas informasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Informasi yang sudah kadaluarsa hanya bernilai sampah, sekalipun informasinya sama dan tidak berubah

c. Relevan

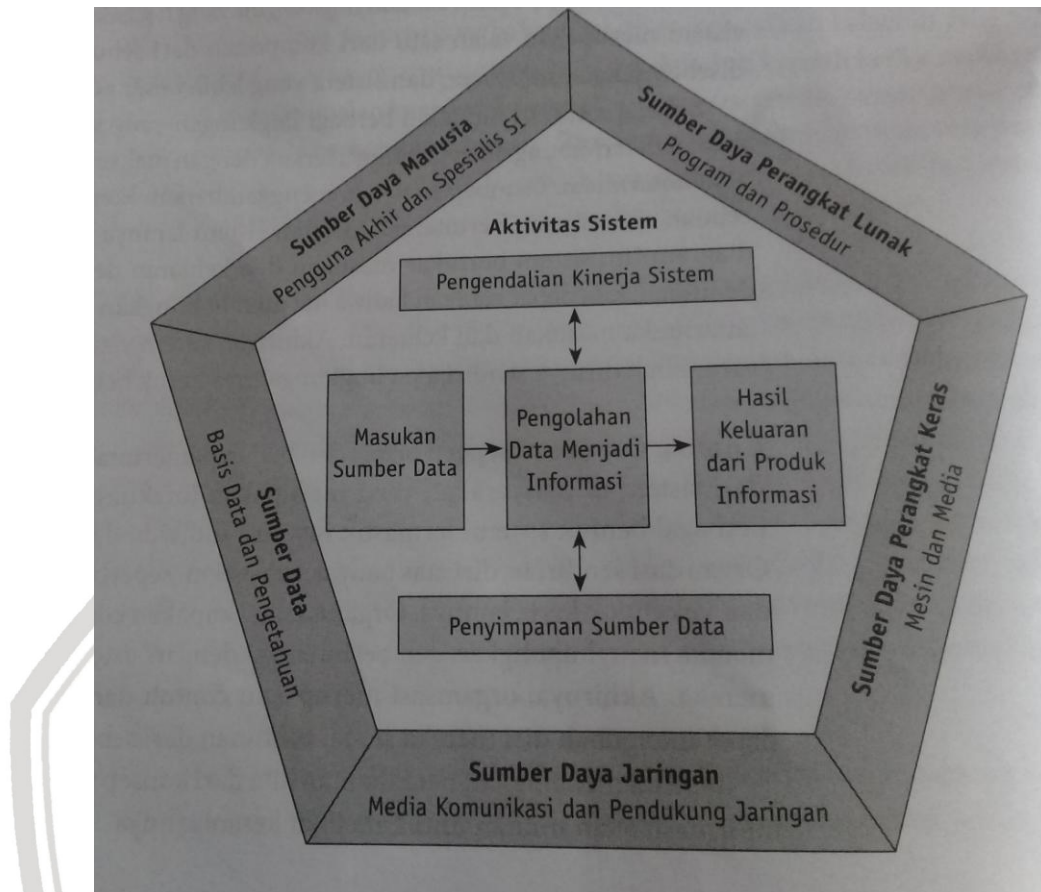
Artinya bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi. Misalnya, untuk menghitung dosis obat seorang pasien, dokter membutuhkan informasi mengenai berat badan pasien. Jadi, berat badan pasien adalah informasi yang relevan, sedangkan informasi tentang tinggi badan pasien bukanlah informasi yang relevan.

Pengertian sistem dan informasi yang telah diungkapkan di atas, menyimpulkan bahwa sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya

baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional manjerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen kerap dikaitkan dengan bentuk-bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk sistem elektronik seperti *website* dan aplikasi. Menurut Nugroho (2010:16) Sistem Informasi Manajemen yang disingkat SIM, adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Dijelaskan pula bahwa peran informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia. Artinya, tanpa adanya aliran informasi yang sehat, organisasi akan mati. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nugroho, bahwa sistem informasi dalam manajemen perusahaan adalah sistem yang terbuka dan sistem lingkaran tertutup. Sistem informasi mendapatkan *input* berupa data-data atau kejadian dalam perusahaan, diubah dengan pengolah informasi untuk mendapat informasi. Pengolah informasi tersebut dapat berupa komputer, orang ataupun gabungan keduanya. Adapun yang menjalankan fungsi mekanisme pengendaliannya adalah para manajer perusahaan. Sedangkan *output* informasi yang dihasilkan dipakai oleh para manajer dalam mengambil keputusan untuk memecahkan persoalan dalam perusahaan dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Perubahan data menjadi informasi juga digambarkan dalam gambar 2 berdasarkan pendapat dari Brien dan Marakas.



Gambar 2. Komponen dan Aktivitas Sistem Informasi (Brien dan Marakas, 2014)
 Sumber: Data sekunder hasil penelitian Tahun 2018.

Berdasarkan gambar di atas, komponen dari sistem informasi (Brien dan Marakas, 2014:32) menggunakan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya jaringan untuk melakukan kegiatan masukan, pemrosesan (penyimpanan, dan pengendalian yang mengubah data menjadi produk informasi), serta keluaran.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang

layak untuk disampaikan. Jika dikaitkan dengan organisasi pemerintah, kegiatan manajemen tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan dari sebuah instansi, terkait dengan visi dari suatu badan atau instansi yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya seperti pelayanan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, karakteristik Sistem Informasi Manajemen (SIM) dijelaskan oleh Divlat PT Telkom dalam Darmawan (2013:7) adalah sebagai berikut:

1. *Amount of Information* (Kuantitas Informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi.
2. *Quality of Information* (Kualitas Informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi.
3. *Recency of Information* (Informasi Aktual), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan informasi baru.
4. *Relevance of Information* (Informasi yang relevan atau sesuai), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan informasi.
5. *Accuracy of Information* (Ketepatan Informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan informasi.
6. *Authenticity of Information* (Kebenaran Informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar.

D. Konsep Data

Pengertian dan Kegunaan Data

Banyak orang beranggapan bahwa data hanyalah sesuatu yang mungkin merepotkan untuk mengelola dan mendapatkannya. Akan tetapi pada kenyataannya data adalah modal utama keberhasilan perencanaan sebuah pekerjaan, baik yang berada di swasta maupun instansi pemerintah/birokrasi. Data boleh disebut sebagai “tongkat pemandu” untuk menentukan arah dalam melaksanakan roda suatu pekerjaan. Menurut Sutanta (2011:13) data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai *file* dalam basis data. Data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut. Contoh data adalah data identitas pegawai, catatan transaksi pembelian, catatan transaksi penjualan, dan lain-lain.

Data dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Itulah alasan mengapa data menempati urutan pertama aspek terpenting dalam segala kepentingan. Sebagaimana Supranto (2008:2) menjelaskan kegunaan data pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), selain itu data juga berguna bila dikaitkan dengan masalah manajemen, sebagai:

- a) dasar suatu perencanaan, agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada, sehingga dapat mencegah perencanaan yang ambisius dan susah dilaksanakan. Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan personil, kemampuan pembiayaan (keuangan), serta kemampuan material.
- b) alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan tersebut agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau koreksi.
- c) dasar evaluasi hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja yang telah ditargetkan bisa dicapai 100%, 90%, atau kurang dari itu? Apabila target tidak tercapai, faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Semua ini memerlukan data.

Arti dan manfaat data bagi manajemen dijelaskan oleh Supranto (2008:14), bahwa perencanaan berkaitan dengan masa yang akan datang, maka ada kemungkinan hal-hal yang sudah ditentukan dalam perencanaan itu pelaksanaannya atau diimplementasikannya tidak sesuai dengan perencanaan (ada penyimpangan/kesalahan). Hal ini disebabkan karena adanya unsur ketidakpastian. Itulah sebabnya, perlu dilakukan kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Mengontrol pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengetahui adanya kesalahan dalam pelaksanaan suatu perencanaan untuk segera dilakukan koreksi. Akhirnya, pada saat yang ditentukan, akan diadakan penilaian (evaluasi) atas hasil kerja akhir (*final result*). Di sinilah letak peranan data untuk keperluan manajemen, yaitu sebagai dasar perumusan perencanaan, alat kontrol, dan dasar evaluasi hasil

kerja. Di dalam setiap perencanaan diperlukan data masa lampau, sekarang, dan yang akan datang sebagai hasil ramalan.

Data diperlukan untuk perumusan perencanaan agar sesuai dengan kemampuan yang ada. Secara ringkas dari penjelasan Supranto (2008:15), data berguna untuk (a) mengetahui gambaran dari suatu keadaan/permasalahan, dan (b) membuat keputusan/memecahkan permasalahan. Lebih lanjut Supranto menjelaskan kegunaan data bagi pemerintah daerah adalah hampir sama dengan perencanaan, yakni sebagai dasar perumusan perencanaan (*plan formulation*), alat kontrol dalam pelaksanaan, termasuk pengawasan lebih lanjut terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai setiap waktu (*monitoring of the progress*), dan dasar evaluasi dari suatu program (*evaluating the impact and end results of the program*). Dengan “*managerial skill*” yang dimiliki dan dibantu oleh para teknisi yang ahli dalam bidang masing-masing, terbuka luas kemungkinan bagi pimpinan daerah dalam mengkombinasikan berbagai sumber daya di daerah secara efisien dan efektif untuk memproduksi berbagai macam barang dan jasa guna meningkatkan taraf hidup rakyat serta memenuhi kebutuhan mereka. Data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu, karena data yang diperlukan merupakan data berkala (*time series data*) yang dapat menggambarkan perkembangan tersedianya sumber dari waktu ke waktu yang sekaligus dapat dipergunakan untuk mengetahui tren atau arah perkembangan secara umum dari masing-masing sumber. Hal ini sangat memudahkan di dalam penyusunan strategi pembangunan serta penentuan prioritas.

E. Konsep Inovasi

1. Konsep Inovasi

Inovasi berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi ‘kombinasi baru’. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Namun, konsep inovasi disini dikaitkan dengan inovasi dalam konteks pemerintahan. Dikutip dari jurnal berjudul “*Innovations in Governance*” milik Mark Moore dan J. Hartley dalam buku *The New Public Governance* karangan Stephen P. Osborne (2010:55) menerangkan bahwa,

“Our focus in this chapter is on what we claims is a distinct class of publik sector innovations that deserve special attention: a class of innovations that we characterize as “innovation in governance”. These innovations differ from standard intraorganizational innovations in products, services and production processes in at least two obvious ways. On the one hand, the innovations are conceived and implemented above the organizational level: they involve networks of organizations, or the transformation of complex social production systems rather than changes solely within a particular organization. On the other hand, these innovations focus not only on concrete changes in what particular things are produced throught what particular production processes, but also on the ways in which productive activity is financed (or more broadly, resourced), the processes that are used to decide what will be produced, and the normative standards used to evaluate the performance of the social production system”.

Tulisan dari Moore dan Hartley dalam Osborne (2010:55) tersebut berfokus pada apa yang diklaim berbeda dari inovasi sektor publik, yang patut mendapat perhatian khusus, dimana sering disebut sebagai "inovasi dalam pemerintahan". Inovasi ini berbeda dengan inovasi intraorganisasional, mengenai standar dalam produk, layanan dan proses produksi, setidaknya memiliki dua cara yang jelas. Di satu sisi, inovasi dipahami dan diterapkan di atas tingkat organisasi: mereka melibatkan jaringan organisasi, atau transformasi sistem produksi sosial yang kompleks daripada perubahan hanya di dalam organisasi tertentu. Di sisi lain, inovasi ini tidak hanya fokus pada perubahan nyata dalam hal-hal tertentu yang diproduksi berpikir tentang proses produksi, tetapi juga pada cara di mana aktivitas produksi dibiayai (atau secara lebih luas disebut sumber daya), proses yang digunakan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, dan standar normatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem produksi. Penjelasan di atas (Osborne, 2010:55) juga mengutip pendapat para ilmuwan manajemen publik Hartley dan Moore yang telah berfokus pada jenis perubahan dalam pemerintahan yang dapat dianggap sebagai inovasi penting, seberapa banyak inovasi terjadi, struktur dan proses apa yang mempromosikan atau menghambat inovasi, dan apakah struktur dan proses kelembagaan saat ini mendukung inovasi yang cukup bagi pemerintah untuk merespon atau mengantisipasi tuntutan masyarakat akan perubahan.

Inovasi merupakan penerapan secara praktis gagasan kreatif. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Dalam jurnal Moore dan Hartley dalam Osborne (2010:55) tersebut juga mengutip pendapat beberapa ahli tentang konsep

inovasi. Misalnya, Lynn dalam Osborne (2010:55) yang berpendapat bahwa Inovasi tidak boleh sekadar menjadi nama lain untuk perubahan, atau untuk perbaikan, atau bahkan untuk melakukan sesuatu yang baru, hampir tidak ada sesuatu yang memenuhi syarat sebagai inovasi. Inovasi didefinisikan dengan benar sebagai transformasi orisinal, dan mendasar dari tugas inti organisasi. Dalam perumusan ini menurut Lynn dalam Osborne (2010:55), inovasi merupakan langkah perubahan bagi organisasi. Langkah perubahan ini tentunya adalah langkah-langkah perbaikan bagi kebaikan organisasi tersebut. Moore dalam Osborne (2010:56) juga berpendapat bahwa inovasi, “cukup besar, cukup umum dan cukup tahan lama untuk mempengaruhi operasi atau karakter organisasi”, inovasi juga mencakup *reinvention* atau adaptasi inovasi dalam konteks lain, lokasi atau periode waktu.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan / mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial). Sebagaimana yang diungkapkan oleh West & Farr (Ancok, 2012:34) bahwa inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Begitu juga menurut Mas’ud Said (2007:27) bahwa inovasi yaitu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja instansi tertentu

dengan didukung oleh instansi lainnya yang terkait dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdayaguna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan yang telah menjadi isu-isu utama dalam dunia pemerintah dan segi-segi kehidupan yang harus diperbaharui.

Kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di atas, bahwa inovasi adalah sebuah cara pembaharuan yang berasal dari gagasan-gagasan ada, dalam rangka pengembangan organisasi lewat proses, manajemen, produk baru yang digunakan menggunakan teknologi dan penggunaan yang menunjang dalam penyelenggaraannya.

2. Prinsip Inovasi

Prinsip inovasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker (1993) yang dikutip oleh Ancok (2012: 41-42) terdiri dari:

- 1) Inovasi merupakan sebuah usaha sistematis yang tujuannya jelas, yang dimulai dengan mengkaji peluang yang ada.
- 2) Inovasi berdasarkan perceptual (adanya kebutuhan yang nyata) dan juga konseptual. Berdasarkan konseptual bersumber dari pemikiran yang mendalam.
- 3) Inovasi harus dimulai dengan ide yang sederhana, mudah dan fokus pada satu tujuan supaya berhasil. Inovasi pada dasarnya dimulai dari inovasi kecil, bila telah berhasil dilanjutkan dengan yang lebih besar.

F. Konsep E-government

1. Pengertian E-Government

E-Government menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif, dan ini telah diterapkan di beberapa negara-negara maju dalam bidang pemerintah sejak tahun 1990-an. Dalam buku Andrianto (2007:16), dijelaskan beberapa konsep e-government dari beberapa ahli, diantaranya:

- a. E-government adalah aplikasi prinsip-prinsip *business* terhadap proses pemerintahan. Dengan segala kelebihanannya internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahana implementasi transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan (Millar, 2000).
- b. *E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government* (Bank Dunia).

2. Manfaat E-Government

Penggunaan teknologi informasi saat ini sedang gencarnya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Gore dan Tany Blair dalam Andrian (2007:17), menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya *e-government*, diantaranya:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Pendapat dari Andrean di atas menyimpulkan bahwa e-government berkaitan dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada dalam rangka mengikuti perubahan dan tren, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, manfaat yang didapatkan dari penerapan e-government ini adalah transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, juga kontrol dari masyarakat. Bentuk-bentuk dari e-government tersebut bisa *website*, pembayaran melalui mesin ATM, maupun aplikasi di *smartphone*.

3. *E-Government* berbentuk *Website*

Peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu portal *website*. Dengan adanya *website*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Maka dari itu dijelaskan oleh Nugroho (2010:47), bahwa kualitas sebuah *website* dapat dinilai dari berbagai aspek, diantaranya tampilan, kualitas, dan kemitakhiran informasi, kinerja, serta fitur-fitur yang disediakan. Pada tataran implementasi, terdapat tiga tingkatan *e-government* yang dicerminkan oleh tampilan situs (*website*) pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. *Booklet (to Publish)*

Booklet adalah jenis implementasi termudah dan berskala kecil. Kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar dan beragam. Komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalah satu arah, dimana pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. *Interact*

Tingkatan *interact* ditandai dengan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan. Terdapat dua jenis aplikasi yang dipergunakan untuk komunikasi dua arah ini. Pertama, bentuk portal dimana situs memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari informasi secara spesifik. Kedua, pemerintah memberikan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (*chatting, teleconference, web-tv, dan lain-lain*) maupun tidak langsung (*email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain-lain*).

3. *Transact*

Tingkatan *transact* ditandai dengan sudah terjadinya perpindahan (*transfer*) uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. Aplikasi ini lebih rumit karena mengharuskan adanya sistem keamanan dan perlindungan privasi pihak-pihak yang bertransaksi. Contohnya, masyarakat dapat membayar tagihan air minum atau listrik melalui internet.

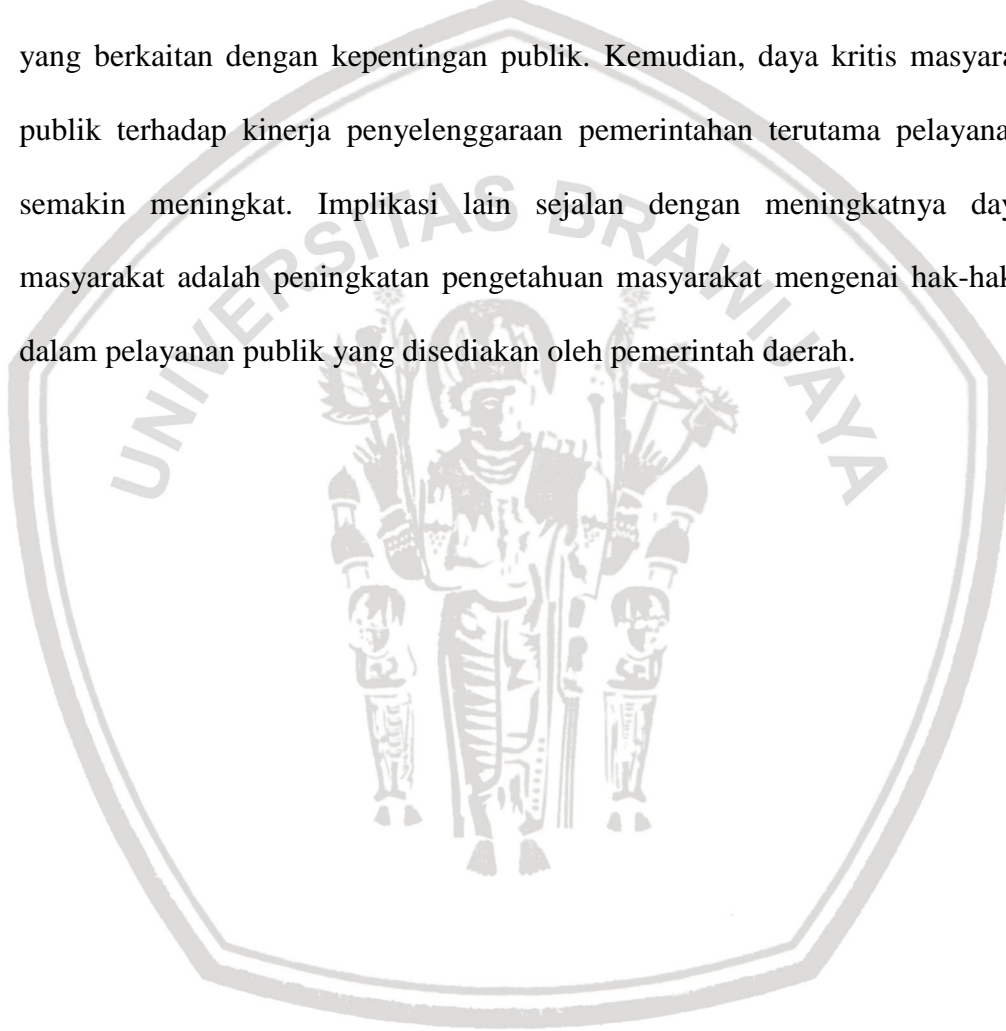
Penjelasan Nugroho tentang salah satu bentuk dari *e-government* yakni *website* (situs resmi) di atas, dapat menjelaskan apabila terdapat tiga tingkatan *website* milik pemerintah. Ketiganya diaplikasikan sesuai kebutuhan dari pemilik *website* (instansi/badan) maupun masyarakat yang dilayani.

G. Konsep Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam Undang-undang KIP tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut sebagai UU KIP, secara efektif berlaku mulai tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut tentu saja memberikan berbagai macam implikasi sebagaimana lazimnya apabila suatu kebijakan terutama setingkat undang-undang diterapkan di daerah. Implikasi dari diterapkannya UU KIP bagi pemerintah daerah adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan public tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Implikasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi public untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian, daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan public semakin meningkat. Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul (Kasiram, 2010:37). Ada dua hal yang dapat diidentifikasi untuk menjawab tentang apa hakikat penelitian yaitu:

- 1) bahwa penelitian itu adalah usaha menemukan sesuatu (*what*), dan
- 2) bahwa penelitian itu merupakan cara bagaimana menemukan sesuatu itu (*how*)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Kountur (2004:105) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Afrizal (2016:12) adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Afrizal menjelaskan bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau

mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena hasil penelitian yang dihasilkan mendeskripsikan sebuah analisis tentang inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena cara mendapatkan datanya lebih pada penggunaan interaksi komunikatif dan tidak menganalisis data yang berupa angka dengan rumus statistik atau sebuah perhitungan tertentu. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami apa yang terletak di balik fenomena apa saja yang sedikit belum diketahui (Ahmadi, 2016:12). Untuk itulah penulis menggunakan metode kualitatif sebab ingin mengetahui maksud inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini dibuat dan kendala-kendala yang menghambat *launchingnya* serta faktor pendukung yang membuat inovasi ini harus dijalankan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perumusan konsentrasi terhadap tujuan penelitian. Menurut Patton dalam Ahmadi (2016:45), menentukan fokus memiliki dua tujuan utama. Pertama, fokus itu membangun batasan-batasan (*boundaries*) untuk studi. Kedua, fokus itu menentukan kriteria inklusi-ekskusi (*inclusion-exclusion criteria*) untuk formasi baru yang muncul. Fokus penelitian pada

pendekatan kualitatif bersifat tentatif dimana peneliti dapat menyempurnakan fokus atau masalah saat peneliti sudah terjun ke lapangan secara langsung. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Inovasi dan aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan
 - a. Gagasan terciptanya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan
 - b. *Input* data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan
 - c. *Process* mengolah data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan
 - d. *Output* dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah layanan informasi kelurahan berbasis *website*
2. Faktor penghambat dan pendukung inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan.
 - a. Faktor Penghambat
 - 1) Data yang akan diolah tidak tersedia
 - 2) Pihak kelurahan kurang kooperatif
 - 3) Perpindahan wewenang dalam mengurus Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL)

- 4) Kesibukan pihak ketiga
- 5) Kelurahan belum diberi *security system*

b. Faktor Pendukung

- 1) Kebutuhan Bappelitbangda Kota Pasuruan terhadap informasi kelurahan sebagai bahan perencanaan pembangunan
- 2) Komitmen Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk tetap melanjutkan program Sistem Informasi Data Kelurahan
- 3) Antusiasme dan kebutuhan pihak Kelurahan terhadap Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web
- 4) Perkembangan zaman yang menuntut semua serba teknologi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian adalah konteks peristiwa atau kegiatan terjadi, suatu wilayah yang ditetapkan secara sosial dengan batasan-batasan yang bergeser atau pindah-pindah. Artinya, situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu Kota Pasuruan, sebab inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* Kota Pasuruan diciptakan dan dijalankan di Kota Pasuruan. Sedangkan situs penelitiannya adalah Bappelitbangda Kota Pasuruan, di Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

(Litbang) dan Sub Bidang Sosial Budaya (Sosbud). Sebab, Sub Bidang Statistik merupakan bidang yang sebelumnya menangani SIMDASKEL; memegang tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan statistik khusus; survei antar sensus dan survei berskala nasional di tingkat kota, namun saat ini Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ditangani oleh bidang Sosial Budaya karena ada perubahan tupoksi di Bappelitbangda. Situs penelitian yang kedua adalah beberapa kantor kelurahan di Kota Pasuruan, sebab kelurahan adalah sebagai pengguna dari Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Peneliti memilih Kantor Kelurahan Gentong, Kantor Kelurahan Sebani, dan Kantor Kelurahan Bukir. Peneliti memilih situs penelitian tersebut sebab memudahkan peneliti dalam menjangkaunya, karena dekat dengan tempat tinggal peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Seorang peneliti harus memiliki sumber data yang berguna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Ahmadi (2016:108), data adalah bahan-bahan kasar (*rough materials*) yang dikumpulkan para peneliti dari dunia (lapangan) yang ditelitinya, bahan-bahan itu berupa hal-hal khusus yang menjadi dasar analisis. Data yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*values*) tertentu yang

diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, *focused group discussion*, analisis dokumen, dan sebagainya (Herdiansyah, 2015:10). Apa yang orang katakan itu menurut Patton dalam Ahmadi (2016:108) merupakan sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakana diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen.

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses penelitian, karena pemilihan data yang tepat peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dokumen, informan, dan peristiwa. Sedangkan sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan perolehan data yang digunakan secara langsung dari sumbernya yang kemudian diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan (Ruslan, 2006:138). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara mendalam terhadap *key person* yaitu pada

- a. Ibu Emy Wirasati selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Pasuruan
- b. Bapak Fecky Irawan selaku mantan staf Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Pasuruan

- c. Bapak Syafu'ari selaku Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan
- d. Ibu Ratih selaku staf Sub Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan
- e. Ibu Dian Wahyuning Ekowulan selaku Bagian PPTK Bidang Pemerintahan Kelurahan Gentong
- f. Bapak Alan Prasetyo selaku Sekretaris Kelurahan Sebani
- g. Bapak Sutrisno bagian register Bidang Pemerintahan Kelurahan Sebani
- h. Bapak Ainur Rofiq selaku Sekretaris Kelurahan Bukir
- i. Bapak Abdullah selaku Kasie Bidang Pemerintahan Kelurahan Bukir
- j. Hasil observasi peneliti terhadap kejadian atau peristiwa pada Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan dan Kantor Kelurahan Gentong; Sebani; dan Bukir di Kota Pasuruan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dihasilkan dari pihak lain atau yang digunakan oleh lembaga lain yang bukan bidang pengolahannya, tetapi data tersebut dapat dipergunakan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2006:138). Data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah gambaran umum Kota Pasuruan (lihat hal. 57; 62; 64; 65), landasan hukum susunan organisasi Bappelitbangda Kota Pasuruan (lihat hal. 71), landasan hukum dari Sistem Informasi Data

Kelurahan Berbasis *Web* yakni Pasal 152 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemreintah Daerah (lihat hal. 78); Pasal 31 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (lihat hal. 79); Perwali Pasuruan No.74 Tahun 2016 (lihat hal. 83); dan Permendagri No 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa (lihat hal. 84). Serta data mengenai apa yang telah dikerjakan oleh Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yakni pembuatan *website* lama (lihat hal. 83; 88; 89; 90; dan 95), internet yang berkaitan dengan Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis *Web* yakni tampilan baru dari website seperti pada gambar 45-70 (lihat hal 109 s/d 128), gambar 71 (lihat hal. 135) dan gambar 73 (lihat hal. 148).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh peneliti. Upaya yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data akan menentukan apakah suatu data yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi dianggap penting sebab dalam tahapan ini, seorang peneliti mencari gambaran umum dan juga informasi mengenai objek yang ingin diteliti. Definisi observasi menurut Gordon E. Mills dalam Herdiansyah (2015:131) adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan

tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Definisi menurut Mills tersebut menyiratkan bahwa observasi pada dasarnya bukan hanya mencatat perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian semata, tetapi juga harus mampu memprediksi apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut dimunculkan. Mills juga menyatakan bahwa observasi tidak hanya dapat dilakukan pada objek perilaku manusia, tetapi dapat dilakukan pada objek perilaku manusia, tetapi dapat dilakukan pada sebuah sistem tertentu yang sedang berjalan dan memprediksi apa yang mendasari jalannya sistem tersebut serta mampu membuat kesimpulan apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan, bukan merupakan observasi. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada lingkungan Bappelitbangda Kota Pasuruan dan tiga kantor kelurahan (Gentong, Sebani, dan Bukir), hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan jawaban antara Bappelitbangda Kota Pasuruan dengan kelurahan mengenai pembagian *security system* untuk pihak kelurahan (lihat hal. 86), selain

itu hasil observasi di kelurahan juga menghasilkan alur input data yang tersaji dalam gambar 72 (lihat hal. 146). Berdasarkan pengamatan ini, peneliti jadi tahu faktor penghambat no.5 dan faktor pendukung dari penelitian ini dan darimana data-data dalam sistem ini berasal.

2. Interview (wawancara)

Dalam komunikasi, wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pembicaraan dalam wawancara mempunyai tujuan yang lebih jauh daripada percakapan biasa karena mempunyai makna yang melebihi maksud percakapan biasa. Menurut Herdiansyah (2015:31), definisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Selain itu, ada tiga bentuk wawancara menurut Herdiansyah. Pertama wawancara terstruktur, dimana fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Kedua adalah wawancara semi terstruktur, berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang dengan sengaja diciptakan antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Jenis wawancara semi terstruktur ini sangat sesuai untuk penelitian kualitatif, salah satu alasan utamanya adalah karena peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan mengatur alur dan setting wawancara, tidak ada pertanyaan yang

disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan *guideline* (pedoman) wawancara sebagai pedoman penggalian data. Ketiga adalah wawancara tidak terstruktur, hampir mirip dengan semi terstruktur, hanya saja wawancara tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara. Salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur adalah pembicaraan akan mudah menjadi “ngalor-ngidul” dengan batasan pembahasan yang kurang tegas.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bersifat terbuka namun tidak keluar dari tema yang ditetapkan, kecepatan wawancara masih dapat diprediksi, pertanyaan yang diajukan peneliti fleksibel artinya menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat penelitian namun masih tetap terkontrol, berpedoman pada buku panduan wawancara (lihat pada lampiran) dan yang terakhir tujuan melakukan wawancara tersebut untuk mengetahui suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang utama sebab banyak data yang dihasilkan melalui wawancara. Peneliti telah melakukan wawancara kepada Sembilan orang dari Bappelitbangda Kota Pasuruan dan tiga kantor kelurahan (Kelurahan Gentong, Sebani, dan Bukir), diantaranya Bapak Syafu'ari; Bapak Fecky; Ibu Ratih; Ibu Emy; Ibu Dian; Bapak Alan; Bapak Sutrisno; Bapak Ainur; dan Bapak Abdullah.

3. Dokumen

Pada saat penelitian langsung di lapangan, seorang peneliti harus memberikan bukti yang real serta relevan guna mendukung hasil penelitiannya, maka yang diperlukan oleh seorang peneliti adalah melakukan dokumentasi. Pengertian dokumen menurut Bogdan & Biklen dalam Ahmadi (2016:179) disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara, dapat ditambahkan pula seperti usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat pembaca (di surat kabar, majalah), dan karangan di surat kabar. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut.

a. Dokumen Resmi

Dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan dan sejenisnya digunakan sebagai pendukung. Peneliti menggunakan gambaran umum Kota Pasuruan yang merupakan arsip dokumen milik Bappelitbangda Kota Pasuruan (lihat hal. 56; 61; 62; 65; dan 66), gambaran umum Bappelitbangda Kota Pasuruan yang juga merupakan arsip dokumen milik Bappelitbangda Kota Pasuruan (lihat hal 72; 73; 74; 75; dan 76), dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan saat acara launching Sistem Informasi Data Kelurahan (lihat hal 85), buku monografi Kelurahan Gentong tahun 2017 (lihat

hal. 93) serta dokumen *manual book* Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web yang tersaji dalam gambar 22 sampai 44 (lihat hal. 95 s/d 108).

b. Foto hasil peneliti

Foto-foto yang diambil peneliti di lapangan memberikan gambar untuk dapat dipergunakan peneliti secara mendalam sebagai petunjuk-petunjuk yang dapat mengungkapkan adanya hubungan dan kegiatan. Foto hasil penelitian adalah mengenai monografi kelurahan yang tersaji dalam gambar 9 (lihat hal. 80); gambar 10 dan 11 (lihat hal. 81).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah manusia, yakni peneliti itu sendiri tau orang lain yang terlatih. Data yang akan diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata (bahasa), tindakan, atau bahkan isyarat atau lambang. Untuk dapat menangkap atau menjelaskan data yang demikian, yang paling tepat sebagai instrument penelitian adalah manusia.

Selain itu juga ada instrument pendukung seperti pedoman wawancara atau yang biasa disebut *interview guide* sebagai kerangka dasar melakukan penelitian agar tetap terarah (lihat pada lampiran 1). Serta peralatan pendukung lain seperti menggunakan materi audio dan visual. Data ini berupa perekaman foto, video, dan lain sebagainya yang termasuk segala jenis suara atau bunyi yang bersangkutan dengan penelitian. Peneliti menggunakan *handphone* dan kamera digital untuk audio, serta mengambil foto untuk dokumentasi serta catatan lapangan atau biasa

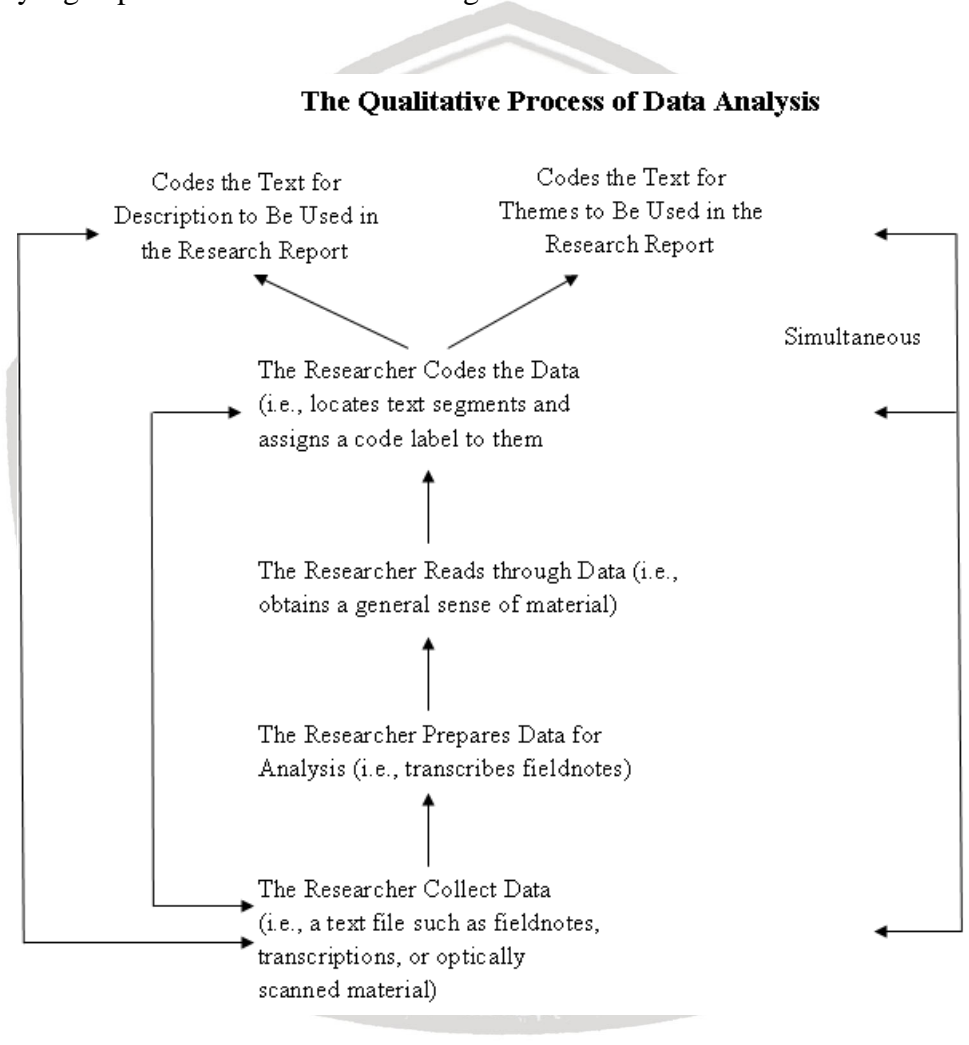
disebut *field note* untuk mencatat kejadian atau fenomena dalam penelitian (lihat pada lampiran 10).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data termasuk bagian akhir dalam proses penelitian, sebab setelah data-data terkumpul di lapangan, data tersebut akan diolah dan dianalisis agar dapat mencapai suatu kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan & Biklen dalam Ahmadi (2016:230) bahwa analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain. Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasinya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan peneliti laporkan.

Teknik analisis data kualitatif dijelaskan lebih lanjut oleh Ahmadi (2016:230) bahwa penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yang berarti kategori, tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari catatan lapangan, dokumen, dan wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun lapangan, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan. Model analisis ini peneliti anggap cocok

dengan penelitian yang akan dilakukan sebab tahapan-tahapan di dalamnya membantu peneliti dalam membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini menggunakan proses analisis data kualitatif model Creswell yang dapat divisualisasikan dalam gambar berikut.



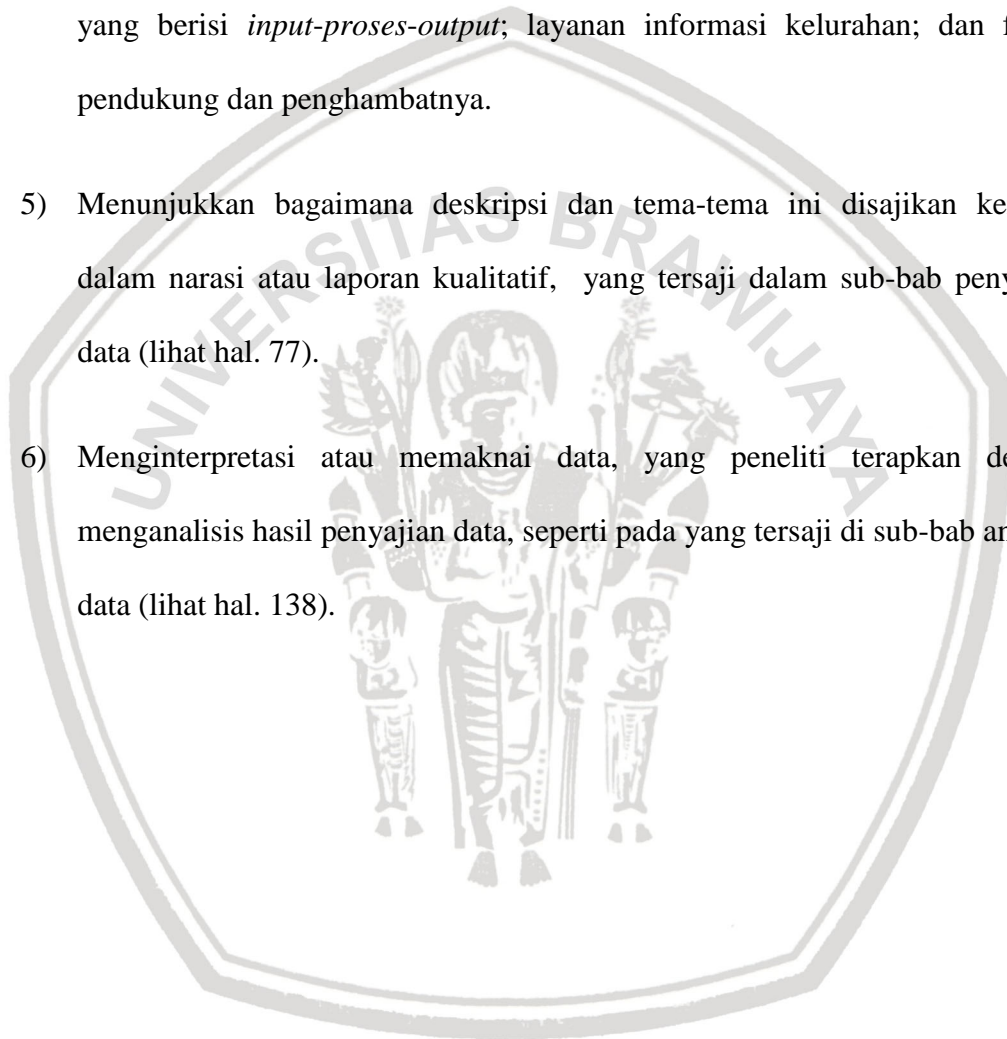
Gambar 3. Proses Analisis Data Kualitatif Model Creswell
 Sumber: Creswell dalam Ahmadi (2016: 232)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa menurut Creswell terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

- 1) Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara yang didapatkan dari *key person*, *menscaning* materi berupa *manual book* dari Sistem Informasi Data Kelurahan, kemudian memahami data primer (hasil wawancara dan observasi) dan sekunder (dokumen hasil penelitian), selanjutnya memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. Jenis-jenis tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti buat, yakni gagasan sistem ini yang berhubungan dengan sejarah dari Sistem Informasi Data Kelurahan; *input* data; proses pengolahan data pada *website*; *output* dari data yang telah diolah; hambatan-hambatan; dan hal-hal yang mendukung program Sistem Informasi Data Kelurahan.
- 2) Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini peneliti membaca, lalu menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh, jadi mencatat ringkasan dari tiap-tiap jenis yang telah peneliti buat.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya. Peneliti menyesuaikan koding berdasarkan setting lokasi penelitian yakni Bappelitbangda Kota Pasuruan dan 3 Kelurahan (Gentong, Sebani, Bukir); proses dan aktivitas yang dibagi menjadi dua waktu, yakni sebelum *launching* dan setelah *launching*; dan perspektif

subyek, yakni perspektif jawaban antara Bappelitbangda Kota Pasuruan dengan Kelurahan.

- 4) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan kategori dan tema-tema yang akan dianalisis, yakni inovasi/gagasan; sistem informasi manajemen yang berisi *input-proses-output*; layanan informasi kelurahan; dan faktor pendukung dan penghambatnya.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif, yang tersaji dalam sub-bab penyajian data (lihat hal. 77).
- 6) Menginterpretasi atau memaknai data, yang peneliti terapkan dengan menganalisis hasil penyajian data, seperti pada yang tersaji di sub-bab analisis data (lihat hal. 138).





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan

1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kota Pasuruan termasuk salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi koordinat $112^{\circ} 45' - 112^{\circ} 55'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut berjarak sekitar 60 km di sebelah tenggara Kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kota Pasuruan dilihat dari konstelasi regional Kota Pasuruan mempunyai beberapa keuntungan strategis, selain sebagai wilayah yang mempunyai kontribusi dan pergerakan yang tinggi juga sebagai wilayah yang mempunyai kontribusi dan pergerakan yang tinggi juga sebagai salah satu kota yang terletak pada pertigaan jalur regional Surabaya, Probolinggo dan Malang. Hal ini membawa konsekuensi pada pola transportasi dan penyediaan sarana transportasi dari dan ke arah Kota Pasuruan.

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan

kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkan Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.

Wilayah administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Panggungrejo dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Selat Madura
- b) Sebelah Selatan : Kec. Pohjentrek dan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kecamatan Pasuruan

(Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

Luas administrasi Kota Pasuruan adalah 35,29 Km² yang mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Gadingrejo dengan 9 kelurahan, Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 6 kelurahan dan Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pasuruan

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1. Kecamatan Gadingrejo			
1.)	Krapyakrejo	174	4,76
2.)	Bukir	66	1,8
3.)	Sebani	87	2,38
4.)	Gentong	69	1,89
5.)	Gadingrejo	133	3,64
6.)	Petahunan	97	2,65
7.)	Randusari	34	0,93
8.)	Karangketug	188	5,14
Jumlah		848	23,19
2. Kecamatan Purworejo			
1.)	Pohjentrek	190	5,19
2.)	Wirogunan	61	1,67
3.)	Tembokrejo	103	2,82
4.)	Purutrejo	115	3,14
5.)	Kebonagung	86	2,35
6.)	Sekargadung	151	4,13
7.)	Purworejo	105	2,87
Jumlah		811	22,17
3. Kecamatan Bugul Kidul			
1.)	Tapaan	115	3,14
2.)	Bakalan	178	4,87
3.)	Krampyangan	55	1,5
4.)	Blandongan	397	10,85
5.)	Kepel	254	6,94
6.)	Bugul Kidul	95	2,6
Jumlah		1094	29,9
4. Kecamatan Panggungrejo			
1.)	Panggungrejo	199	5,44
2.)	Mandaranrejo	58	1,59
3.)	Karanganyar	56	1,53
4.)	Petamanan	42	1,15
5.)	Pekuncen	80	2,19
6.)	Kandang sapi	46	1,26
7.)	Bugul Lor	96	2,62
8.)	Kebonsari	80	2,19

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
9.)	Bangilan	17	0,46
10.)	Mayangan	28	0,77
11.)	Ngemplakrejo	54	1,48
12.)	Trajeng	113	3,09
13.)	Tambahan	36	0,98
Jumlah		905	24,75
Kota Pasuruan		3,658	100

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018

2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan garis pantai pada kawasan utara yang memiliki topografi yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan rata-rata di bawah 3% dan angka ketinggian rata-rata 3 meter dari permukaan air laut. Bagian wilayah kota yang paling tinggi terletak di kawasan selatan yaitu pada wilayah Kelurahan Kebonagung dengan ketinggian 4 meter diatas permukaan air laut. Sementara di dekat pantai cukup potensial untuk budidaya ikan/udang di tambak. Mengingat wilayah ini mempunyai kemiringan antara 0 – 1% dan ketinggiannya mempunyai range antara 0 – 3 meter dari permukaan laut maka keberadaan sungai di samping menguntungkan juga merugikan karena pada musim penghujan, rawan terjadi banjir terutama di wilayah bagian utara.

Kondisi kemiringan lahan dasar akan menguntungkan untuk perkembangan lahan terbangun di masa yang akan datang. Akan tetapi, hal tersebut juga sekaligus sebagai kerugian karena pada musim penghujan akan

menyebabkan daerah tersebut tergenang karena kesulitan dalam pembuangan menuju ke laut. Kondisi tersebut terjadi pada bagian utara Kota Pasuruan yang memiliki topografi agak cekung sehingga menghambat pembuangan air hujan.

b. Geologi

Wilayah Kota Pasuruan merupakan daratan alluvium dari campuran bahan endapan yang berasal dari daerah tufvulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah selatan bukit lipatan dan batuan endapan berkapuran Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur. Dengan demikian sifat batumannya adalah intermedier sampai agak basis, sedangkan bahan induk tufvulkanis intermedier terdapat pada bagian lainnya.

c. Klimatologi

Klimatologi di Kota Pasuruan dapat dilihat dari iklim, tingkat curah hujan serta suhu dan kelembaban udara yang dijelaskan berikut ini:

1) Iklim

Kondisi iklim di Kota Pasuruan secara umum tidak berbeda dengan musim di Indonesia yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni-September arus angin berasal dari Benua Australia yang tidak banyak mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arus angin banyak mengandung uap air karena berasal dari Benua Asia dan setelah melewati Samudera Pasifik dan beberapa lautan lainnya. Pada bulan-bulan

tersebut biasanya terjadi musim penghujan. Keadaan seperti ini berganti setiap 6 bulan sekali setelah adanya masa peralihan pada bulan april – mei dan oktober – November.

2) Curah Hujan

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi dan pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah beragam antar waktu. Curah hujan tertinggi di Kota Pasuruan terjadi pada bulan November – Mei. Sedangkan curah hujan rata-rata pada tahun 2008 adalah 1,44 mm/hari.

3) Suhu dan Kelembaban

Suhu udara minimum tercatat berkisar antara $20,4^{\circ}\text{C}$ pada bulan agustus sampai dengan $28,4^{\circ}\text{C}$ pada bulan oktober, sementara suhu maksimum mempunyai range antara $29,9^{\circ}\text{C}$ – $33,9^{\circ}\text{C}$ terjadi pada bulan yang sama. Selanjutnya selain itu pada daerah dekat pantai ini mempunyai kelembaban udara yang relative tinggi.

Kelembaban udara minimum berkisar antara 48% terjadi pada bulan Oktober dan November sampai 61% yang terjadi dalam bulan februari, sementara kelembaban udara maksimum berkisar antara 87% yang terjadi pada bulan oktober dan 94% pada bulan desember.

d. Hidrologi

Kota Pasuruan terletak di Pantai Selat Madura, di batas barat terdapat Sungai Welang, di tengah kota mengalir Sungai Gembong, sedangkan di timur

mengalir Sungai Petung. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam dan seluruhnya bermuara di Selat Madura. Muara Sungai Gembong berfungsi sebagai pelabuhan sungai yang hanya dapat dilayari pada air pasang. Ketiga sungai mempunyai daerah aliran yang sempit, sehingga sering terjadi banjir yang besar. Setengah sampai 3 Km dari pantai, lahannya agak berawa dimanfaatkan untuk daerah tambak yang potensial. Makin ke timur daerah tambaknya makin luas (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

3. Kondisi Sosial Kependudukan

Pada tahun 2014 menurut data BPS Kota Pasuruan Tahun 2015, jumlah penduduk Kota Pasuruan sebesar 193.329 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 52,85 jiwa/ha. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Purworejo sebesar 67,93 jiwa/ha sedangkan kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Bugul Kidul sebesar 27,77 jiwa/ha.

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi masih

rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Pasuruan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Gadingrejo	46.258	8,27	5593
Purworejo	59.001	8,08	7302
Bugul Kidul	30.815	11,11	2774
Panggungrejo	72.424	7,83	9250

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018

4. Kondisi Penggunaan Lahan Dan Distribusi Fasilitas

Jenis penggunaan lahan di kota Pasuruan meliputi: permukiman, pertanian, industri, perkantoran dan sekolah, pasar dan pekarangan. Sedangkan kondisi lahan di Kota Pasuruan digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu. Mutu air cukup tinggi, karena airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya mineral hara. Tanaman utama adalah padi, yang ditanam pada musim penghujan dan kemarau. Untuk menanam palawija pada musim kemarau perlu perlakuan khusus, sebab keadaan drainase umumnya kurang lancar. Tambak terdapat di sepanjang pantai bagian Timur yang relative lebih luas daripada bagian Barat. Di daerah permukiman banyak ditanam pohon mangga dengan jenis utama mangga gadung dan mangga arumanis (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

a. Wilayah Terbangun

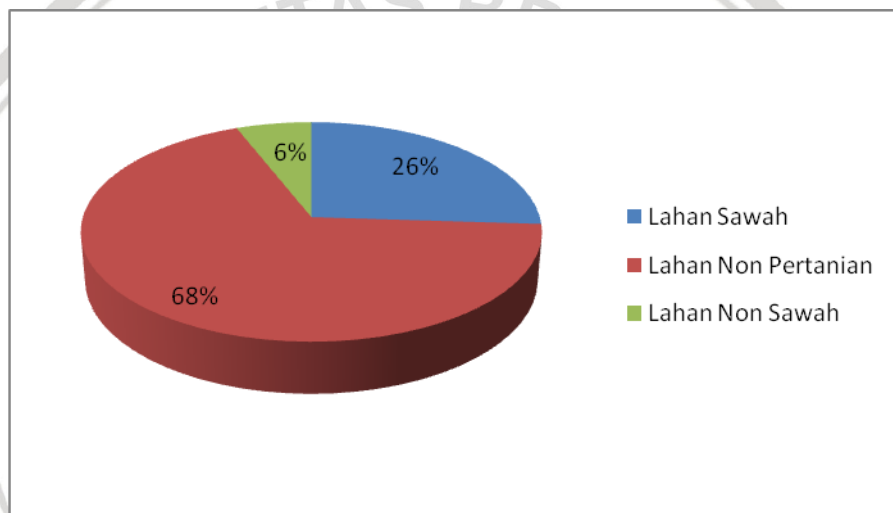
Dari total luas wilayah Kota Pasuruan yang sebesar 36,85 km², pada tahun 2014 sekitar 68%-nya berupa wilayah yang telah terbangun. Kecamatan Pangungrejo adalah wilayah terbesar, hampir 83% luas wilayah kecamatan merupakan lahan non pertanian. Sedangkan Kecamatan Gadingrejo adalah kecamatan dengan luas lahan non pertanian terkecil hanya 56%.

b. Kerapatan Bangunan

Kerapatan bangunan yang ditinjau dan jumlah yang ada di wilayah Kota Pasuruan diasumsikan jumlah orang dalam satu keluarga sebanyak 5 jiwa, maka jumlah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Purworejo berjumlah 1.330 per Km². Oleh karena itu Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan yang paling padat, kepadatan di Kecamatan Purworejo didominasi oleh Kelurahan Karanganyar dengan jumlah 331 rumah per km².

Penggunaan lahan di Kota Pasuruan secara umum terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari permukiman, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta industri dan pergudangan. Sedangkan lahan tak terbangun terdiri dari lahan pertanian, tegalan/lading, tambak, hutan bakau dan sebagainya. Penggunaan lahan Kota Pasuruan didominasi oleh lahan tak terbangun berupa sawah seluas 1.310,88 Ha atau 35,84% dari luas wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan lahan terbangun di Kota Pasuruan didominasi oleh permukiman seluas 1.083,98 Ha atau sebesar 29,63% dari luas wilayah Kota Pasuruan.

Perkembangan untuk lahan terbangun di Kota Pasuruan belum tersebar secara merata seperti pada Kecamatan Purworejo yang didominasi lahan terbangun dibandingkan Kecamatan Purworejo yang didominasi lahan terbangun dibandingkan Kecamatan Gadingrejo dan Bugulkidul yang masih banyak terdapat lahan tak terbangun seperti sawah dan tambak (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Diagram Persentase Penggunaan Lahan di Kota Pasuruan
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018

5. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kota Pasuruan menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 didominasi oleh sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 27,97% serta sector industri pengolahan sebesar 21,04%. Sedangkan menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan sector dengan kontribusi terbesar adalah sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 28% dan sector industry pengolahan sebesar 20,3%.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Pasuruan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata rata
	PENDAPATAN						
I	Pendapatan Asli Daerah	34.101.032.333	45.229.342.927	42.366.216.433	64.360.875.528	99.295.200.347	57.070.533.514
1	Pajak Daerah	6.840.982.078	11.121.514.599	13.634.037.074	13.634.037.074	20.543.481.890	13.154.810.543
2	Retribusi Daerah	15.680.924.086	14.677.534.832	17.490.636.162	14.713.809.127	9.523.550.038	14.417.290.849
3	Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.967.403.572	5.529.179.364	4.829.335.271	4.952.521.992	5.197.293.383	4.895.140.716
4	Lain-lain PAD yang sah	7.611.722.697	13.901.114.133	6.412.207.927	24.151.062.520	62.825.739.479	22.980.369.331
II	Dana Perimbangan	284.567.395.854	316.087.032.313	390.037.932.894	403.355.805.641	472.477.515.564	373.305.136.453
1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	36.803.734.854	36.892.283.313	51.554.911.894	24.337.372.641	52.592.544.564	40.436.169.453
2	Dana alokasi	231.964.161.000	263.950.449.000	319.424.821.000	353.127.853.000	391.843.124.000	312.062.081.600
3	Dana alokasi khusus	15.799.500.000	15.244.300.000	19.058.200.000	25.890.580.000	28.041.850.000	20.806.886.000
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.058.859.252	103.255.264.473	70.006.849.689	50.454.271.781	128.457.988.998	81.446.646.839
1	Hibah	0	0	0	0	0	0
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	
3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.698.199.913	29.433.643.225	27.325.476.649	27.542.168.981	61.741.768.594	34.748.251.472
4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	23.535.352.800	70.111.122.360	36.125.875.000	20.900.002.800	57.020.407.000	47.538.551.992
5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.825.306.539	3.740.498.888	6.555.498.040	2.012.100.000	9.695.813.404	5.165.843.374

Sumber: Data sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan data selama tahun 2010 – 2014, perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Pasuruan cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, total pendapatan daerah adalah sebesar Rp 34 milyar. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014, menjadi Rp 99 milyar dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 21,8%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

B. Profil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pasuruan tersebut maka fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

- a) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

- b) Penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- c) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d) Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- f) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Guna kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan pembagian tugas dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekaligus harus ditunjang dengan pelimpahan wewenang. Sehubungan dengan pembagian tugas, maka pembidangan dalam Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok dengan fungsi:

- a. Membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian dan inspektorat;

- c. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian dan inspektorat;
- d. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan pemerintahan.

2) *Bidang Penelitian dan Pengembangan*

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan dengan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penelitian pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, dan koordinasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan.

3) *Sekretariat*

Mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

4) *Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi*

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata.

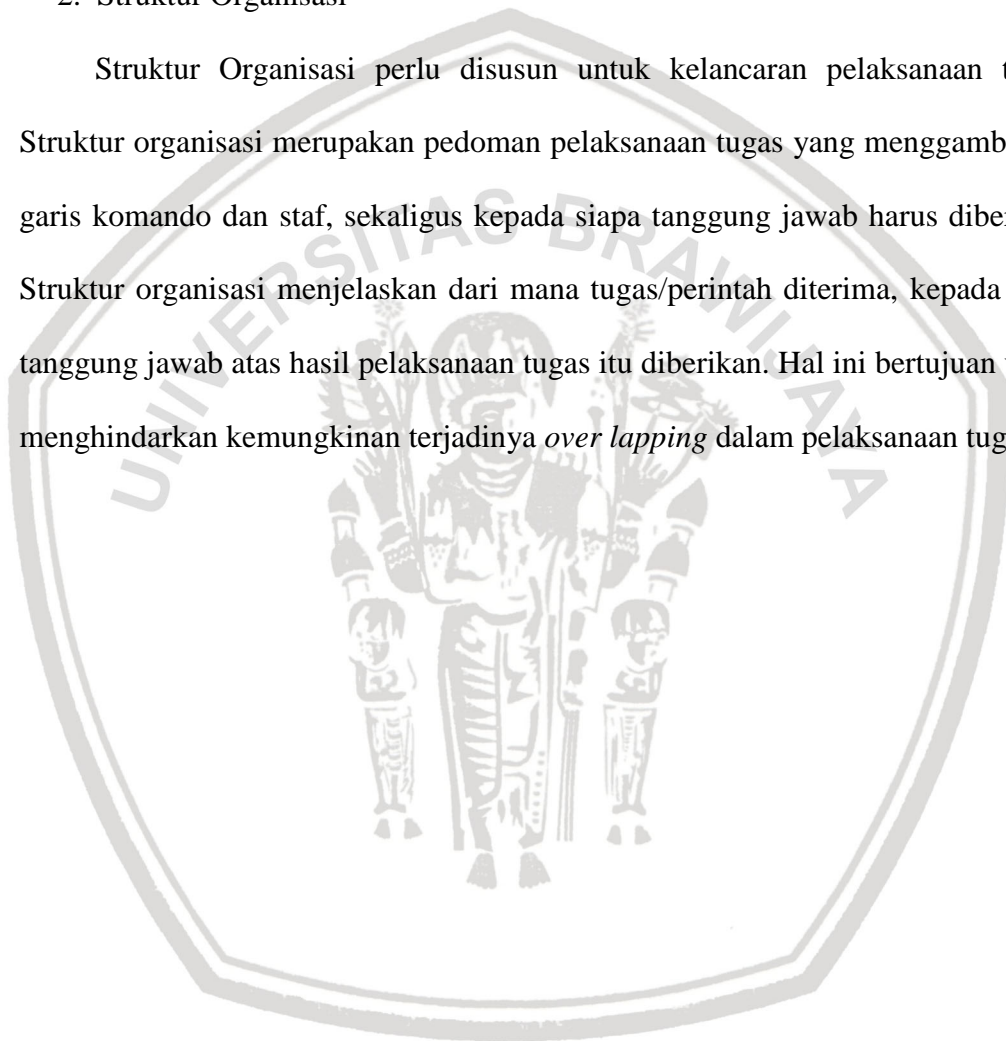
5) *Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan*

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan

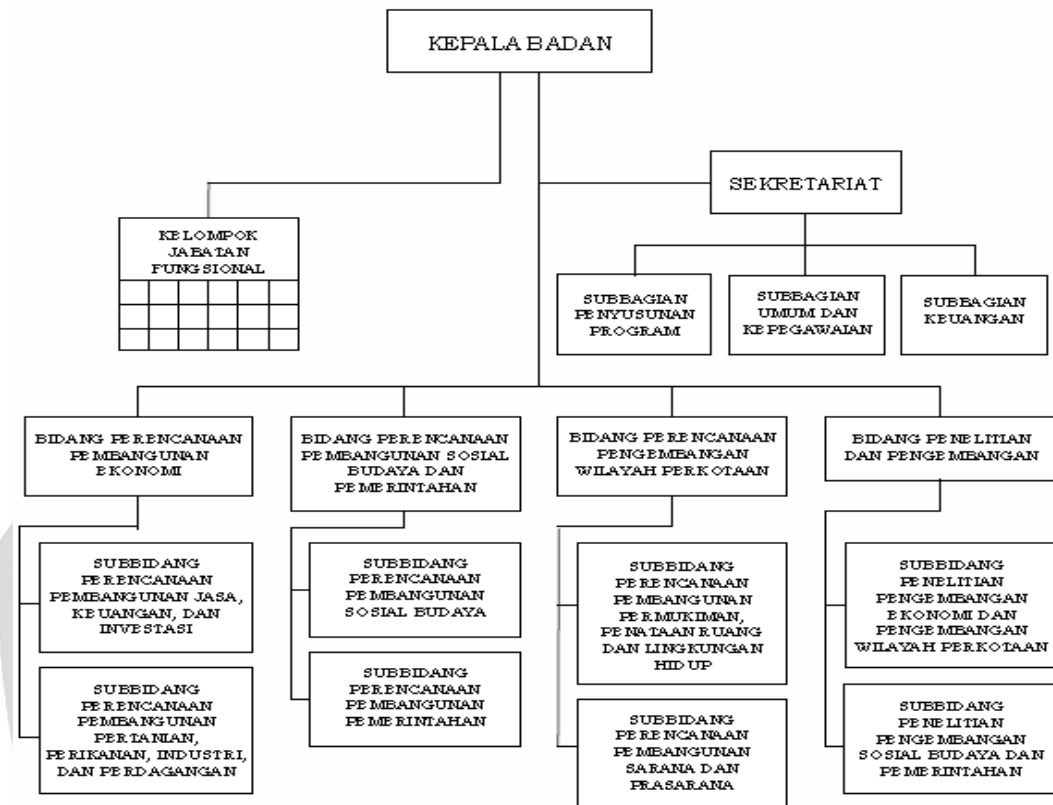
penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan (Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan hasil penelitian tahun 2018).

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi perlu disusun untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Struktur organisasi merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang menggambarkan garis komando dan staf, sekaligus kepada siapa tanggung jawab harus diberikan. Struktur organisasi menjelaskan dari mana tugas/perintah diterima, kepada siapa tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas itu diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *over lapping* dalam pelaksanaan tugas.



Berikut adalah bagan yang menunjukkan struktur organisasi Bappelitbangda Kota Pasuruan.



Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan Th. 2016-2018
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016)

3. SDM Pegawai

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menempatkan pegawai pada posisi-posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Prasyarat awal agar proses *staffing* dapat berjalan lancar adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah memadai. Kriteria memadai dimaksud mencakup ketersediaan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

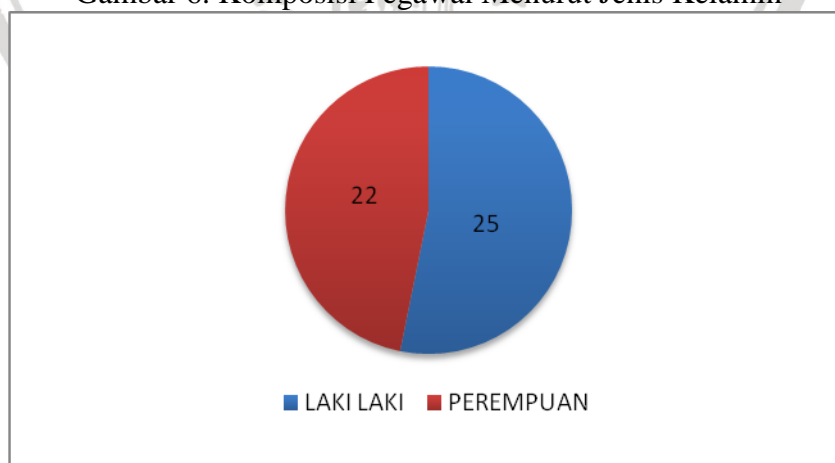
Prinsip dasar dalam proses *staffing* adalah “*the right man on the right place*”, atau penempatan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Prinsip dimaksud hanya akan terlaksana apabila organisasi memiliki ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) dengan kompetensi yang memadai sesuai kualifikasi pekerjaan. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah SDM yang ada terdiri atas: 40 PNS dan 7 Tenaga Kontrak, yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Perencanaan di Kota Pasuruan. Berikut ini tabel yang menyajikan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Laki-Laki	19	-	6	25
2.	Perempuan	21	-	1	22
	Jumlah	40	-	7	47

Sumber : Dokumen Hasil Penelitian Tahun 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Gambar 6. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Aspek kuantitas merupakan prasyarat agar semua posisi dalam struktur organisasi dapat terisi. Oleh karena itu SDM yang berkualitas merupakan jaminan awal bahwa pekerjaan akan terlaksana dengan baik, artinya SDM yang tersedia memiliki kualifikasi minimal bagi pelaksanaan tugas.

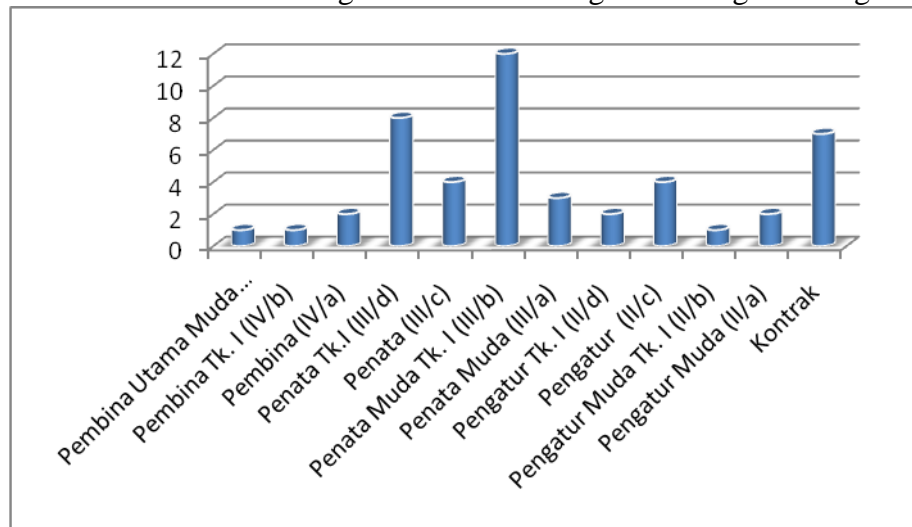
Pangkat/golongan ruang merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 1 orang Pembina Tk. I (IV/b), 2 orang Pembina (IV/a), 8 orang Penata Tk. I (III/d), 4 orang Penata (III/c), 12 orang Penata Muda Tk. I (III/b) dan 12 orang Penata Muda (III/a). 2 orang Pengatur Tk. I (II/d), 4 orang Pengatur (II/c), 1 Pengatur Muda Tk. I (II/b), 2 orang Pengatur Muda (II/a), dan 7 orang tenagakontrak. Tabel 4 menyajikan jumlah pegawai menurut pangkat/golongan ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
2.	Penata Tk. I (III/d)	8
	Penata (III/c)	4
	Penata Muda Tk. I (III/b)	12
	Penata Muda (III/a)	3
3.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	2
4.	Kontrak	7
	Jumlah	47

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Gambar 7. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang



Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai merupakan pijakan awal untuk membentuk penempatan kerja berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki pegawai. Komposisi pegawai Bappelitbangda Kota Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut: S2 sebanyak 10 orang, S1 sejumlah 18 orang, Diploma sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 7 orang, SLTP sebanyak 1 orangserta SD sebanyak 0 orang. Tabel 6 menyajikan komposisi pegawai Bappelitbangda Kota Pasuruan menurut tingkat pendidikan.

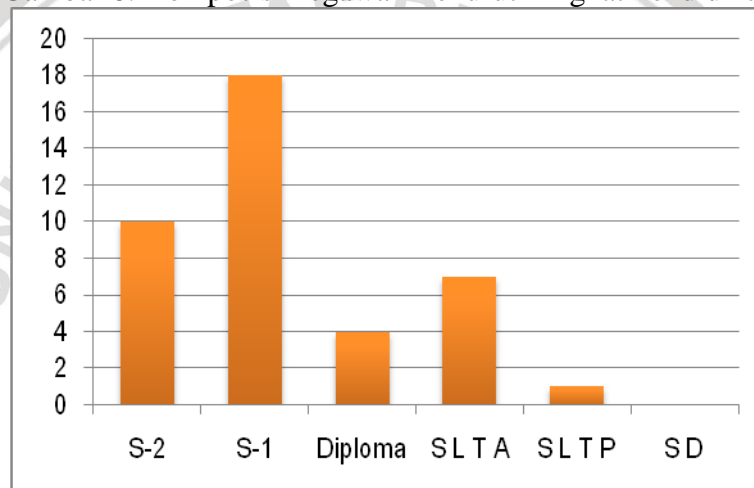
Tabel 6. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat PendidikanBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahTahun 2016

No.	Komposisi Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan:		
	- Sekolah Dasar	-	-
	- Sekolah Menengah Pertama	1	-
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	4	3
	- Diploma 1	-	-
	- Diploma 2	-	-
	- Diploma 3	2	2
	- Sarjana	7	11

No.	Komposisi Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
	- Pasca Sarjana	6	4
2	Menurut Golongan		
	- Golongan I	-	-
	- Golongan II	4	5
	- Golongan III	14	13
	- Golongan IV	2	2
	Jumlah	20	20

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Gambar 8. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Persyaratan minimal kepangkatan untuk menduduki suatu jabatan dapat terpenuhi melalui keikutsertaan dalam pendidikan kepegawaian berjenjang. Bappelitbangda Kota Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, telah mengikutsertakan pegawainya dalam diklat dimaksud. Sampai dengan tahun 2016, jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat: ADUM/Diklatpim IV sebanyak 8 orang pegawai, SPAMA/Diklatpim III sebanyak 4 orang pegawai, serta SPAMEN/Diklatpim I sebanyak 1 orang pegawai. Adapun

secara rinci jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Jumlah Pegawai Menurut Diklat Struktural Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)
1.	ADUM/Diklatpim IV	8
2.	SPAMA/Diklatpim III	4
3.	SPAMEN/Diklatpim II	1
	Jumlah	13

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Persyaratan minimal kepangkatan merupakan kualifikasi yang bersifat administratif untuk menduduki jabatan dalam pekerjaan. Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki 6 posisi jabatan (1 kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang). Untuk melengkapi persyaratan jabatan tersebut, Bappelitbangda memiliki sumber daya sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Komposisi Pejabat Struktural Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016

No	Pejabat Struktural	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
	Jumlah	18

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016)

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai di bidang perencanaan telah dilakukan Bappelitbangda Kota Pasuruan, dengan mengikutsertakan pegawai dimaksud dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan penyelenggaranya, diklat yang diikuti oleh pegawai dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Diklat yang diselenggarakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian teknis dibidang administrasi, kepegawaian, hukum, keuangan dan penganggaran.
- 2) Diklat yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga swasta diluar lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pelaksanaan diklat jenis ini pada umumnya berkaitan dengan sosialisasi aturan maupun sistem baru.

Serangkaian upaya diatas, menunjukkan komitmen Bappelitbangda Kota Pasuruan pada peningkatan kualitas pegawainya. Upaya tersebut harus ditunjang dengan kemauan pegawai untuk terus belajar sebagaimana filosofi *long life education*. Dua hal tersebut merupakan syarat mutlak, mengingat seorang perencana dituntut untuk memiliki keahlian teknis dan pengetahuan yang luas dibidang perencanaan.

C. Penyajian Data

1. Inovasi dan Aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sebagai pendukung layanan informasi kelurahan

a. Gagasan terciptanya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* dulu bernama Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) yang juga

berbasis *website*. SIMDASKEL mulai digagas oleh Bidang Statistik dan Litbang di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2013. Gagasan ini dibuat karena kesulitan yang dialami pihak Bappelitbangda dalam memperoleh data yang valid untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Syafu'ari selaku Kasubbid Sosial Budaya, “Simdaskel dulu dibuat atas inisiatif pihak bappeda sendiri, karena kami butuh data yang *update* dari kelurahan” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan). Selain itu juga berdasarkan Pasal 152 Bab VII Perencanaan Pembangunan Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emy Wirasati selaku Kepala Bidang Litbang, bahwa

“Simdaskel dulu itu dibuat karena kita kesusahan cari data dari kelurahan, bahkan hampir tidak ada data. Hanya ada data di *Pasuruan Dalam Angka*, itupun format baku dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sedangkan menurut undang-undang pemerintahan daerah tahun 2004, sama undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang intinya itu kalo buat perencanaan harus didasarkan data dan informasi yang valid” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Adapun isi dari Pasal 152 Bab VII Perencanaan Pembangunan Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018) adalah

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

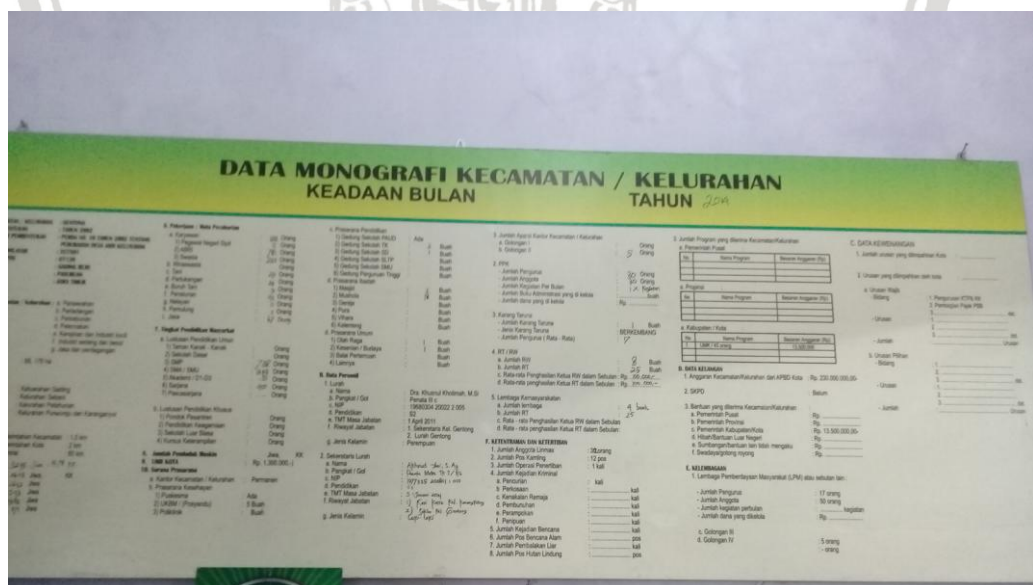
Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 31 Bab VII Data dan Informasi dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018) yang menyebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Pihak Bappelitbangda berkeinginan apabila di setiap kelurahan memiliki operator data mengenai monografi kelurahan dan data-data lainnya dikarenakan kesulitan dan dasar hukum di atas. Namun, pihak Bappelitbangda mengklaim

bahwa keinginan tersebut akan sulit direalisasikan. Sehingga, bersama kepentingan Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk mendapatkan data, mereka juga ingin memfasilitasi kelurahan untuk bisa menginput datanya sendiri. Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Emy Wirasati dalam wawancara di waktu yang sama,

“Sebenarnya kita ini kepinginnya tiap-tiap kelurahan itu punya operator data gitu mbak, ya minimal tentang monografinya. Tapi sepertinya susah diwujudkan, soalnya lingkupnya kelurahan, monografi mereka saja sering tidak *update*. Jadi mumpung kita juga butuh data, lebih baik dibuatkan sesuatu yang kita sama-sama dapat untungya. Dibuatkanlah *website SIMDASKEL* itu.” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

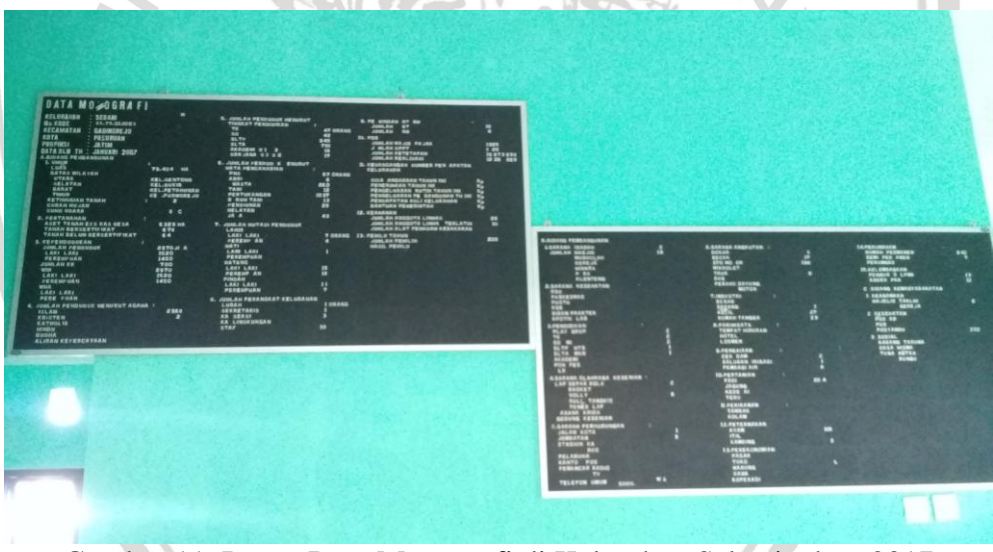
Pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Emy terbukti oleh papan data monografi yang dimiliki kelurahan selalu tidak *update*. Terbukti saat peneliti melakukan observasi di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Gentong; Kelurahan Sebanji; dan Kelurahan Bukir, ketiganya memiliki papan data monografi yang tidak *update*. Berikut adalah gambarnya.



Gambar 9. Papan Data Monografi di Kelurahan Gentong tahun 2014
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Tahun 2018 (Monografi Kelurahan Gentong Tahun 2014)



Gambar 10. Papan Data Monografi di Kelurahan Bukir tahun 2015
 Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Tahun 2018 (Monografi Kelurahan Bukir Tahun 2015)



Gambar 11. Papan Data Monografi di Kelurahan Sebanji tahun 2017
 Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Tahun 2018 (Monografi Kelurahan Sebanji Tahun 2017)

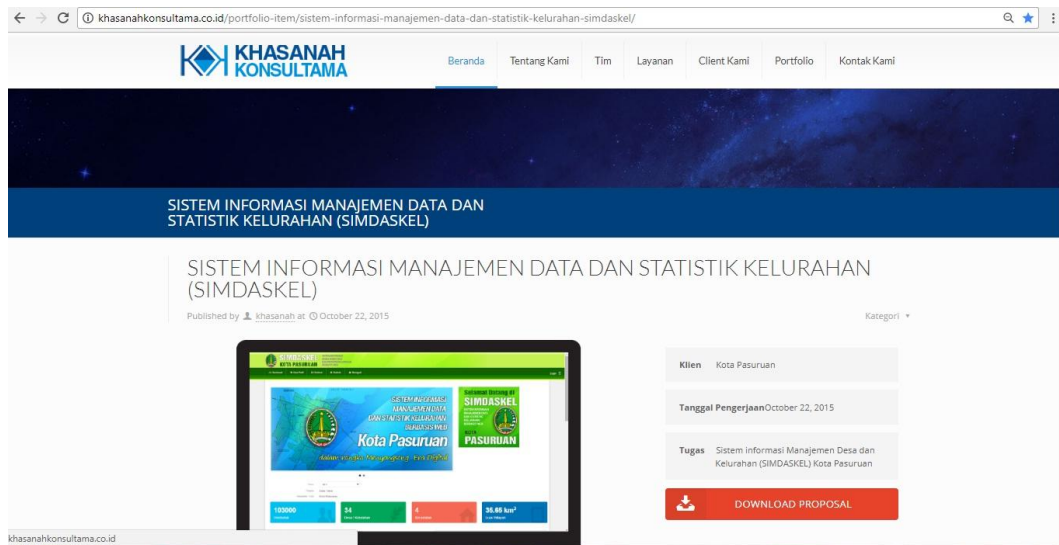
Pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Emy, serta bukti ketiga gambar papan data monografi kelurahan di atas semakin diperkuat oleh Bapak Fecky Irawan, SE. selaku staf bagian sekretariat yang dulu menjadi staf bagian litbang pada saat



SIMDASKEL mulai digagas. Menurut Bapak Fecky, “Di samping kita juga perlu datanya, kelurahan bisa diuntungkan juga loh mbak, karena kan mereka jadi bisa melihat sendiri dengan baik, monografi data mereka” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan). Kemudian, pada waktu itu di tahun 2014 dan 2015 pada saat *website* tersebut belum dibuat, sempat dilakukan pembinaan kepada seluruh kelurahan di Kota Pasuruan mengenai data dan informasi. Pembinaan tersebut bertajuk Pembinaan Data dan Informasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Emy dalam wawancara yang sama.

“Waktu itu sempat dilakukan pembinaan dulu mbak sebelum dibuatkan *website* itu, dua kali di tahun 2014 dan 2015 ya tentang mengolah data dan informasi begitu. Pas *websitenya* belum dibuat itu. Nama pembinaanya kalau tidak salah Pembinaan Data dan Informasi pesertanya dari pihak kelurahan. Tapi *website-nya* itu baru dibuat sekitar tahun 2015, yang buat pihak ketiga dari Malang. Terus tahun 2015 juga baru dimasukkan di Renja, 2016 mulai diaplikasikan meskipun belum dilaunching” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Kemudian *website* SIMDASKEL mulai dibuat pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh CV. Khasanah Konsultama, yakni sebuah perusahaan konsultan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan Konsultasi *e-Government*, Teknik dan Manajemen. CV Khasanah Konsultama ini merupakan pihak ketiga dari lahirnya *website* SIMDASKEL. Pihak Bappelitbangda mempercayakan pada perusahaan ini karena memang perusahaan ini biasa menangani proyek pembuatan *e-government* milik pemerintah. Berikut adalah gambar yang menunjukkan bahwa SIMDASKEL dikerjakan oleh perusahaan tersebut.



Gambar 12. Tanggal Pengerjaan SIMDASKEL oleh CV. Khasanah Konsultama
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website resmi CV. Khasanah Konsultama)

Pada awalnya, SIMDASKEL ditangani oleh Bidang Litbang karena berkaitan dengan data, namun sejak 2016 SIMDASKEL pindah tangan ke Bidang Sosial Budaya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh pernyataan Ibu Ratih selaku Staf Bidang Sosial Budaya dalam wawancara pada 8 Januari 2017, menurutnya perpindahan tersebut karena berkaitan dengan adanya kelembagaan baru yang pindah ke bidang sosial budaya, semuanya telah disebutkan dalam Perwali Pasuruan No. 74 Tahun 2016 (sumber: Data sekunder hasil penelitian 2018). Adapun dijelaskan dalam Pasal 16 Perwali Pasuruan No. 74 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya, sebagai berikut.

“Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat”. (Pasal 16 Perwali Pasuruan No. 74 Tahun 2016).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh pernyataan Bapak Syafu’ari selaku Kasubid Sosial Budaya. Menurut Bapak Syafu’ari, “Dulu waktu di bidang Litbang, semata-mata untuk menginformasikan data atau untuk penelitian. Tapi sekarang karena sudah ada di Bidang Sosbud, tentu akan dipakai untuk keperluan perencanaan pembangunan” (Wawancara pukul 10.00 pada 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

SIMDASKEL berbasis *website* berganti nama menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sejak Desember 2017. Sejak saat itu, Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* juga mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan (sumber: Data sekunder hasil penelitian tahun 2018) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa dan kelurahan. Monografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun sejak dibuat pada akhir 2015, dari yang bernama SIMDASKEL hingga Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*, *website* ini baru dilaunching dua tahun kemudian yakni di akhir 2017, tepatnya pada 22 Desember 2017. Acara *launching* tersebut tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 13. Kegiatan Launching dan Pengenalan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web di Kantor Bappelitbangda pada 22 Desember 2017
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018
(Dokumentasi Pribadi Bidang Sosbud Bappelitbangda Kota Pasuruan 2017)

Acara launching tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan kelurahan se-Kota Pasuruan. Seperti terlihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 14. Kegiatan Launching dan Pengenalan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web dihadiri oleh perwakilan seluruh kelurahan se-Kota Pasuruan

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018
(Dokumentasi Pribadi Bidang Sosbud Bappelitbangda Kota Pasuruan)

Setelah launching dan pengenalan pada 22 Desember 2017 tersebut, pihak kelurahan bisa menginput data mulai 18 Januari 2018. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Ratih selaku staf Bidang Sosial Budaya, “kelurahan sudah bisa *input* data mulai 18 Januari besok, nanti hitungannya satu semester. Jadi data boleh diinput secara berkala sampai satu semester. Satu semester itu 6 bulan, mulai Januari sampai Juni 2018” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan). Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratih, Kelurahan diberi waktu selama enam bulan untuk melengkapi data-data kelurahan mereka masing-masing di website Sistem Informasi Data Kelurahan.

Keberadaan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini diharapkan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan bisa membantu mereka dalam hal perencanaan pembangunan, membantu penyajian monografi kelurahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan membantu kelurahan dalam hal mengarsip data-data mengenai informasi seputar kelurahan mereka masing-masing.

Sistem Informasi Data Kelurahan dibuat berbasis *website* oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan. Pemilihan *website* sebagai basisnya dikarenakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengetahui seluruh isi dari informasi data yang disajikan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Emy Wirasati selaku Kepala Bidang Litbang.

“Sebenarnya kami ingin di setiap kelurahan itu ada semacam monitor berisi informasi yang bisa dibaca warga setiap saat pergi ke kelurahan, membutuhkan datanya, tanpa harus membuka-buka arsip dengan susah, karena masyarakat pasti maunya cepat. *Ah*, tapi pikir kami untuk penyediaan monitor di setiap kelurahan pasti susah direalisasikan, jadi kami pikir minimal ada *website* untuk bisa dibuka dengan mudah setiap

kali butuh data, kalau aplikasi kan masih harus *download; daftar; login; notifikasi;* dan sebagainya. Tapi ini masyarakat, juga kami Cuma butuh datanya saja. Jadi ya website adalah jawaban paling tepat.” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Ibu Ratih selaku staf Kepala Sub Bidang Sosial Budaya ketika peneliti bertanya mengapa mereka lebih memilih website, menurut Ibu Ratih alasannya adalah agar masyarakat dengan mudah tahu tentang data-data kelurahan di Kota Pasuruan.

“Tujuan dari monografi itu sendiri sebenarnya agar masyarakat tahu, nah kalo pake *website* kan bisa gampang, tinggal buka aja di *google* Sistem Informasi Data Kelurahan Kota Kelurahan, pencarian paling atas sudah pasti muncul *website*-nya. Ngerti sendiri kan sekarang apa-apa, orang tinggal cari di *google*. Kalo pake aplikasi *kan* susah mbak, buat apa juga masyarakat nyimpan aplikasi tentang monografi kelurahan. Kalo website kan bisa buka *suka-suka* pas lagi butuh data, langsung tersedia” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

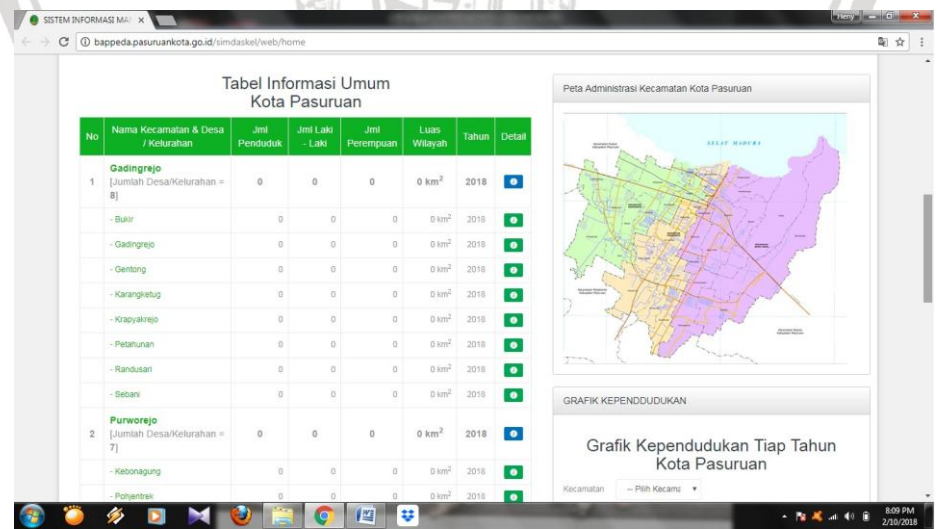
Berdasarkan kedua pendapat dari pegawai di Bappelitbangda Kota Pasuruan, dapat diketahui bahwa pemilihan website sebagai basis dari dipublikasikannya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* adalah agar memudahkan masyarakat dalam mengakses data-data tentang monografi kelurahan di Kota Pasuruan.

Tampilan dari *website* tersebut pada awalnya adalah seperti pada gambar berikut pada saat masih bernama SIMDASKEL.



Gambar 15. Tampilan Website Lama SIMDASKEL
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018
 (bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel/web/home)

Gambar di atas adalah tampilan *dashboard* atau halaman utama pada website lama, ada menu *dashboard*; data profil; informasi; dan monografi. Serta pada pojok kanan ada tab *login* untuk kelurahan. Pada *website* lama, *dashboard* berisi tabel informasi umum Kota Pasuruan seperti pada gambar berikut.



Gambar 16. Data Kependudukan Kelurahan di Kota Pasuruan
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018
 (bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel/web/home)



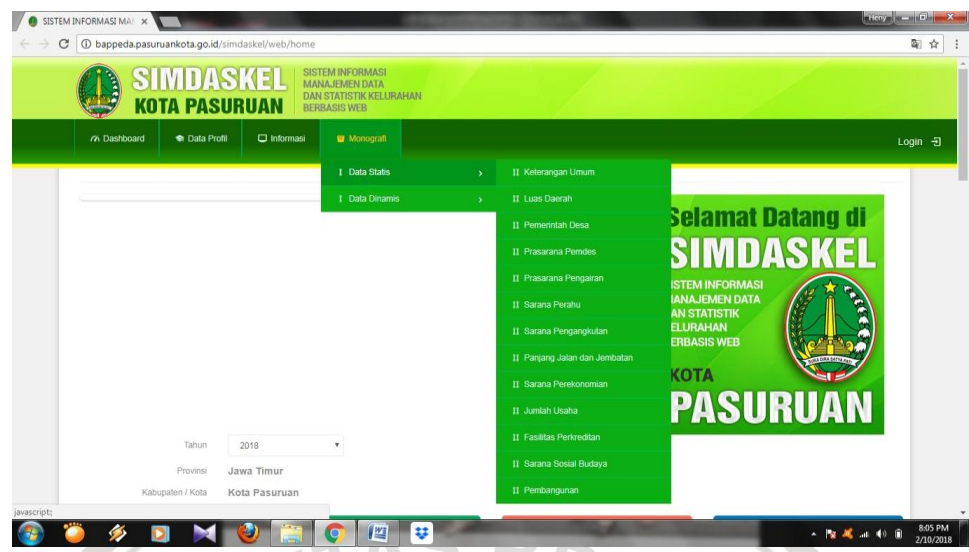
Tampilan website seperti dua gambar sebelumnya adalah tampilan website lama, sebelum dilaunching. Saat ini setelah dilaunching, dari yang awalnya Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) berubah menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* terdapat beberapa perubahan terkait informasi yang diusung. Sebab dulu, data yang akan diusung adalah terkait Data Profil, Informasi Event dan Lokasi, serta Monografi yang semuanya masih memiliki rincian informasi seperti pada beberapa gambar berikut ini.



Gambar 17. Menu Informasi Pada Website Lama (SIMDASKEL)
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018
 (bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel/web/home)

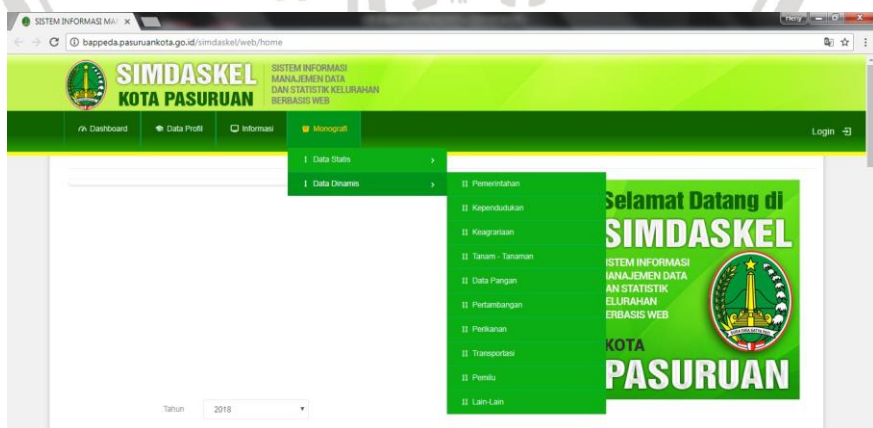
Di website lama dalam menu informasi, disajikan informasi mengenai informasi event dan informasi lokasi.





Gambar 18. Menu Monografi Data Statis Pada Website Lama (SIMDASKEL)
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018
 (bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel/web/home)

Pada website lama, di menu monografi data statis disajikan informasi seputar Keterangan Umum; Luas Daerah; Pemerintahan Desa; Prasarana Pemdes; Prasarana Pengaturan; Sarana Perahu; Sarana Pengangkutan; Panjang Jalan dan Jembatan; Sarana Perekonomian; Jumlah Usaha; Fasilitas Perkreditan; Sarana Sosial Budaya; dan Pembangunan



Gambar 19. Menu Monografi Data Dinamis Pada Website Lama (SIMDASKEL)
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018
 (bappeda.pasuruankota.go.id/simdaskel/web/home)



Pada website lama, di menu Monografi Data Dinamis terdapat informasi mengenai Pemerintahan; Kependudukan; Keagrarian; Tanam-Tanaman; Data Pangan; Pertambangan; Perikanan; Transportasi; Pemilu; dan lain-lain. Selain itu, pada website lama juga menampilkan Informasi Umum seluruh kelurahan di Kota Pasuruan, Peta Administrasi Kota Pasuruan, juga Grafik Kependudukan Kota Pasuruan di tiap-tiap kecamatannya. Namun sejak Desember 2017, berbarengan dengan launching sistem berbasis *web* ini, tampilan website berubah dan namanya pun berubah menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Perubahan nama, tampilan, sekaligus sedikit perubahan konten dalam website tersebut dikarenakan perubahan kepengurusan dan urusan. Mengingat dulu sistem ini dipegang oleh Bidang Litbang, dimana urusan data dan statistik menjadi urusan utama. Namun dikarenakan sekarang sistem ini dipegang oleh Bidang Sosial Budaya, maka urusan-urusan yang terkait dengan sistem ini juga disesuaikan dengan tupoksi Bidang Sosial Budaya. Namun tujuan utama tetap untuk menunjang layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan dan pencarian data untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

b. *Input* data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan

Input dalam penyajian fokus ini adalah tentang darimana data-data milik kelurahan tersebut berasal. Data yang dimaksud adalah data yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Kelurahan berasal dari data monografi kelurahan. Sebelum mendapatkan data yang utuh untuk dimasukkan ke dalam sistem yang berbasis *website* tersebut, kelurahan perlu menginput data-data

tersebut. Data-data diinput dari tiap-tiap RT/RW seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ainur Rofiq selaku Sekretaris Kelurahan Bukir.

“untuk data-data monografi itu kita dapat dari RW, jadi sebelumnya RW mendapat data itu dari RT. Tapi kami minta data itu ke RW, tiap bulannya jadi ada yang koordinir. Tiap orang di bagian Sie Pemerintahan memegang satu RW, walaupun kurang bisa satu orang pegang beberapa RW. Yang jelas data itu kami dapat satu bulan sekali. Terus datanya dilaporkan ke Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), karena capil juga perlu menerbitkan data kependudukan.” (Wawancara 21 Februari 2018, pukul 10.00 di Kantor Kelurahan Bukir).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Alan Prasetyo, selaku sekretaris Kelurahan Sebani.

“Datanya kami dapat dari RT sama RW mbak. RT sama RW kami wajibkan mengumpulkan perubahan data itu tiap bulan. Biasanya yang setor RW, kalau RT setor datanya ke RW. Dari kelurahan juga ada yang menagih data itu kok, bagian pemerintahan yang ambil data. *Insy Allah* selalu lancar.” (Wawancara 22 Februari 2018, pukul 09.00 di Kantor Kelurahan Sebani).

Selanjutnya Ibu Dian Wahyuning dari PPTK Kelurahan Gentong juga mengatakan bahwa data diinput dari RT dan RW.

“kalau kita kan ga mungkin sensus ya mbak, itu bukan tugas kami kalau sensus. Tapi kelurahan selalu dibantu RT/RW untuk dapat data yang cepat. Jadi data itu yang mengumpulkan adalah RT terus dikasih ke RW, RW ngasih ke kami. Tiap bulan ada laporannya itu. Saya rasa semua kelurahan di kota juga pakai cara ini, soalnya kami juga ditagih laporan data penduduk sama Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)” (Wawancara 22 Februari 2018, pukul 10.00 di Kantor Kelurahan Gentong)

Ibu Dian juga menambahkan, bahwa data yang menjadi bahan untuk diolah ke dalam website sudah ada, tinggal memasukkan saja. Berikut adalah gambar laporan data tahun 2017 yang siap diinput.



Gambar 20. Data Monografi tahun 2017 milik Kelurahan Gentong yang akan diinput ke dalam website Sistem Informasi Data Kelurahan
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Tahun 2018 (Buku Monografi Kelurahan Gentong 2017)

Data yang diinput dan berasal dari RT/RW adalah data umum kependudukan, misalnya jumlah penduduk, pekerjaan penduduk, pendidikan penduduk, dan jumlah penduduk miskin. Juga data-data apabila ada tindakan kriminal dan bencana alam, serta data-data kelembagaan yang ada di tiap-tiap RT/RW seperti PKK. Sebab data-data tersebut adalah data yang sering berubah. Untuk data-data lain yang berhubungan dengan personil kelurahan, kewenangan kelurahan, keuangan kelurahan, serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) milik kelurahan adalah murni didata sendiri oleh pihak kelurahan di bagian Register dalam Sie Pemerintahan.

c. *Process* mengolah data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan

Proses dari mengolah data ini adalah bagaimana kelurahan mengolah data-data monografi ke dalam sebuah sistem yang berbasis *website*. Kelurahan sebagai admin dari masing-masing data yang mereka masukkan ke dalam sistem, kelurahan bebas memasukkan dan merubah data yang mereka miliki dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan. Jadi tiap kelurahan bisa *login* ke Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* dengan *security system* berupa *username* dan *password* yang diberikan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan. Adapun waktu yang telah ditentukan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk kelurahan menginput dan mengolah datanya adalah 1 semester (6 bulan, Januari-Juni dan Juli-Desember).

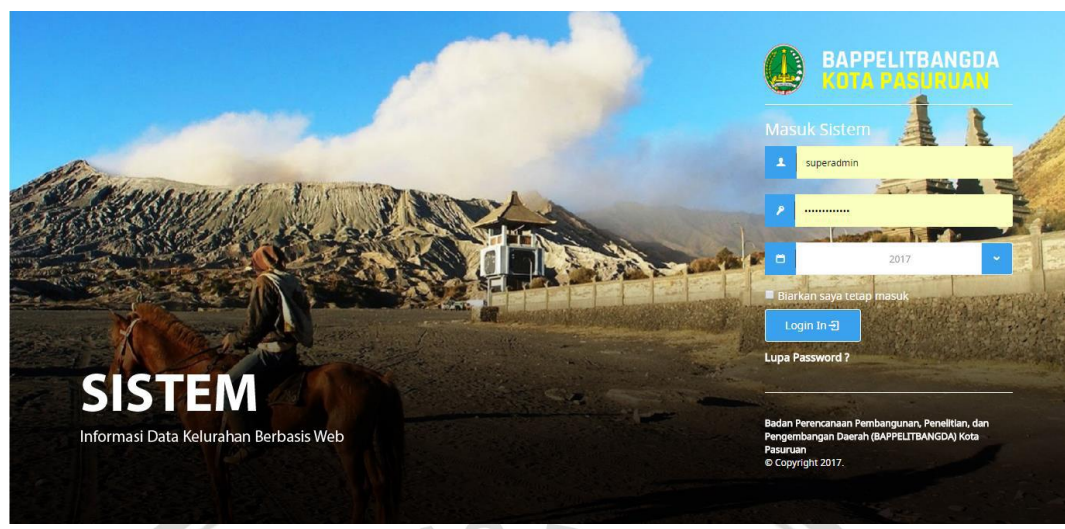
Berikut dijelaskan penjabaran operasional sistem terkait penggunaan sistem berdasarkan level *user admin system*.

(1) *Halaman Login*

Halaman login adalah halaman yang akan digunakan untuk masuk ke halaman admin sistem. Untuk melakukan *login* akan dibutuhkan *security system* berupa *username* dan *password*. Selain itu, akan dibutuhkan untuk melakukan pemilihan tahun, pemilihan tahun dimaksudkan untuk memilih data tahun berapakah yang akan diakses. Setelah kolom terisi dengan benar, klik tombol

Login In 

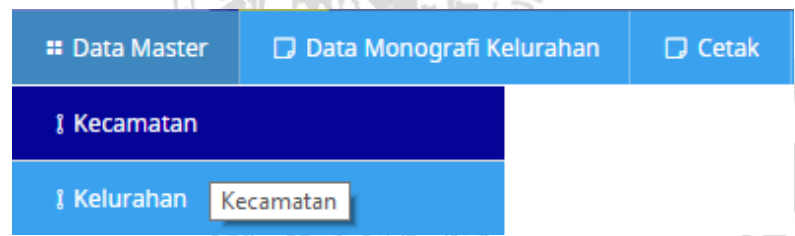
untuk masuk ke dalam sistem.



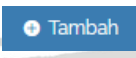



Gambar 21. Halaman Login Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (*Website Resmi Bappelitbangda Kota Pasuruan – Monografi Kelurahan*)

(2) *Data Master*

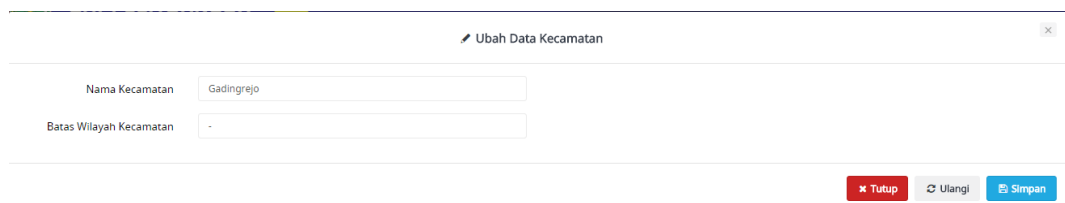
a) Kecamatan



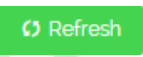

Gambar 22. Submenu Kecamatan dalam Menu Data Master
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (*Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web*)

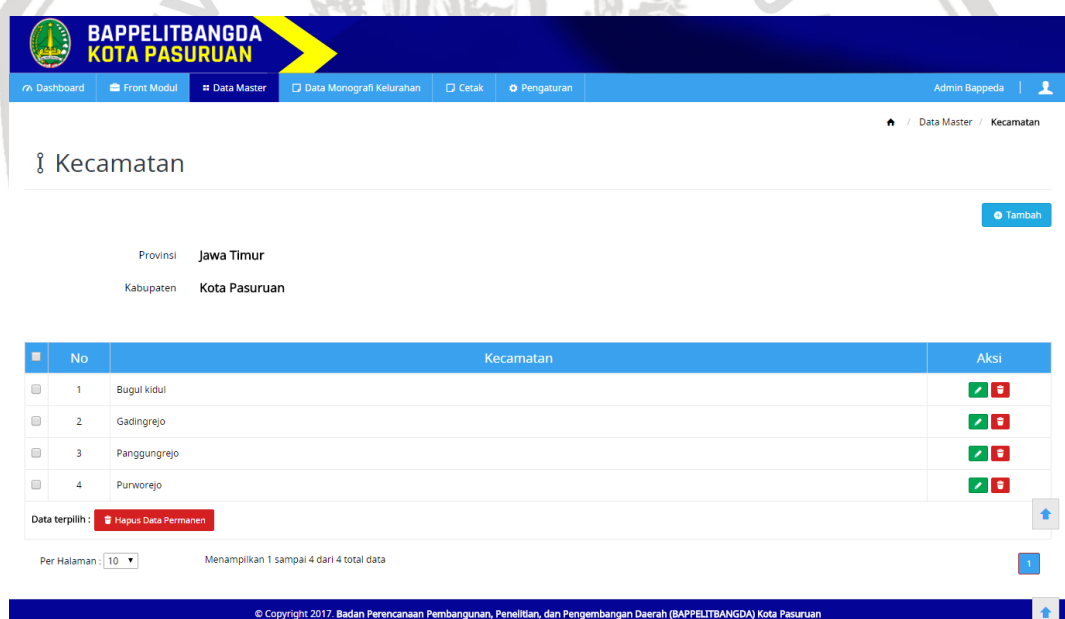
Untuk menambahkan data, klik tombol . Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Klik tombol  untuk mengosongkan kolom yang digunakan untuk mengisi data dan klik tombol  untuk menutup form tambah data.






Gambar 23. Pilihan untuk mengubah data Kecamatan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  Refresh untuk mereshfresh tampilan tabel data. Untuk mengubah data, klik tombol .

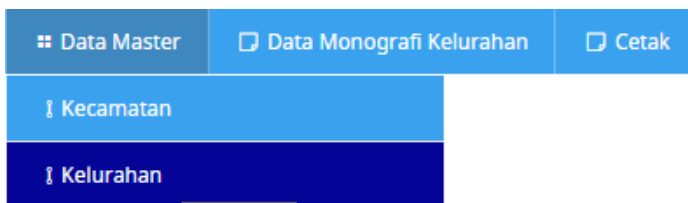


Gambar 24. Data Master: Kecamatan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)





Untuk menghapus data usulan yang diinginkan, klik tombol .

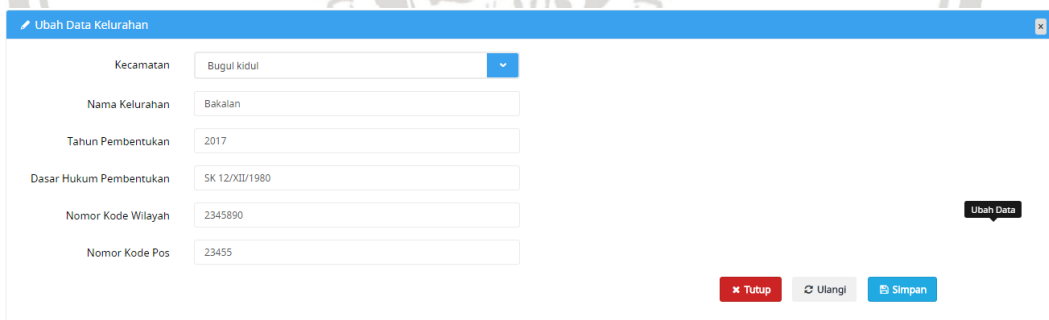


b) Kelurahan

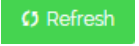




Gambar 25. Submenu Kelurahan dalam menu Data Master
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Untuk menambahkan data, klik tombol . Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Klik tombol  untuk mengosongkan kolom yang digunakan untuk mengisi data dan klik tombol  untuk menutup form tambah data.



Gambar 26. Pilihan Ubah Data Kelurahan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk mereshfresh tampilan tabel data. Tombol  digunakan untuk menampilkan detail data terkait. Untuk mengubah data, klik tombol .



repository.ub.ac.id

BAPPALITBANGDA
KOTA PASURUAN

Dashboard Front Modul Data Master Data Monografi Kelurahan Cetak Pengaturan Admin Bappeda

Data Master / Kelurahan

Kelurahan

Tambah

Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Kota Pasuruan
Kecamatan [Semua Kecamatan]

Refresh

No	Kelurahan	Aksi
Kecamatan : Bugul kidul		
1	Bakalan	[i] [edit] [delete]
2	Blandongan	[i] [edit] [delete]
3	Bugul Kidul	[i] [edit] [delete]
4	Kepel	[i] [edit] [delete]
5	Krampyangan	[i] [edit] [delete]
6	Tapaan	[i] [edit] [delete]
Kecamatan : Gadingrejo		
7	Bukir	[i] [edit] [delete]
8	Gadingrejo	[i] [edit] [delete]
9	Gentong	[i] [edit] [delete]
10	Karangketug	[i] [edit] [delete]

Data terpilih : Hapus Data Permanen

Per Halaman: 10 Menampilkan 1 sampai 10 dari 34 total data

1 2 3 4 >

© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPALITBANGDA) Kota Pasuruan

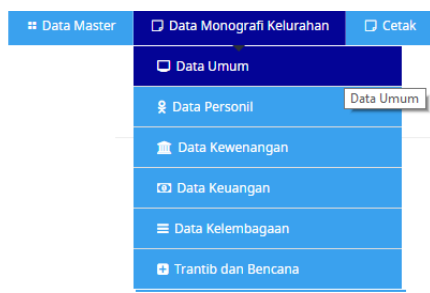
Gambar 27. Tampilan utama Data Master Kelurahan
Sumber: Dokumen Bappalitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web

Untuk menghapus data usulan yang diinginkan, klik tombol .

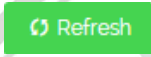
(3) Data Monografi Kelurahan

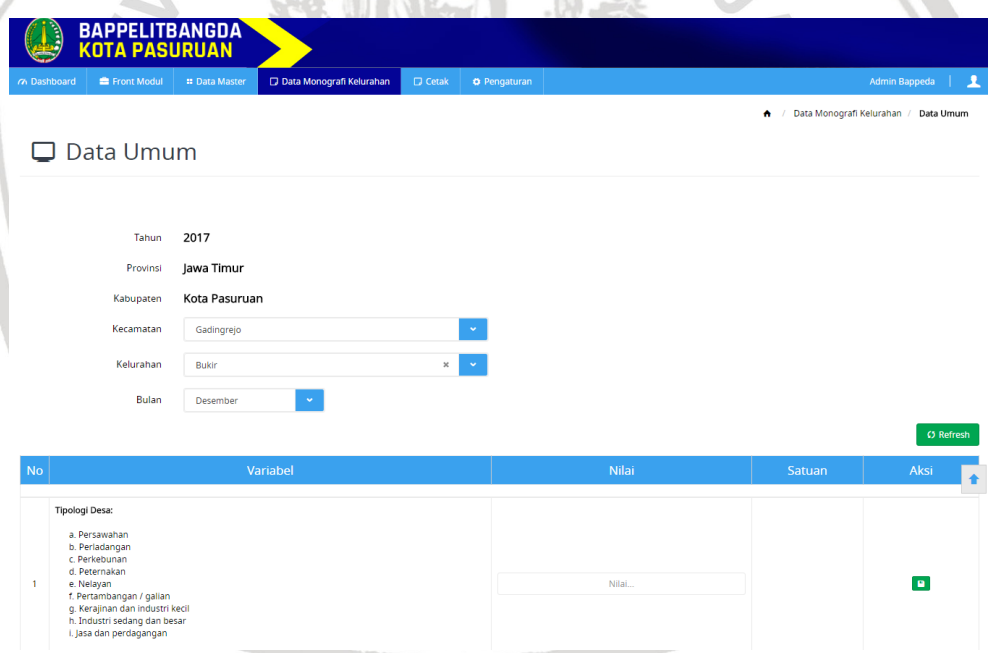
a) Data Umum

Untuk mengakses menu data umum, Pilih sub menu data umum pada menu data monografi kelurahan. Seperti pada gambar berikut ini.


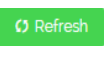


Gambar 28. Sub Menu Data Umum pada menu Data Monografi Kelurahan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol  Refresh.



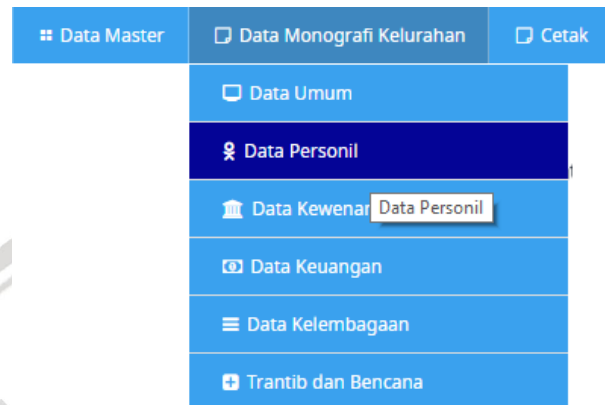
Gambar 29. Filter data pada sub menu Data Umum
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  Refresh untuk merefresh tampilan tabel data.



b) Data Personil

Untuk mengakses menu data personil, Pilih sub menu data personil pada menu data monografi kelurahan.





Gambar 30. Sub Menu Data Personil pada menu Data Monografi Kelurahan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol .

 A screenshot of the 'Data Personil' page in the web application. It shows a filter section with the following values: Tahun: 2017, Provinsi: Jawa Timur, Kabupaten: Kota Pasuruan, Kecamatan: Gadingrejo, Kelurahan: Bukir, and Bulan: Desember. Below the filter is a table with columns: No, Variabel, Nilai, Satuan, and Aksi. The table contains three rows of data for 'Kades' (a. Nama, b. Pendidikan Terakhir, c. Pelatihan yang pernah diikuti) with input fields for 'Nilai' and 'Aksi' buttons.

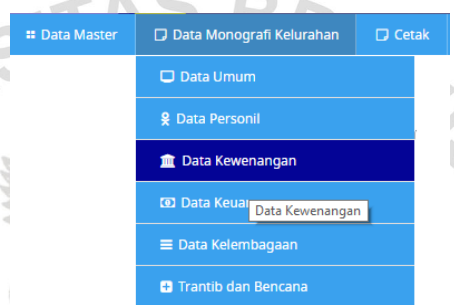
No	Variabel	Nilai	Satuan	Aksi
1	Kades a. Nama	<input type="text" value="Nilai..."/>		<input type="button" value="Aksi"/>
2	b. Pendidikan Terakhir	<input type="text" value="Nilai..."/>		<input type="button" value="Aksi"/>
3	c. Pelatihan yang pernah diikuti 1. Pelatihan 1	<input type="text" value="Nilai..."/>		<input type="button" value="Aksi"/>

Gambar 31. Filter data pada sub menu Data Personil
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk mereshfresh tampilan tabel data.

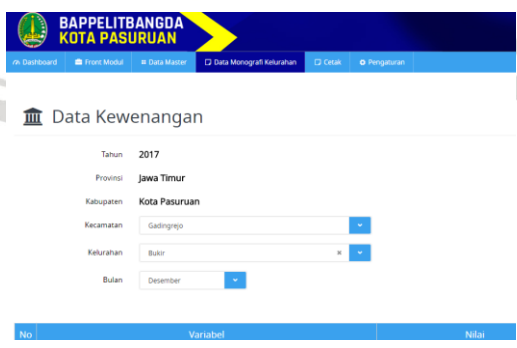
c) Data Kewenangan

Untuk mengakses menu data kewenangan, Pilih sub menu data kewenangan pada menu data monografi kelurahan.





Gambar 32. Sub Menu Data Kewenangan pada menu Data Monografi Kelurahan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol .



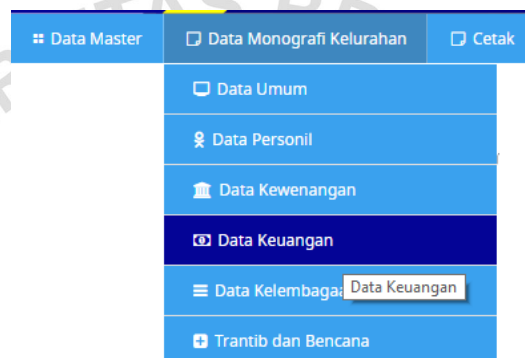
Gambar 33. Filter data pada sub menu Data Kewenangan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)



Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk mereshfresh tampilan tabel data.

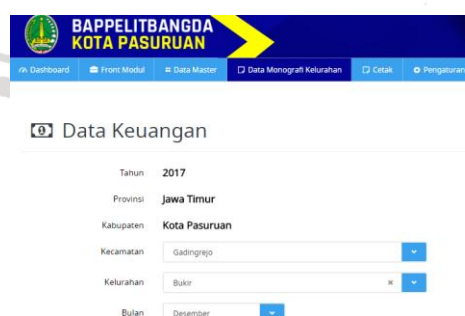
d) Data Keuangan

Untuk mengakses menu data keuangan, Pilih sub menu data keuangan pada menu data monografi kelurahan.





Gambar 34. Sub Menu Data Keuangan pada menu Data Monografi Kelurahan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol .

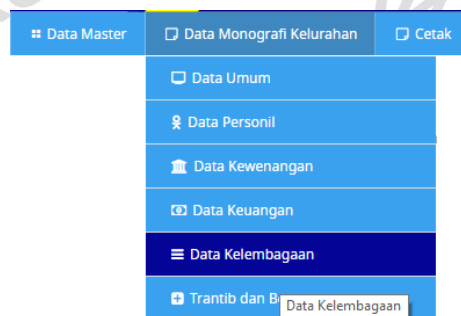


Gambar 35. Filter data pada sub menu Data Keuangan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Seperti pada gambar sebelumnya, isi kolom yang tersedia lalu klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk mereshfresh tampilan tabel data.

e) Data Kelembagaan

Untuk mengakses menu data kelembagaan, Pilih sub menu data kelembagaan pada menu data monografi kelurahan.





Gambar 36. Sub Menu Data Kelembagaan pada menu Data Monografi Kelurahan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol .

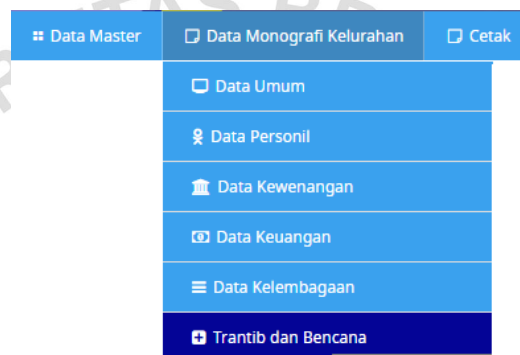


Gambar 37. Filter data pada sub menu Data Kelembagaan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk mereshfresh tampilan tabel data.

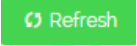
f) Data Tantrib dan Bencana

Untuk mengakses menu data trantib dan bencana, Pilih sub menu trantib dan bencana pada menu data monografi kelurahan.





Gambar 38. Sub Menu Data Tantrib dan Bencana pada menu Data Monografi Kelurahan

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika data belum tampil, tekan tombol .

Gambar 39. Filter data pada sub menu Data Tantrib dan Bencana

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

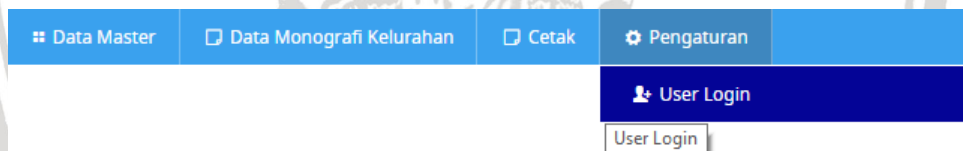
Isi kolom yang tersedia, klik  untuk melakukan menyimpan data. Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  untuk merefresh tampilan tabel data.

(4) Pengaturan



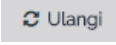

Menu pengaturan memungkinkan admin sistem untuk melakukan manajemen data seperti proses *insert*, *update* dan *delete* pada data *user login* dan *manajemen user*.

a) User Login

Untuk proses insert, Update, dan delete data Halaman user login, admin sistem bisa melakukannya dengan mengklik submenu User Login seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 40. Sub Menu User Login pada menu Pengaturan
Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Untuk menambahkan data user login, klik tombol  isi kolom dengan data yang diinginkan. Klik  untuk melakukan menyimpan data, klik tombol  untuk mengosongkan kolom yang digunakan untuk mengisi data dan klik tombol  untuk menutup form Tambah Data User Login. Dapat dilihat dalam gambar berikut ini.


Gambar 41. Ubah Data User pada Pengaturan
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol Refresh untuk mererefresh tampilan tabel data. Untuk mengubah data yang diinginkan, klik tombol . Tombol digunakan untuk menampilkan halaman detail data yang dipilih.


No	Username	Password	Keterangan	Nama	Status	Online	Aksi
1	kec_bugul_kidul	2b2a5c91e4548475689d1363227aa996	Admin Kecamatan	Admin Kec Bugulkidul	Aktif	.	
2	kec_gadingrejo	055018d6bb4a3c7e150325bcf3c07204	Admin Kecamatan	Admin Kec Gadingrejo	Aktif	.	
3	kec_panggungrejo	2e5abae0bb3c31e80f00b3372c1be917	Admin Kecamatan	Admin Kec Panggungrejo	Aktif	.	
4	kec_purworejo	1b77e652eeb1e1c7740635a4d122eefc	Admin Kecamatan	Admin Kec Purworejo	Aktif	.	

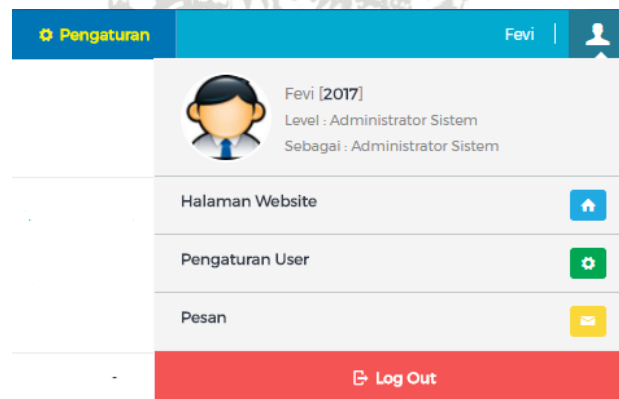
Gambar 42. Tampilan User untuk admin
 Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)



Tanda **Aktif** berarti id tersebut dapat login ke dalam sistem sesuai dengan level user-nya. Jika id yg bersangkutan tidak dapat mengakses sistem, maka klik tanda tersebut agar berubah menjadi **Tidak Aktif**. Lingkaran hijau pada kolom online, menandakan bahwa id tersebut sedang mengakses sistem pada waktu yang bersamaan dengan admin sistem. Untuk menghapus data user login yang diinginkan, klik tombol .


b) Manajemen User

Untuk melakukan manajemen pengaturan user sesuai level user, pilih pengaturan user yang berada di pojok kanan atas sistem. Klik  untuk melakukan manajemen pengaturan user.



Gambar 43. Manajemen Pengaturan User

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

Ubah data Profil lalu klik  untuk melakukan penyimpanan.

Seperti pada gambar berikut ini.

**BAPPELITBANGDA
KOTA PASURUAN**

Dashboard Front Modul Data Master Data Monografi Kelurahan Cetak Pengaturan Admin Bappeda

Profil

Username

Password

Ulangi Password

Level Administrator

Keterangan -

Nama

Status **Aktif**

Akses Sistem Can only access default Configuration System

Konfirmasi Password Sekarang

Captcha

✓ Simpan Pengaturan User

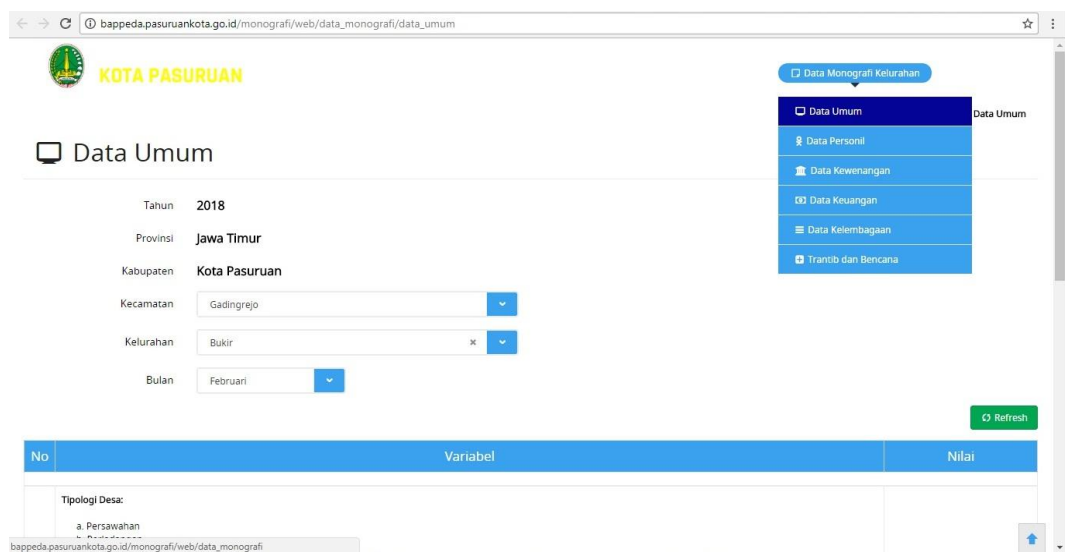
© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Pasuruan

Gambar 44. Pengaturan Profil User

Sumber: Dokumen Bappelitbangda Kota Pasuruan Hasil Penelitian 2018 (Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web)

d. *Output* dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah layanan informasi kelurahan berbasis *website*

Output adalah keluaran dari sebuah masukan yang telah diproses. Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Kelurahan melalui RT/RW-nya sebagai masukan dalam sistem ini, kemudian diproses dengan memasukkan dan mengolah data dalam sistem yang berbasis *website*, yang terakhir berikut ini adalah hasil dari segala macam data yang telah diproses. Yakni sebuah tampilan baru Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang berisi banyak menu dan submenu tentang data monografi kelurahan di Kota Pasuruan.



Gambar 45. Tampilan Baru Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Pada website yang baru ini, menu utama adalah Data Monografi Kelurahan yang berada pada pojok kanan atas. Data Monografi Kelurahan meliputi Data Umum; Data Personil; Data Kewenangan; Data Keuangan; Data Kelembagaan; serta Tantrid dan Bencana. Berikut ini akan peneliti ulas untuk tiap-tiap submenu-nya:

1) Data Umum

Data umum berisi informasi-informasi umum atau dasar untuk tiap-tiap kelurahan. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar berikut ini.

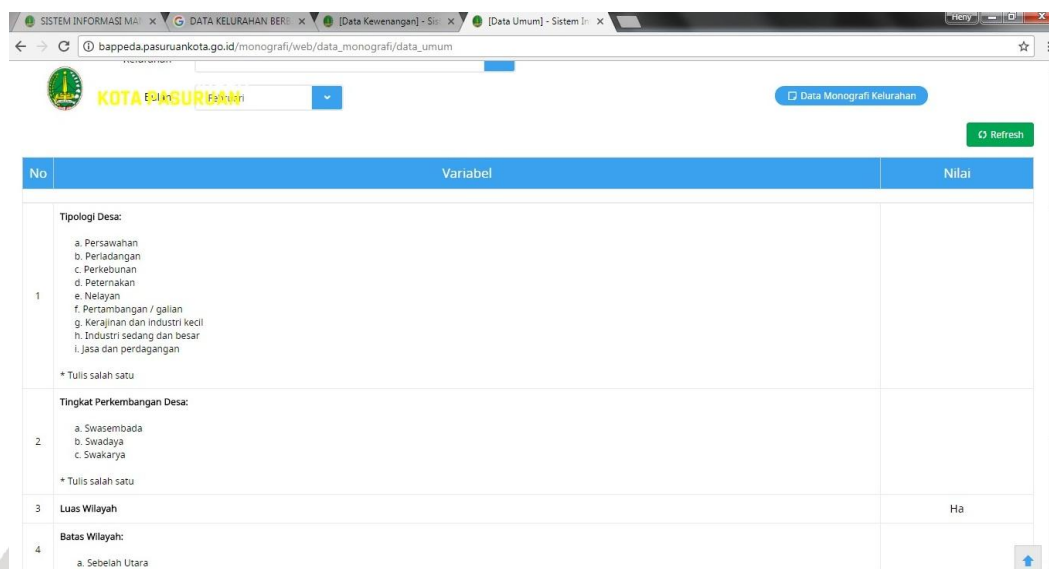


Gambar 46. Pilihan Filter informasi kelurahan yang disajikan dalam Data Umum
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih filter informasi yang ingin ditampilkan, informasi dalam Data Umum meliputi:

- a. Tipologi Desa;
- b. Tipologi Perkembangan Desa;
- c. Luas Wilayah; Batas Wilayah;
- d. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan)
- e. Pekerjaan/Mata pencaharian warga
- f. Tingkat pendidikan masyarakat
- g. Jumlah Penduduk Miskin
- h. UMR Kabupaten/Kota
- i. Sarana Prasarana Kantor Desa, Prasarana Kesehatan, Prasarana Pendidikan, Prasarana Ibadah, Prasarana Umum.

Berikut tampilan isi dari informasi yang akan disajikan dalam Data Umum.



No	Variabel	Nilai
1	<p>Tipologi Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persawahan b. Perladangan c. Perkebunan d. Peternakan e. Nelayan f. Pertambangan / galian g. Kerajinan dan industri kecil h. Industri sedang dan besar i. Jasa dan perdagangan <p>* Tulis salah satu</p>	
2	<p>Tingkat Perkembangan Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Swasembada b. Swadaya c. Swakarya <p>* Tulis salah satu</p>	
3	Luas Wilayah	Ha
4	<p>Batas Wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara 	

Gambar 47. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Umum
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari gambar di atas, variabel pertama adalah Tipologi Desa yang menyajikan informasi tentang persawahan; perladangan; perkebunan; peternakan; nelayan; pertambangan; kerajinan dan industri kecil; industri sedang dan besar; jasa dan perdagangan. Variabel yang kedua adalah Tingkat Perkembangan Desa yang meliputi Desa Swasembada; Swadaya; dan Swakarya. Untuk variabel ketiga dan keempat ada dalam gambar berikut ini.

No	Variabel	Nilai
2	Tingkat Perkembangan Desa: a. Swasembada b. Swadaya c. Swakarya	
3	Luas Wilayah	Ha
4	Batas Wilayah: a. Sebelah Utara	
5	b. Sebelah Selatan	
6	c. Sebelah Barat	
7	d. Sebelah Timur	
8	Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan): a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	Km
9	b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	Km
10	c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten	Km

Gambar 48. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Umum Page 1
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari gambar di atas, variabel yang ketiga adalah Luas Wilayah. Variabel yang keempat adalah Batas Wilayah, dimana batas terdiri dari sebelah utara; sebelah selatan; sebelah barat; sebelah timur. Variabel yang keempat adalah Orbitrasi (jarak dari Pusat Pemerintahan) yang berisi informasi jarak dari pusat pemerintahan kecamatan; jarak dari pusat pemerintahan kota; dan jarak dari kota/ibukota Kabupaten.

No	Variabel	Nilai
21	e. Usia 65 ke-atas	Jiwa
22	Pekerjaan/Mata Pencaharian: a. Karyawan 1. Pegawai Negeri Sipil	Orang
23	2. TND/Point	Orang
24	3. Swasta	Orang
25	b. Wiraswasta/pedagang	Orang
26	c. Petani	Orang
27	d. Tukang	Orang
28	e. Buruh Tani	Orang
29	f. Pensiunan	Orang
30	g. Nelayan	Orang

Gambar 49. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Umum Page 3
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

No	Variabel	Nilai
31	h. Peternak	Orang
32	i. Jasa	Orang
33	j. Pengrajin	Orang
34	k. Pekerja seni	Orang
35	l. Lainnya	Orang
36	m. Tidak bekerja/penganggur	Orang
Tingkat Pendidikan Masyarakat		
37	a. Lulusan pendidikan umum :	Orang
38	1. Taman Kanak-kanak	Orang
39	2. Sekolah Dasar/ sederajat	Orang
40	3. SMP	Orang
	4. SMA/SMU	Orang

Gambar 50. Variabel Informasi yang disajikan dalam menu Data Umum Page 4
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

No	Variabel	Nilai
41	5. Akademi/D1-D3	Orang
42	6. Sarjana	Orang
43	7. Pascasarjana S2	Orang
44	8. Pascasarjana S3	Orang
45	b. Lulusan pendidikan khusus :	Orang
46	1. Pondok Pesantren	Orang
47	2. Pendidikan Keagamaan	Orang
48	3. Sekolah Luar Biasa	Orang
49	4. Kursus Keterampilan	Orang
49	c. Tidak lulus dan tidak sekolah :	Orang
50	1. Tidak lulus	Orang
	2. Tidak bersekolah	Orang

Gambar 51. Variabel Informasi yang disajikan dalam menu Data Umum Page 5
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Pada ketiga gambar sebelumnya (Gambar 49,50, dan 51) adalah variabel kelima dan keenam dari Data Umum yaitu Pekerjaan/Mata Pencarian Warga dan Pendidikan Terakhir Warga. Pekerjaan/Mata Pencarian Warga terdiri dari sub

variabel diantaranya, karyawan (PNS, TNI/POLRI, swasta); Wiraswasta/pedagang; Petani; Tukang; Buruh Tani; Pensiunan; Nelayan; Peternak; Jasa; Pengajian; Pekerjaan seni; Tidak Bekerja; Lainnya. Sub variabel Pendidikan Terakhir Warga terdiri dari Lulusan pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA, Akademi/D1-D3, Sarjana, Pascasarjana S2, Pascasarjana S3); Lulusan pendidikan khusus (Pondok Pesantren, Pendidikan Keagamaan, Sekolah Luar Biasa, Kursus Keterampilan); Tidak lulus dan tidak bersekolah.

No.	Variabel	Nilai Login
51	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Jiwa
52	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	KK
53	U M R Kabupaten/Kota	
Sarana Prasarana		
a. Kantor Desa:		
54	1. Sewa 2. Semi permanen 3. Permanen *Tulis salah satu	
b. Prasarana Kesehatan		
55	1. Puskesmas: - Ada - Tidak * Tulis salah satu	
56	2. Poskesdes	Buah
57	3. UKBM (Posyandu, Polindes)	Buah
c. Prasarana Pendidikan		
58	1. Perpustakaan Desa	Buah

Gambar 52. Variabel Informasi yang disajikan dalam menu Data Umum Page 6
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELTBANGDA) Kota Pasuruan

No	Variabel	Nilai
61	4. Gedung Sekolah SD	Buah
62	5. Gedung Sekolah SMP	Buah
63	6. Gedung Sekolah SMA	Buah
64	7. Gedung Perguruan Tinggi	Buah
d. Prasarana Ibadah		
65	1. Mesjid	Buah
66	2. Mushola	Buah
67	3. Gereja	Buah
68	4. Pura	Buah
69	5. Vihara	Buah
70	6. Klenteng	Buah

Gambar 53. Variabel Informasi yang disajikan dalam menu Data Umum Page 7
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELTBANGDA) Kota Pasuruan

No	Variabel	Nilai
e. Prasarana Umum		
71	1. Olahraga	Buah
72	2. Kesenian/budaya	Buah
73	3. Balai pertemuan	Buah
74	4. Sumur desa	Buah
75	5. Pasar desa	Buah
76	6. Lainnya	Buah

Gambar 54. Variabel Informasi yang disajikan dalam menu Data Umum Page 8
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Pada ketiga gambar sebelumnya (gambar 52, 53, dan 54) adalah variabel ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Variabel ketujuh adalah Jumlah Penduduk Miskin. Variabel kedelapan adalah UMR Kabupaten/Kota dan variabel kesembilan adalah

Sarana dan Prasarana. Untuk variabel sarana dan prasarana terdiri dari beberapa sub variabel diantaranya, Kantor Desa; Prasarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmasdes, UKBM, Posyandu, Polindes); Prasarana Pendidikan (Perpustakaan Desa, Gedung sekolah TK, Gedung sekolah PAUD, Gedung SD, Gedung SMP, Gedung SMA, Gedung Perguruan Tinggi); Prasarana Ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, klenteng); Prasarana Umum (olahraga, kesenian/budaya, balai pertemuan, sumur desa, pasar desa, lainnya).

2) Data Personil

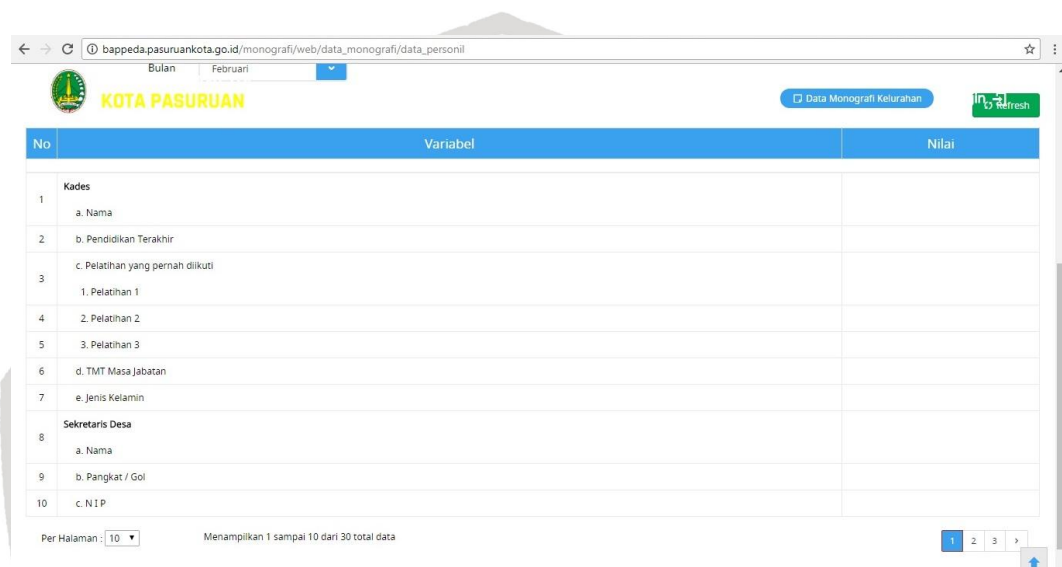
Menu Data Personil berisi informasi tentang seluruh personil yang bekerja di sebuah kelurahan. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows a web browser window with the URL `bappeda.pasuruankota.go.id/monografi/web/data_monografi/data_personil`. The page header includes the logo of Kota Pasuruan and navigation links for 'Data Monografi Kelurahan' and 'Data Personil'. The main content area is titled 'Data Personil' and features a filter form with the following fields:

- Tahun: 2018
- Provinsi: Jawa Timur
- Kabupaten: Kota Pasuruan
- Kecamatan: Gadingrejo
- Kelurahan: Bukir
- Bulan: Februari

Gambar 55. Filter Informasi Pada Menu Data Personil
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih kecamatan dan kelurahan, variabel informasi yang disajikan adalah personil kelurahan seperti Lurah/Kades; Sekretaris Desa; dan lain-lain. Berisi profil dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh personil. Berikut tampilan informasi yang bisa disajikan.



The screenshot shows a web browser window with the URL `bappeda.pasuruankota.go.id/monografi/web/data_monografi/data_personil`. The page header includes the logo of Kota Pasuruan and a 'Data Monografi Kelurahan' button. The main content is a table with the following structure:

No	Variabel	Nilai
Kades		
1	a. Nama	
2	b. Pendidikan Terakhir	
c. Pelatihan yang pernah diikuti		
3	1. Pelatihan 1	
4	2. Pelatihan 2	
5	3. Pelatihan 3	
6	d. TMT Masa Jabatan	
7	e. Jenis Kelamin	
Sekretaris Desa		
8	a. Nama	
9	b. Pangkat / Gol	
10	c. NIP	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Per Halaman : 10' and 'Menampilkan 1 sampai 10 dari 30 total data'.

Gambar 56. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Personil Page 1
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Informasi ini tidak hanya untuk Lurah dan Sekretaris saja, tapi juga seluruh personil di kelurahan. Halaman-halaman berikutnya pada pojok kanan bawah akan mengantarkan pengunjung pada informasi yang lebih lengkap lagi.

© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELTBANGDA) Kota Pasuruan

No	Variabel	Nilai
11	d. Pendidikan Terakhir	
12	e. Pelatihan yang pernah diikuti	
13	1. Pelatihan 1	
14	2. Pelatihan 2	
15	3. Pelatihan 3	
16	f. TMT Masa Jabatan	
17	g. Jenis Kelamin	
18	Perangkat Desa	
19	a. Nama	
20	b. Pendidikan Terakhir	
21	c. Pelatihan yang pernah diikuti	
22	1. Pelatihan 1	
23	2. Pelatihan 2	

Per Halaman : 10 Menampilkan 11 sampai 20 dari 30 total data

Gambar 57. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Personil Page 2
Sumber: Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan

© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELTBANGDA) Kota Pasuruan

No	Variabel	Nilai
24	3. Pelatihan 3	
25	d. TMT Masa Jabatan	
26	e. Jenis Kelamin	
27	BPD	
28	a. Nama	
29	b. Pendidikan Terakhir	
30	c. Pelatihan yang pernah diikuti	
31	1. Pelatihan 1	
32	2. Pelatihan 2	
33	3. Pelatihan 3	
34	d. TMT Masa Jabatan	
35	e. Jenis Kelamin	

Per Halaman : 10 Menampilkan 21 sampai 30 dari 30 total data

Gambar 58. Variabel Informasi yang disajikan dalam Menu Data Personil Page 3
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari kedua gambar di atas terlihat halaman selanjutnya pada menu ini adalah informasi tentang personil lain yakni perangkat desa dan BPD. Isi informasi yang disajikan tiap personil adalah sama.

3) Data Kewenangan

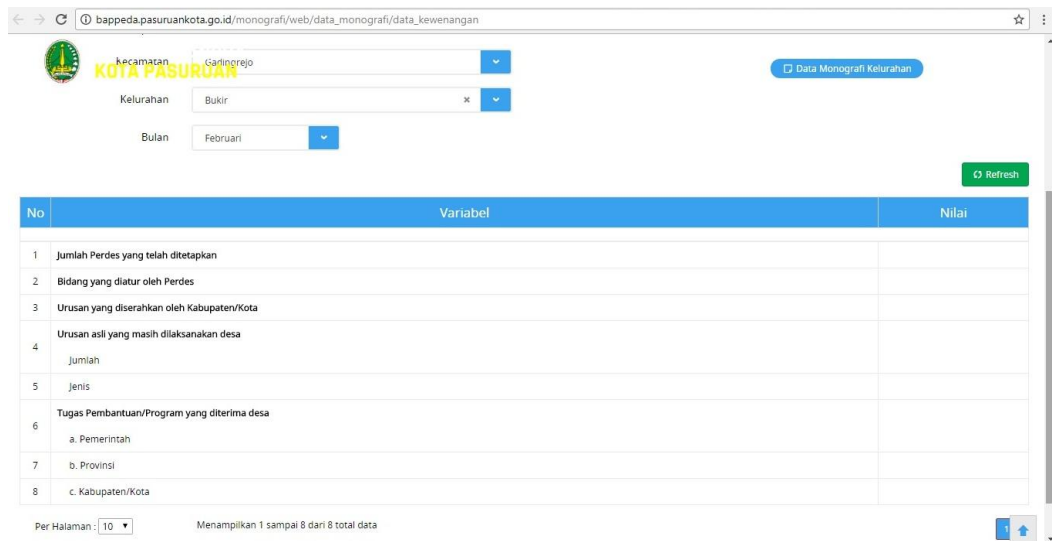
Data kewenangan berisi urusan-urusan yang dikerjakan oleh kelurahan. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows a web browser window with the URL `bappeda.pasuruankota.go.id/monografi/web/data_monografi/data_kewenangan`. The page header features the logo of Kota Pasuruan and a navigation menu with 'Data Monografi Kelurahan' and 'Data Kewenangan'. The main content area is titled 'Data Kewenangan' and contains a filter form with the following fields:

- Tahun: 2018
- Provinsi: Jawa Timur
- Kabupaten: Kota Pasuruan
- Kecamatan: Gadingrejo
- Kelurahan: Bukir
- Bulan: Februari

Gambar 59. Filter Informasi pada Menu Data Kewenangan
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih filter informasi yang ingin ditampilkan, informasi dalam Data Kewenangan meliputi Jumlah Perdes yang telah ditetapkan; Bidang yang diatur oleh Perdes; Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota; Urusan asli yang masih dilaksanakan dana; Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa. Berikut adalah tampilannya.

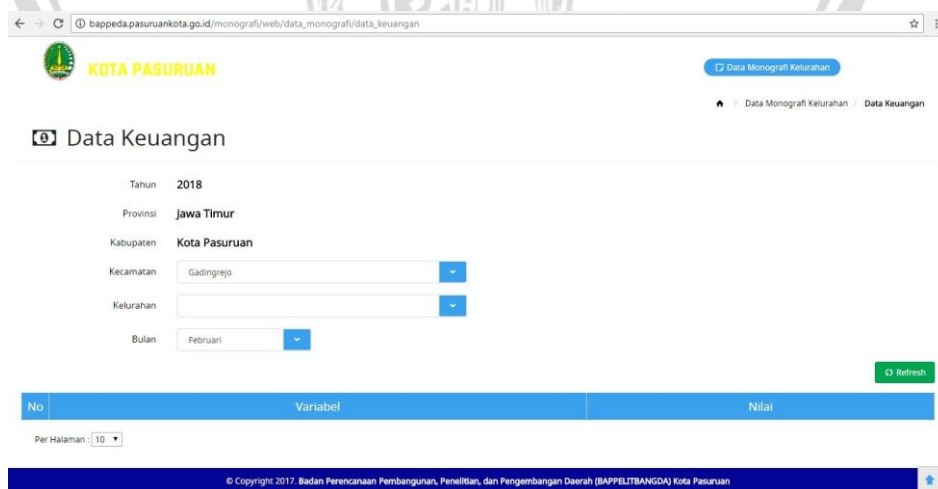


No	Variabel	Nilai
1	Jumlah Perdes yang telah ditetapkan	
2	Bidang yang diatur oleh Perdes	
3	Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota	
4	Urusan asli yang masih dilaksanakan desa	
5	Jumlah	
6	Jenis	
7	Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa	
8	a. Pemerintah	
9	b. Provinsi	
10	c. Kabupaten/Kota	

Gambar 60. Variabel Informasi dalam Menu Data Kewenangan
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

4) Data Keuangan

Menu Data Keuangan berisi tentang data masuk dan keluarnya keuangan di tiap-tiap kelurahan. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar berikut ini.



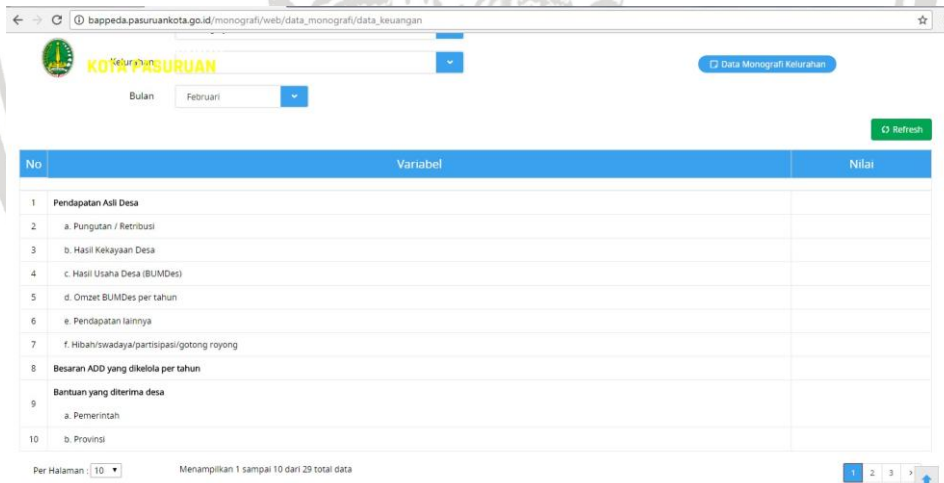
No	Variabel	Nilai
1	Jumlah Perdes yang telah ditetapkan	
2	Bidang yang diatur oleh Perdes	
3	Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota	
4	Urusan asli yang masih dilaksanakan desa	
5	Jumlah	
6	Jenis	
7	Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa	
8	a. Pemerintah	
9	b. Provinsi	
10	c. Kabupaten/Kota	

Gambar 61. Filter Informasi pada Menu Data Keuangan
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih filter informasi kecamatan dan kelurahan, informasi dalam menu Data Keuangan meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Besaran ADD yang dikelola per tahun
- c. Bantuan yang diterima desa
- d. Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat
- e. Bekerja Desa
- f. SILPA/sikpa
- g. Dana Cadangan
- h. Penghasilan dan Tunjangan

Berikut adalah gambar tampilan dari variabel menu Data Keuangan.



No	Variabel	Nilai
1	Pendapatan Asli Desa	
2	a. Pungutan / Retribusi	
3	b. Hasil Kekayaan Desa	
4	c. Hasil Usaha Desa (BUMDes)	
5	d. Omzet BUMDes per tahun	
6	e. Pendapatan lainnya	
7	f. Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong	
8	Besaran ADD yang dikelola per tahun	
9	Bantuan yang diterima desa	
	a. Pemerintah	
10	b. Provinsi	

Gambar 62. Variabel Informasi dalam Menu Data Keuangan Page 1
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Pada gambar di atas adalah variabel pertama, kedua, dan ketiga dari Data Keuangan. Variabel pertama adalah Pendapatan Asli Desa yang berasal atau

terdiri dari pungutan/retribusi; hasil kekayaan desa; hasil usaha desa (BUMDes); omset BUMDes per tahun; pendapatan lainnya; hibah. Variabel kedua adalah Besaran ADD yang dikelola per tahun, dan variabel yang ketiga adalah bantuan yang diterima desa yang terdiri dari bantuan dari pemerintah, provinsi, dan kota. Berikutnya adalah variabel lain dari Data Keuangan.

No	Variabel	Nilai
11	c. Kabupaten/Kota	
12	Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat	
13	Belanja Desa	
14	SILPA / SIMPA	
15	Dana Cadangan	
Penghasilan dan Tunjangan		
16	a. Kades	
	- Penghasilan Tetap	
17	- Sumber Penghasilan Tetap	
18	- Tunjangan	
19	- Sumber Tunjangan	
20	b. Sekdes	
	- Penghasilan Tetap	

Gambar 63. Variabel Informasi dalam Menu Data Keuangan Page 2
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

No	Variabel	Nilai
21	- Sumber Penghasilan Tetap	
22	- Tunjangan	
23	- Sumber Tunjangan	
24	c. Perangkat Desa	
	- Penghasilan Tetap	
25	- Sumber Penghasilan Tetap	
26	- Tunjangan	
27	- Sumber Tunjangan	
28	d. BPD	
	- Tunjangan	
29	- Sumber Tunjangan	

Gambar 64. Variabel Informasi dalam Menu Data Keuangan Page 3
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Pada kedua gambar sebelumnya (gambar 63 dan 64) adalah variabel keempat sampai kedelapan dari Data Keuangan. Variabel keempat adalah sumbangan/bantuan lain tidak mengikat, kemudian variabel kelima adalah belanja desa, keenam adalah SILPA/SIKPA, ketujuh adalah dana cadangan. Variabel yang kedelapan adalah Penghasilan dan Tunjangan, yang terdiri dari penghasilan dari tunjangan kades, sekdes, perangkat desa, dan BPD.

5) Data Kelembagaan

Data Kelembagaan berisi tentang lembaga-lembaga yang dimiliki suatu kelurahan. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows a web browser window with the URL `bappeda.pasuruankota.go.id/monografi/web/data_monografi/data_kelembagaan`. The page header includes the logo of Kota Pasuruan and navigation links for 'Data Monografi Kelurahan' and 'Data Kelembagaan'. The main content area is titled 'Data Kelembagaan' and features a filter form with the following fields:

- Tahun: 2018
- Provinsi: Jawa Timur
- Kabupaten: Kota Pasuruan
- Kecamatan: Gadingrejo
- Kelurahan: (empty)
- Bulan: Februari

A green 'Refresh' button is located to the right of the filter form. Below the filter form is a table with the following header:

No	Variabel	Nilai
----	----------	-------

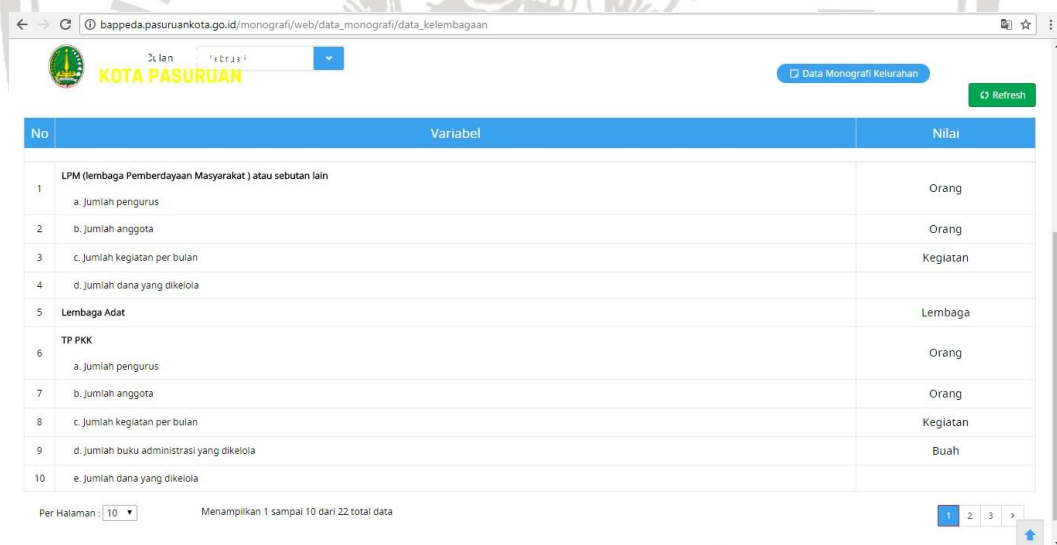
The footer of the page contains the text: © Copyright 2017 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPELITBANGDA) Kota Pasuruan.

Gambar 65. Filter Informasi pada Menu Data Kelembagaan
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih filter informasi kecamatan dan kelurahan, informasi dalam menu Data Kelembagaan meliputi:

- a. LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebuah lain
- b. Lembaga Adat
- c. TP PKK
- d. BUMDes
- e. Karang Taruna
- f. RT/RW
- g. Lembaga kemsyarakatan lainnya

Berikut adalah gambar tampilan dari isi variabel Data Kelembagaan.

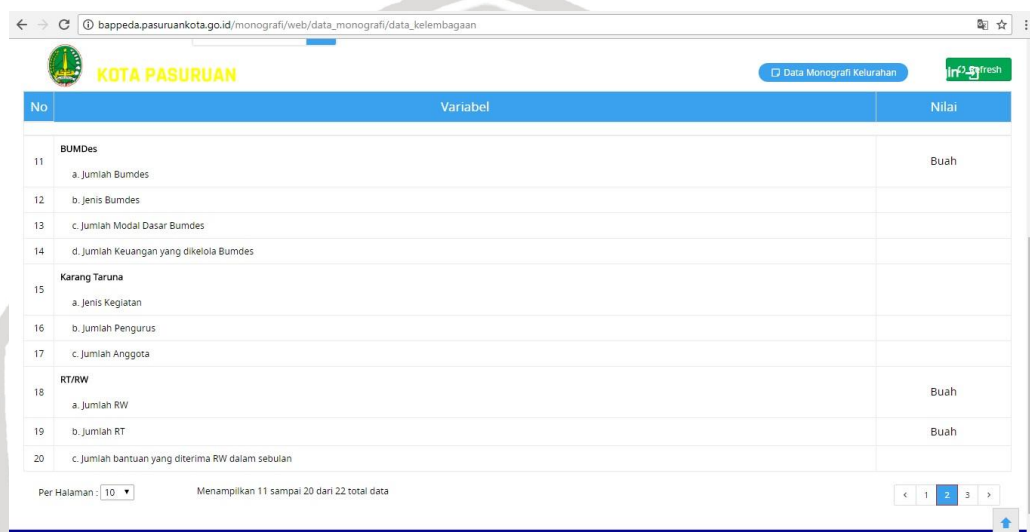


No	Variabel	Nilai
1	LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain	Orang
	a. Jumlah pengurus	Orang
2	b. Jumlah anggota	Kegiatan
3	c. Jumlah kegiatan per bulan	Lembaga
4	d. Jumlah dana yang dikelola	Lembaga
5	Lembaga Adat	Lembaga
6	TP PKK	Orang
	a. Jumlah pengurus	Orang
7	b. Jumlah anggota	Kegiatan
8	c. Jumlah kegiatan per bulan	Buah
9	d. Jumlah buku administrasi yang dikelola	Buah
10	e. Jumlah dana yang dikelola	

Gambar 66. Variabel Informasi dalam Menu Data Kelembagaan Page 1
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Berdasarkan gambar di atas, variabel LPM memiliki sub variabel yang menjelaskan informasi dari LPM meliputi jumlah pengurus; jumlah anggota; jumlah kegiatan per bulan; dan jumlah dana yang dikelola. Variabel yang kedua

adalah lembaga adat, dan variabel yang ketiga adalah TP PKK yang sub variabelnya berisi tentang jumlah pengurus; jumlah anggota; jumlah kegiatan per bulan; jumlah buku administrasi yang dikelola; dan jumlah dana yang dikelola. Berikutnya adalah variabel-variabel lain dalam Data Kelembagaan.



No	Variabel	Nilai
BUMDes		
11	a. Jumlah Bumdes	Buah
12	b. Jenis Bumdes	
13	c. Jumlah Modal Dasar Bumdes	
14	d. Jumlah Keuangan yang dikelola Bumdes	
Karang Taruna		
15	a. Jenis Kegiatan	
16	b. Jumlah Pengurus	
17	c. Jumlah Anggota	
RT/RW		
18	a. Jumlah RW	Buah
19	b. Jumlah RT	Buah
20	c. Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan	

Gambar 67. Variabel Informasi dalam Menu Data Kelembagaan Page 2
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari gambar di atas, dapat dilihat variabel keempat dari Data Kelembagaan adalah BUMDes yang berisi informasi mengenai jumlah BUMDes; jenis BUMDes; jumlah modal Dasar BUMDes; dan Jumlah keuangan yang dikelola BUMDes. Variabel yang kelima adalah Karang Taruna berisi informasi jenis kegiatan; jumlah pengurus; dan jumlah anggota. Variabel yang keenam adalah RT/RW berisi informasi jumlah RW; jumlah RT; jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan; jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan. Variabel yang terakhir adalah lembaga kemasyarakatan lainnya.

6) Data Trantib dan Bencana

Data trantib dan bencana berisi tentang informasi seputar usaha penjagaan ketentraman dan ketertiban di kelurahan serta bencana-bencana yang terjadi di kelurahan tersebut. Pengunjung bisa memilih kecamatan dan kelurahan apa yang akan dilihat, kemudian memilih bulan dari informasi yang akan disajikan seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows a web browser window with the URL `bappeda.pasuruantkota.go.id/monografi/web/data_monografi/trantib_bencana`. The page title is 'KOTA PASURUAN' and the breadcrumb is 'Data Monografi Kelurahan / Trantib dan Bencana'. The main heading is '+ Data Trantib dan Bencana'. The filter section includes: Tahun: 2018; Provinsi: Jawa Timur; Kabupaten: Kota Pasuruan; Kecamatan: Gadingrejo; Kelurahan: (empty); Bulan: Februari. A 'Refresh' button is located to the right of the filters. Below the filters is a table header with columns 'No', 'Variabel', and 'Nilai'. The footer contains the text: '© Copyright 2017. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPETBANGDA) Kota Pasuruan'.

Gambar 68. Filter Informasi pada Menu Data Tantrib dan Bencana
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Setelah memilih filter informasi kecamatan dan kelurahan, informasi dalam menu Data Tantrib dan Bencana meliputi:

- a. Jumlah anggota umum
- b. Jumlah Pos Kamling
- c. Jumlah Operasi Penertiban
- d. Jumlah Kejadian Kriminal
- e. Jumlah Kejadian Bencana

- f. Jumlah Pos Bencana Alam
- g. Jumlah Pembalakan Liar
- h. Jumlah Pos Hutan Lindung

Berikut adalah gambar tampilan dari isi variabel Data Tantrib dan Bencana.

No	Variabel	Nilai
1	Jumlah Anggota Linmas	Orang
2	Jumlah Pos Kamling	Pos
3	Jumlah Operasi Penertiban	Kali
4	Jumlah Kejadian Kriminal	Kali
	a. Pencurian	Kali
	b. Perkosaan	Kali
	c. Kenakalan Remaja	Kali
	d. Pembunuhan	Kali
	e. Perampokan	Kali
	f. Penipuan	Kali
10	Jumlah Kejadian Bencana	Kali

Gambar 69. Variabel Informasi dalam Menu Data Tantrib dan Bencana Page 1
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari gambar di atas, variabel pertama hingga ketiga adalah jumlah anggota umum; jumlah pos kamling; dan jumlah operasi penertiban. Variabel yang keempat adalah Jumlah kejadian kriminal, yang memiliki sub variabel berisi jenis-jenis kejadian kriminal seperti pencurian; perkosaan; kenakalan remaja; pembunuhan; perampokan; penipuan. Variabel kelima adalah jumlah kegiatan bencana. Selanjutnya, gambar di bawah ini adalah halaman kedua dari menu Data Tantrib dan Bencana.

No	Variabel	Nilai
11	Jumlah Pos Bencana Alam	Pos
12	Jumlah Pembalakan Liar	Kali
13	Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos

Gambar 70. Variabel Informasi dalam Menu Data Tantrib dan Bencana Page 2
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Website Resmi Bappeda – Monografi Kelurahan)

Dari gambar di atas, dapat dilihat variabel keenam sampai kedelapan adalah jumlah pos bencana alam; jumlah pembalakan liar; dan jumlah pos hutan lindung.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web

a. Faktor Penghambat

Hambatan dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dimiliki oleh suatu organisasi adalah hal yang wajar. Begitu pula dengan *website* Sistem Informasi Data Kelurahan yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki banyak kendala sejak digagas sejak awal. Hambatan yang pertama adalah lamanya waktu *launching* jika dihitung sejak awal digagas. Dari 2013 ke 2017 berarti sekitar hampir 4 tahun gagasan ini terhambat. Lamanya waktu *launching* tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) *Data yang akan diolah tidak tersedia*

Inovasi sistem informasi berbasis *web* ini baru digagas pada tahun 2013, data yang akan diolah hampir tidak ada sama sekali. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Emy Wirasati selaku Kepala Bidang Litbang di Bappelitbangda Kota Pasuruan. Disebutkan oleh beliau bahwa pada awalnya Bappelitbangda Kota Pasuruan menggandeng Bapemas untuk pengumpulan data, namun tiba-tiba ada keputusan bahwa Bapemas di Kota Pasuruan dihapus dan Pusat Data Elektronik di pemerintah kota berubah menjadi Infokom (Informasi dan Komunikasi). Alasan tersebut membuat pihak bappelitbangda hanya mengandalkan data dari kelurahan. Namun pada saat di kelurahan pun tidak ditemukan data yang valid.

“Pada saat awal kami cari data di kelurahan itu hampir tidak ada data dari mereka, hanya ada data dari Pasuruan Dalam Angka (format baku dari BPS), padahal data ini tidak *update*. Sedangkan kami butuh yang *update*” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Alasan itulah yang membuat pihak Bappelitbangda kembali menunda diluncurkannya program ini.

2) *Pihak kelurahan kurang kooperatif*

Bappelitbangda Kota Pasuruan memilih untuk membina kelurahan-kelurahan di Kota Pasuruan terlebih dahulu. Pembinaan data dan informasi sebanyak dua kali, pada tahun 2014 dan 2015. Setelah program Sistem Informasi Data Kelurahan (pada saat itu masih bernama SIMDASKEL) dimasukkan dalam Renja dan RKPD tahun 2015, program ini mulai diaplikasikan walaupun belum *dilaunching*. Namun menurut Ibu Emy Wirasaty, data dari kelurahan tetap sulit untuk terkumpul.

“Waktu mulai dicoba untuk mengisi data, data itupun masih belum terkumpul mbak, mungkin kendala SDM dari pihak kelurahan atau kelurahan yang kurang komunikasi dengan masyarakatnya sehingga data itu masih berkumpul. Kami juga kurang tahu.” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Fecky Irawan, mantan staf Litbang pada saat Sistem Informasi Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) masih dipegang bidang litbang.

“Waktu itu data dari kelurahan *nggak ngumpul-ngumpul* mbak. *Nggak tahu ya kenapa susah sekali mengumpulkan data dari kelurahan, mereka kalau ditagih juga nunda-nunda terus.*” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017, di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan)

Alasan penundaan waktu *launching* yang selanjutnya adalah karena sempat terjadi perpindahan tangan wewenang dalam menjalankan program ini.

3) *Perpindahan wewenang dalam mengurus Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL)*

SIMDASKEL pada awalnya dipegang oleh Bidang Litbang, namun pada tahun 2016 mulai berpindah dipegang oleh Bidang Sosial Budaya. Perpindahan tersebut karena berkaitan dengan adanya kelembagaan baru yang pindah ke bidang sosial budaya, semuanya telah disebutkan dalam Pasal 16 Perwali Pasuruan No. 74 Tahun 2016 tentang Tupoksi Bidang Sosial Budaya. Setelah perpindahan tersebut, ternyata di bidang Sosial Budaya juga masih memiliki hambatan untuk *melaunching* program ini.

4) Kesibukan Pihak Ketiga

CV. Khasanah Konsultama selaku pembuat *website* atau pihak ketiga dari program Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* selalu sibuk karena memiliki jam terbang yang tinggi untuk program-program pemerintah dari kota-kota lain, sehingga pihak ketiga ini masih belum bisa untuk hadir semisal akan diadakan *launching* waktu itu. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Syafu'ari dalam wawancara berikut

“Nggak *dilaunching-launching* ini karena pembuat *website*-nya yang dari Malang itu masih sibuk, jam terbangnya tinggi itu mbak. Sampai ke luar pulau juga, kemarin terakhir dihubungi masih di Makassar ikut *launching E-Government* disana. Jadi kami mau *launching* pun masih tidak bisa. Nunggu mereka ada waktu juga. Nanti *Insyallah* bulan depan mereka bisa menghadiri *launching*” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Sistem ini akhirnya jadi *dilaunching* juga pada tanggal 22 Desember 2017 dan berganti nama dari Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Namun kenyataanya setelah *dilaunching* pun masih memiliki hambatan dalam penerapannya. Berikut ini hambatan setelah *dilaunching*:

5) Kelurahan belum diberi *security system*

Setelah *dilaunching*, menurut Ibu Ratih selaku staf Kasubid Sosial Budaya, seluruh kelurahan mulai bisa input data pada *website* pada 18 Januari 2018. Namun fakta yang peneliti temui di lapangan pada saat wawancara di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Gentong; Kelurahan Sebani; dan Kelurahan Bukir adalah mereka masih belum bisa *login* untuk input data dikarenakan belum diberi

security system berupa *username* dan *password*. Menurut Ibu Dian Wahyuning Ekowulan selaku PPTK Kelurahan Gentong yang menghadiri acara launching Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*,

“Kami belum dikasih *username* sama *password*nya itu mbak, gimana mau input kalo belum bisa masuk. Kata bappelitbangda waktu *launching* kemarin, nanti aka nada pelatihan lagi entah kapan untuk ngasih *username* sama *password* itu.” (Wawancara pukul 08.30 WIB, 1 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Gentong, Kota Pasuruan).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Abdullah selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Bukir yang juga menghadiri acara launching Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*,

“Kemarin tanggal 22 Desember 2017 itu bukan pelatihan mbak, cuma *launching* dan sosialisasi saja. Kita juga belum dikasih *username* sama *password* buat masuk website itu.” (Wawancara pukul 09.00 WIB, 2 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan).

Alasan tersebut semakin valid ketika Pak Sutrisno selaku Bagian Operator di Kelurahan Sebani yang juga menghadiri acara launching Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*, mengatakan hal yang sama.

“Belum dikasih *username* mbak, kemarin itu cuma pengenalan aja.” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 2 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Sebani, Kota Pasuruan).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terdapat dua waktu hambatan dalam menjalankan inovasi ini. Yang pertama adalah hambatan sebelum diluncurkan dan yang kedua adalah hambatan setelah diluncurkannya program ini. Namun dari hambatan-hambatan tersebut dapat dibuktikan juga bahwa pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan selalu berupaya untuk mencari cara agar inovasi ini tetap dilanjutkan dan berjalan.

b. Faktor Pendukung

Bappelitbangda Kota Pasuruan yang menggagas inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web memiliki landasan dan alasan yang menjadi faktor pendukung dikeluarkannya inovasi ini dan ingin cepat dilaksanakan. Baik faktor pendukung dari segi internal maupun eksternal.

1) Kebutuhan Bappelitbangda Kota Pasuruan terhadap informasi kelurahan sebagai bahan perencanaan pembangunan

Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kota Pasuruan, Ibu Emy Wirasati menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang valid. Seperti penjelasannya berikut, bahwa

“...menurut undang-undang pemerintahan daerah tahun 2004, sama undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang intinya itu kalo buat perencanaan harus didasarkan data dan informasi yang valid” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Syafu'ari selaku Kasubbid Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan.

“Simdaskel dulu dibuat atas inisiatif pihak bappeda sendiri, karena kami butuh data yang *update* dari kelurahan untuk buat perencanaan. Dulu waktu di bidang Litbang, semata-mata untuk menginformasikan data atau untuk penelitian. Tapi sekarang karena sudah ada di Bidang Sosbud, tentu akan dipakai untuk keperluan perencanaan pembangunan”. (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Sedangkan selama ini belum ada data yang bisa diambil secara cepat namun valid, oleh karena itu kebutuhan akan data tersebut tentu menjadi faktor pendukung lahirnya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web.

2) *Komitmen Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk tetap melanjutkan program ini.*

Program Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL) sempat mengalami *stuck* dalam artian tidak ada perkembangan saat masih dipegang bidang Litbang, sampai akhirnya dipindahkan ke Sosial Budaya menjadi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Dari sini terlihat Bappelitbangda Kota Pasuruan menghidupkan kembali sesuatu yang telah berhenti, pasti mereka memiliki harapan-harapan yang digantungkan di dalamnya, perpindahan tersebut juga tentu saja dibarengi dengan komitmen dari Bappelitbangda untuk tetap melanjutkan program ini dan membawanya menjadi lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emy Wirasati.

“Pada saat mau dipindahkan itu sebenarnya saya sendiri berpendapat bahwa program ini tidak dilanjutkan saja, karena banyak kendala yang kami alami selama ini dalam membangun program ini. Tapi lebih banyak yang berpendapat untuk dilanjutkan saja, pertama karena kami sangat butuh data. Yang kedua ini akan bermanfaat juga bagi kelurahan, dan yang ketiga informasi-informasi seperti ini (informasi kelurahan) juga banyak yang membutuhkan selain kami, bisa untuk masyarakat juga. Jadi kita lanjutkan saja program ini, dipindahkan ke Sosial Budaya karena ada perubahan tupoksi. Sejak saat itu muncullah komitmen dari kami untuk membawa program ini lebih baik dan lebih bermanfaat lagi” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Ratih selaku staf bidang Sosial Budaya, menurutnya

“sekarang sudah dipegang sama bidang Sosbud, kami tentu selalu berusaha agar manfaat dari sistem ini lebih bisa sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 8 Januari 2018 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara, suatu program tentu tidak akan berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, komitmen yang dibangun oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan sangat membantu berjalannya program ini.

3) *Antusiasme dan kebutuhan pihak kelurahan terhadap Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web*

Kelurahan sebagai obyek dari sistem berbasis web ini memiliki antusiasme yang luar biasa saat mengetahui ada program *e-government* yang bisa membantu meringankan pekerjaan mereka. Hal ini terbukti dari hadirnya seluruh kelurahan saat *launching* Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 71. Perwakilan kelurahan Kota Pasuruan menghadiri launching Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018 (Dokumen Pribadi Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2017)

Selain itu dari pihak kelurahan sendiri mengatakan bahwa mereka senang dengan program ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dian Wahyuning Ekowulan, selaku PPTK Kelurahan Gentong,

“Karena data kami juga sudah siap, tinggal memasukkan saja, tentu kami terbantu dengan adanya sistem ini. Karena sudah ada patokannya yang dimasukkan apa saja, satu kota sama semua, bisa saling melihat data kelurahan lain, jadi terbuka gitu. Kami kan jadi tahu kelurahan kami ini apanya yang tertinggal dari kelurahan lain jadi bisa juga jadi ajang berkompetisi. Arsip juga tidak takut hilang karena sudah terhubung di website, kalo butuh data tinggal akses di website saja. Kami seneng *kok*.” (Wawancara pukul 08.30 WIB, 1 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Gentong, Kota Pasuruan).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdullah selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Bukir,

“iya mbak kami seneng ada program ini karena jadi terbantu ngarsip data, Pemda juga bisa dengan mudah mengontrol perkembangan masyarakat, di situ ka nada info-info tentang warga di tiap kelurahan tuh.. terus juga kami bisa lihat punya kelurahan lain. Ada standarnya juga, jadi data-data yang dimasukkan semua kelurahan sama” (Wawancara pukul 09.00 WIB, 2 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan).

Antusiasme semakin terlihat ketika Bapak Sutrisno selaku bagian operator di Bidang Pemerintahan Kelurahan Sehani juga mengatakan bahwa,

“Pasti nanti kami ngingut datanya ke web itu mbak, karena ini sudah mempermudah kelurahan dalam pengisian data monografi, bisa sama juga formatnya dengan seluruh kelurahan di kota. Kalau tahun-tahun yang dulu tidak ada panduannya.” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 2 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Sehani, Kota Pasuruan).

Antusiasme yang hadir di pihak kelurahan sebenarnya didasarkan oleh kebutuhan pihak kelurahan sendiri terhadap Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Dian Wahyuning Ekowulan, selaku PPTK Kelurahan Gentong, bahwa

“kalo menjelang pemilu itu biasanya banyak yang minta data ke kelurahan itu mbak, kalau ada website itu kan nanti bisa tinggal disuruh lihat di web aja.. terus kalau ada yang mau kasih bantuan-bantuan ke kelurahan, disitu juga ada data warga yang tidak mampu, intinya memudahkan lah mbak, kami butuh sistem-sistem seperti ini karena meringankan beban kami juga biasanya banyak ditagih data dari banyak pihak” (Wawancara pukul 08.30 WIB, 1 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Gentong, Kota Pasuruan).

4) *Perkembangan zaman yang menuntut semua serba teknologi*

Zaman yang modern saat ini menuntut semua serba instan, cepat, dan tepat. Begitupun dengan yang dilakukan Bappelitbangda Kota Pasuruan, menurut Bapak Syafu'ari “Sekarang ini kalo ada masalah kami carikan solusinya adalah e-government. Karena tuntutan juga ya, semua sekarang serba internet. Apa-apa bisa dilihat di internet. Jadi kami ya mengikuti perubahan itu” (Wawancara pukul 10.00 WIB, 10 November 2017 di Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu Ratih, bahwa “Tujuan dari monografi itu sendiri sebenarnya agar masyarakat tahu, nah kalo pake *website* kan bisa gampang, tinggal buka aja di *google* Sistem Informasi Data Kelurahan Kota Kelurahan, pencarian paling atas sudah pasti muncul *website*-nya. Ngerti sendiri kan sekarang apa-apa, orang tinggal cari di *google*.” (Wawancara pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2018. Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan).

D. Analisis dan Interpretasi

1. Inovasi dan Aktivitas Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien, dapat dikategorikan dalam kegiatan administrasi publik. Sebab sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siagian dalam Ibrahim (2008:15), bahwa administrasi publik diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dijelaskan pula oleh Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja dalam Ibrahim (2008:4), apabila di Indonesia ini pengkajian administrasi publik lebih ditekankan pada administrasi pembangunan, yang ditafsirkan sebagai teori, strategi dan kebijakan mengenai pembangunan administrasi negara yang ditujukan kepada peningkatan kemampuannya dalam merumuskan, melaksanakan mengawasi dan menilai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan. Pernyataan tersebut merujuk kepada tujuan awal Bappelitbangda Kota Pasuruan menciptakan sistem ini adalah untuk melancarkan proses perencanaan pembangunan Kota Pasuruan. Berdasar pada dua teori tersebut, Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* jelas dapat dikatakan sebagai kegiatan administrasi publik.

Penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional, hal ini berdasar pada pendapat Siagian (1992:2).

Sebab administrasi selalu terikat pada kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Hal ini sesuai dengan penerapan inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang sangat terlihat kondisional dari awal digagas hingga dilaunching sampai pasca launching. Setelah dilaunching, informasi data ini disajikan dalam bentuk sistem berbasis *website*. Menurut Brien dan Marakas (2014:27), sistem memiliki tiga fungsi dasar yaitu masukan (*input*); pengolahan (*process*); dan keluaran (*output*). Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini juga melakukan ketiga fungsi dasar dari sistem tersebut.

a. Gagasan terciptanya Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan

Inovasi diciptakan untuk sebuah pembaharuan, yang berasal dari gagasan-gagasan atau ide-ide lalu dirangkai menjadi cara-cara pembaharuan untuk mencapai suatu tujuan ataupun mendapatkan keuntungan. Menurut Lynn dalam Osborne (2010), Inovasi didefinisikan dengan benar sebagai transformasi orisinal, dan mendasar dari tugas inti organisasi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian bahwa Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* pada dasarnya diciptakan untuk melancarkan tugas Bappelitbangda Kota Pasuruan dalam hal perencanaan pembangunan, yang mana perencanaan pembangunan adalah tugas pokok dari Bappelitbangda Kota Pasuruan yang telah dijelaskan dalam Perwali Pasuruan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Inovasi diciptakan dalam rangka pengembangan organisasi lewat proses, manajemen, dan produk baru. Menurut West & Farr (Ancok, 2012:34) bahwa

inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Hal ini selaras dengan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang telah digagas oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan pada tahun 2013. Dimana sistem ini awalnya hanya berasal dari sebuah ide untuk mengumpulkan data monografi kelurahan yang paling *update*. Sebab wilayah Kota Pasuruan memiliki 4 kecamatan dengan 34 kelurahan, jumlah ini cukup banyak. Sehingga wajar apabila untuk mengumpulkan data yang valid, Bappelitbangda Kota Pasuruan kesulitan jika menginginkan data terkumpul dengan waktu yang singkat. Kemudian ide mengumpulkan data dengan sistem ini dituangkan dalam proses yang cukup panjang dari pelatihan dan perumusan di RKPD, lalu dicoba untuk diterapkan pada tahun 2016 lewat dibuatnya sebuah *website* bernama SIMDASKEL (Sistem Informasi Data dan Statistik Kelurahan).

Inovasi yaitu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja instansi tertentu dengan didukung oleh instansi lainnya yang terkait dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdayaguna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan yang telah menjadi isu-isu utama dalam dunia pemerintah dan segi-segi kehidupan yang harus diperbaharui (Said, 2007:27). Dari pendapat Mas'ud Said tentang inovasi tersebut, jika dilihat dari kalimat inovasi adalah perubahan yang terencana, dapat membuktikan lagi bahwa memang Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* adalah sebuah inovasi.

Sebab Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* dimulai dari tujuan yang jelas, yakni untuk pengumpulan data yang valid dari kelurahan untuk kepentingan perencanaan pembangunan; lalu dilakukan uji coba pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuatkan *website*-nya, yakni pelatihan sebanyak dua kali di tahun 2015 dan 2016; sampai dimasukkan dalam Renja dan RKPD tahun 2016. Persiapan yang matang tersebut menunjukkan bahwa sistem ini tidak diciptakan secara tiba-tiba, namun dengan persiapan dan perencanaan yang matang.

Penggunaan teknologi dan peralatan baru adalah kalimat lanjutan dari pernyataan Said tentang inovasi. Hal ini terlihat pada Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang dibentuk berbasis *website*, dimana penggunaannya tentu memakai teknologi komputer dan terhubung dengan jaringan internet. Cara ini tentu menjadi cara baru dalam penyampaian data monografi kelurahan di Kota Pasuruan, mengingat penyampaian layanan data monografi kelurahan sebelumnya adalah hanya menggunakan papan yang tersedia di kantor kelurahan. Seperti pada Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12 yang telah penulis paparkan di subbab penyajian data.

Inovasi didukung oleh instansi lainnya yang terkait dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdayaguna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan merupakan kalimat akhir dari pernyataan Said. Kalimat tersebut selaras dengan Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*, dimana sistem ini memang milik Bappelitbangda, digagas pula oleh Bappelitbangda, namun mereka juga mendapat dukungan dari Kelurahan dan Kecamatan Se-Kota Pasuruan. Dimana kelurahan bersedia

menginput datanya ke dalam sistem ini. Dengan cara ini, sistem ini juga lebih berdayaguna sebab selain diciptakan untuk kepentingan Bappelitbangda dalam hal pengumpulan data yang valid untuk perencanaan pembangunan, bisa dimanfaatkan pula oleh kelurahan untuk pengarsipan data, penyajian data, juga ajang bersaing antar kelurahan di Kota Pasuruan.

Berdasarkan prinsip inovasi menurut Drucker (1993) yang dikutip oleh Ancok (2012: 41-42) terdiri dari:

- 1) Inovasi merupakan sebuah usaha sistematis yang tujuannya jelas, yang dimulai dengan mengkaji peluang yang ada.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* mempunyai tujuan yang jelas yakni ingin memperoleh data yang *update* untuk kepentingan perencanaan pembangunan, serta membantu kelurahan untuk penyajian data kelurahan yang lebih modern. Bappelitbangda Kota Pasuruan telah mengkaji peluang yang ada, yakni melihat kelemahan yang dimiliki pihak kelurahan dalam mengarsipkan dan menyajikan data monografi kelurahannya, yang mana penyajian papan data monografi kelurahan di kantor kelurahan sering tidak *update*. Selain itu kelurahan di Kota Pasuruan sebelumnya belum memiliki wadah untuk saling berbagi data antar kelurahan.

- 2) Inovasi berdasarkan perceptual (adanya kebutuhan yang nyata) dan juga konseptual. Berdaarkan konseptual bersumber dari pemikiran yang mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappelitbangda Kota Pasuruan pada awalnya kesulitan dalam memperoleh data kelurahan yang

valid, hanya ada data dari *Pasuruan Dalam Angka* yakni format baku dari Badan Pusat Statistik. Atas kebutuhan itulah, Bappelitbangda Kota Pasuruan berinisiatif untuk mengambil data sendiri ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pasuruan.

- 3) Inovasi harus dimulai dengan ide yang sederhana, mudah dan fokus pada satu tujuan supaya berhasil.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang telah digagas oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah sesuatu yang sederhana dan awalnya hanya berfokus untuk tujuan pengumpulan data. Namun sesuatu yang sederhana ini ternyata akan berdampak besar bagi aspek-aspek lain, utamanya untuk mendukung layanan informasi kelurahan berbasis *website*. Selain itu juga menciptakan daya saing antar kelurahan, serta perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk Kota Pasuruan yang akan berdampak pada kemajuan Kota Pasuruan.

Penyajian data kelurahan yang berbasis *website* termasuk dalam tingkatan *e-government level Booklet (to Publish)*, berdasar pada pendapat Nugroho (2010:47), dimana komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalah satu arah, pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Isi utama dari *website* Sistem Informasi Data Kelurahan yang disajikan kepada masyarakat adalah data monografi. Monografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu,

perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa dan kelurahan. Data-data tersebut selain disajikan juga digunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk bisa menyajikan data seperti yang dimaksud tersebut, tentu dibutuhkan pula data yang valid. Sesuai dengan Pasal 152 Bab VII Perencanaan Pembangunan Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan teori data dari Supranto (2008:2) yang menjelaskan kegunaan pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat kebijakan (*decision makers*).

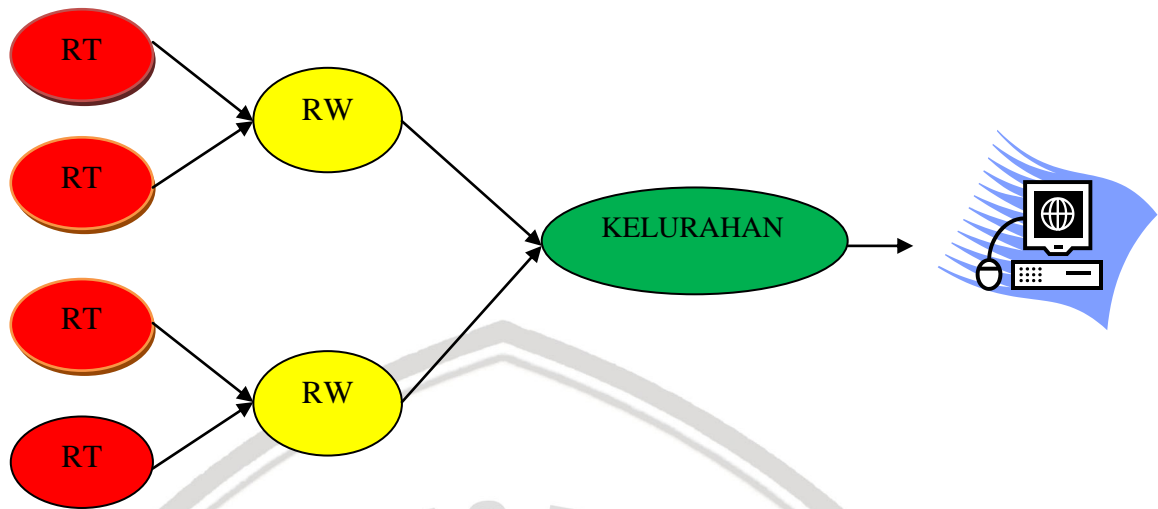
b. Input data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan

Input atau masukan adalah bagian dari rangkaian sistem, sebagaimana yang dijelaskan oleh Brien dan Marakas (2014:27), bahwa masukan melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses, contohnya adalah bahan baku. Dalam Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web ini, bahan bakunya adalah data. dimana data kependudukan adalah data yang akan dimasukkan ke dalam website Sistem Informasi Data Kelurahan, dan data tersebut didapatkan kelurahan dari laporan RT dan RW. Dimana RT melaporkan ke RW, dan RW melapor ke Kelurahan. Untuk melaporkan tersebut, tentu dibutuhkan waktu dari RT ke RW dan RW ke Kelurahan. Waktu yang diberikan kelurahan kepada RW adalah satu bulan untuk melaporkan perubahan data yang

ada tiap RW. Untuk hal ini, sesuai dengan Pendapat Supranto (2008:15), bahwa data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu, karena data yang diperlukan merupakan data berkala (*time series data*) yang dapat menggambarkan perkembangan tersedianya sumber dari waktu ke waktu yang sekaligus dapat dipergunakan untuk mengetahui tren atau arah perkembangan secara umum dari masing-masing sumber.

Data-data kependudukan yang didapat dari RT dan RW bukan satu-satunya data yang diinput. Sebab data yang diinput juga meliputi personil kelurahan, kewenangan kelurahan, keuangan kelurahan, serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) milik kelurahan yang murni didata sendiri oleh pihak kelurahan di bagian Register dalam Sie Pemerintahan. Dari data-data tersebut, informasi kelurahan yang akan ditampilkan dalam website akan semakin lengkap dan akan membantu Bappelitbangda dalam mewujudkan ketersediaan data yang akan mereka gunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Sebab dari sebuah data akan diketahui gambaran umum dari suatu masalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Supranto (2008:15), bahwa data berguna untuk mengetahui gambaran dari suatu keadaan dan membuat keputusan/memecahkan permasalahan.

Berikut ini penulis gambarkan skema ringkas dari hasil penelitian mengenai input data dari RT hingga siap masuk ke dalam website Sistem Informasi Data Kelurahan.



Gambar 72. Alur Masukan Data untuk Sistem Informasi Data Kelurahan
Sumber: Data Primer Hasil Observasi yang diolah Tahun 2018

Dari gambar di atas, dapat terbaca dengan mudah alur dari masukan data. Jadi dari beberapa RT dalam satu RW, mengumpulkan data ataupun perubahan data yang terjadi dalam RT kepada RW mereka, kemudian RW yang telah mendapatkan data dari RT-nya mengumpulkan data tersebut kepada Kantor Kelurahan mereka, adapun sampai di Kantor Kelurahan mereka akan dikoordinir oleh bagian Sie Pemerintahan. Apabila RW terlambat mengumpulkan data, nantinya akan ditagih pula oleh Sie Pemerintahan dari kelurahan tersebut. Untuk data-data lain yang berhubungan dengan personil kelurahan, kewenangan kelurahan, keuangan kelurahan, serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) milik kelurahan adalah murni didata sendiri oleh pihak kelurahan di bagian Register dalam Sie Pemerintahan.

c. *Process* mengolah data dalam Sistem Informasi Data Kelurahan

Aktivitas sistem informasi yang kedua menurut Brian dan Marakas (2014:32) adalah proses, yakni pengolahan data menjadi informasi. Meliputi pengendalian kinerja sistem dan penyimpanan sumber data. Selaras dengan pendapat Brian dan Marakas tersebut, aktivitas proses yang dilakukan dalam Sistem Informasi Data Kelurahan meliputi pengendalian kinerja sistem yang ditunjukkan melalui akses login untuk kelurahan; akses pengaturan untuk *user login* dan *manajemen user*, dan penyimpanan data yang ditunjukkan dari akses untuk kelurahan yang bebas menginput; menghapus; merubah; dan menyimpan data mereka masing-masing.

Masing-masing kelurahan akan diberi buku panduan yang berisi langkah-langkah untuk login, melakukan pengaturan, dan memasukkan dan merubah data yang akan memudahkan pihak kelurahan dalam mengolah datanya. Buku ini akan diberikan kepada masing-masing kelurahan pada saat pelatihan untuk Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*. Seperti yang penulis bahas sebelumnya, bahwa inovasi ini masih sampai pada tahap launching dan pengelan secara umum pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga buku panduan ini belum sampai ke pihak kelurahan.



Gambar 73. Manual Book Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian Tahun 2018


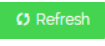
Adapun berikut adalah rangkuman penulis mengenai penjelasan tentang proses mengolah data pada *website* Sistem Informasi Data Kelurahan dalam *Manual Book* yang dikeluarkan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan berdasarkan teori pengolahan data menurut Brien dan Marakas (2014:32), yakni ada pengendalian kinerja sistem dan penyimpanan sumber data.

1. Pengendalian kinerja sistem

Akses yang diberikan kepada kelurahan untuk mengendalikan kinerja sistem *website* dari Sistem Informasi Data Kelurahan ini, yang pertama ditunjukkan dengan akses *login*. Untuk melakukan *login* dibutuhkan *security system* berupa *username* dan *password*, yang akan diberikan kepada kelurahan pada saat pelatihan. Akses yang kedua setelah *login* adalah pengaturan. Dalam

website tersebut, ada menu pengaturan yang memungkinkan admin dari kelurahan melakukan manajemen data seperti proses *insert*, *update*, dan *delete* pada *user login* dan *manajemen user* seperti pada gambar 41;42;43;44; dan 45 di sub bab penyajian data sebelumnya. Data-data yang bisa diubah berkaitan dengan *security system*, seperti *data user* dan profil. Juga admin Bappelitbangda Kota Pasuruan dan CV Khasanah Konsultama sebagai pihak ketiga yang akan membantu apabila *website* perlu *maintenance* atau pemeliharaan situs.

2. Penyimpanan Sumber Data

Sumber data yang telah didapatkan dari RT/RW dan data milik kelurahan sendiri bisa dimasukkan, diubah, dan disimpan dalam *website*. Terdapat menu Data Master dan Data Monografi Kelurahan. Data Master bisa menambah dan menyimpan data umum tiap kecamatan beserta kelurahannya. Data Monografi Kelurahan bisa menyimpan data umum kelurahan, data personil kelurahan, data kewenangan kelurahan, data keuangan kelurahan, data kelembagaan yang dimiliki kelurahan, serta tantrib dan bencana yang terjadi di kelurahan. Admin akan bertemu dengan ikon  untuk menyimpan data dan  untuk me-*refresh* tampilan data di tiap-tiap sub menu data monografi kelurahan.

Berdasarkan proses pengolahan data yang dikerjakan dalam Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* di atas, dapat diketahui bahwa sistem ini memiliki seluruh komponen dari sistem informasi menurut Brien dan Marakas (2014:32) yang diantaranya:

1) Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari basis data dan pengetahuan, yang didapatkan dari data kependudukan yang terkumpul dari RT dan RW lalu ke kelurahan, serta data personil; kewenangan; keuangan; dan kelembagaan yang didapatkan dari kantor kelurahannya.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia meliputi pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Yakni pembaca website nantinya jika informasi yang disajikan mulai lengkap, Ketua RT dan RW di masing-masing kelurahan yang membantu terkumpulnya data, bagian register pada Sie Pemerintahan di tiap Kantor Kelurahan sebagai admin kelurahan, bagian sub bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kota Pasuruan sebagai admin dari Bappelitbangda Kota Pasuruan, serta CV Khasanah Konsultama sebagai pihak ketiga yang membuat *website* Sistem Informasi Data Kelurahan.

3) Sumber Daya Perangkat Lunak

Perangkat lunak terdiri dari program dan prosedur. Program disini adalah website Sistem Informasi Data Kelurahan itu sendiri, dan prosedurnya adalah *manual book* atau buku panduan dari Bappelitbangda Kota Pasuruan.

4) Sumber Daya Perangkat Keras

Perangkat keras terdiri dari mesin dan media. Mesin dan media yang dimaksud disini adalah *personal computer* (pc) ataupun *laptop* yang bisa digunakan untuk mengakses *website*.

5) Sumber Daya Jaringan

Sumber daya jaringan meliputi media komunikasi dan pendukung jaringan. Pendukung jaringan yang dimaksud disini adalah jaringan internet, sebab untuk mengakses website dibutuhkan *personal computer* ataupun *laptop* yang terhubung jaringan internet.

d. Output dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah layanan informasi kelurahan berbasis *website*

Aktivitas terakhir dari sebuah sistem menurut Brien dan Marakas (2014:32) adalah keluaran, bahwa keluaran melibatkan pemindahan elemen yang telah dihasilkan oleh sebuah proses transformasi ke tujuan akhir mereka, sebagai contoh: produk jadi; jasa; dan manajemen informasi harus dikirimkan kepada pengguna mereka. Dalam hal ini, *output* dari Sistem Informasi Data Kelurahan adalah informasi yang disajikan dalam *website*-nya, sebab data yang telah diolah akan berubah menjadi informasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutanta (2011:13) bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Pendapat Sutanta tersebut sekaligus menyinggung hasil penelitian yang mengatakan bahwa layanan informasi yang dibangun dalam Sistem Informasi Data Kelurahan ini nantinya akan digunakan juga untuk bahan perencanaan pembangunan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan. Adapun informasi yang disampaikan oleh *website* Sistem

Informasi Data Kelurahan mengacu pada Pasal 3 Permendagri No.13 Tahun 2012
Tentang Monografi Desa dan Kelurahan yang meliputi,

1) Data Umum, yang terdiri dari:

- a. Tipologi Desa;
- b. Tipologi Perkembangan Desa;
- c. Luas Wilayah; Batas Wilayah;
- d. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan)
- e. Pekerjaan/Mata pencaharian warga
- f. Tingkat pendidikan masyarakat
- g. Jumlah Penduduk Miskin
- h. UMR Kabupaten/Kota
- i. Sarana Prasarana Kantor Desa, Prasarana Kesehatan, Prasarana Pendidikan, Prasarana Ibadah, Prasarana Umum.

2) Data personil, yang terdiri dari:

- a. Lurah
- b. Sekrtaris Kelurahan
- c. Perangkat Desa
- d. BPD

3) Data Kewenangan, yang terdiri dari:

- a. Jumlah Perdes yang telah ditetapkan
- b. Bidang yang diatur oleh Perdes
- c. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota
- d. Urusan asli yang masih dilaksanakan dana

e. Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa.

4) Data Keuangan, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Besaran ADD yang dikelola per tahun
- c. Bantuan yang diterima desa
- d. Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat
- e. Bekerja Desa
- f. SILPA/sikpa
- g. Dana Cadangan
- h. Penghasilan dan Tunjangan

5) Data Kelembagaan, yang terdiri dari

- a. LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebuah lain
- b. Lembaga Adat
- c. TP PKK
- d. BUMDes
- e. Karang Taruna
- f. RT/RW
- g. Lembaga kemsyarakatan lainnya

6) Data Tantrib dan Bencana, yang terdiri dari

- a. Jumlah anggota umum
- b. Jumlah Pos Kamling
- c. Jumlah Operasi Penertiban
- d. Jumlah Kejadian Kriminal

- e. Jumlah Kejadian Bencana
- f. Jumlah Pos Bencana Alam
- g. Jumlah Pembalakan Liar
- h. Jumlah Pos Hutan Lindung

Informasi mengenai data monografi kelurahan di atas diberikan melalui website dalam rangka mendukung layanan informasi data kelurahan di Kota Pasuruan, sebagaimana hasil penelitian bahwa tujuan monografi adalah agar masyarakat tahu, juga disebutkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan bahwa monografi dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien, maka perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa dan kelurahan. Dari upaya yang dilakukan Bappelitbangda Kota Pasuruan ini dapat dilihat bahwa mereka ingin mengangkat layanan informasi yang mana pasti ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, pelayanan kepada masyarakat ini akan bisa dirasakan.

Pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung meliputi layanan informasi dapat diakses oleh orang-orang yang membutuhkan data, seperti pelajar; mahasiswa; pemberi bantuan karena ada informasi mengenai jumlah masyarakat miskin, bencana alam, dan kegiatan warga; kepolisian yang membutuhkan data tentang keamanan di kota pasuruan dari segmen kelurahan

sebab ada data mengenai jumlah tindakan kriminal dan yang melanggar keamanan di kelurahan; panitia pemilu yang memerlukan data kependudukan yang diperlukan saat akan diadakan pemilu; membantu pihak kelurahan dalam mengarsipkan datanya dan sebagainya.

Pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan secara tidak langsung meliputi, layanan informasi kelurahan ini dapat dipakai Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk bahan perencanaan pembangunan; dipakai kelurahan untuk meningkatkan daya saing antar kelurahan sebab terjadi transparansi data-data seluruh kelurahan di Kota Pasuruan; juga ada data-data kegiatan yang telah dilakukan oleh kelurahan, tentu hal ini akan menimbulkan persaingan yang sehat antar kelurahan untuk terus memperbaiki wilayah kelurahannya masing-masing. Dengan manfaat layanan informasi kelurahan yang secara tidak langsung ini, tentu akan berdampak besar kepada kemajuan Kota Pasuruan yang nantinya akan dirasakan dan untuk kepentingan masyarakat juga. Dari sini dapat membuktikan Bahwa Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis *website* memiliki fungsi informasi, yang menurut Sutanta (2011:15) informasi mempunyai beberapa fungsi antara lain menambah pengetahuan; mengurangi ketidakpastian; mengurangi resiko kegagalan; mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan; memberikan standar keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan. Sebab dalam *website* tersebut ada format pengisiannya, hal ini akan membantu pihak kelurahan untuk mendapat standar data yang akan disajikan. Hal ini juga diungkap oleh Ibu Dian Wahyuning (PPTK Kelurahan Gentong), Bapak Abdullah (Kasie Pemerintahan Kelurahan Bukir), dan Bapak Sutrisno (Bagian operator

Bidang Pemerintahan Seban) bahwa mereka terbantu dengan adanya standar atau patokan dalam menyajikan data.

Bappelitbangda Kota Pasuruan sedang berupaya memenuhi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web ini jika dilihat dari tujuan dan manfaat-manfaat di atas. Sebab pelayanan publik menurut Kurniawan dalam Lijan (2008:5) adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu. Sekaligus juga memenuhi Undang-undang RI No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah penulis sebutkan sebelumnya, dapat dilihat pula ada bentuk saling ketergantungan antara pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan dengan pihak kelurahan di Kota Pasuruan, ini menandakan bahwa keduanya sudah masuk ke dalam sistem. Sebagaimana pengertian sistem secara umum yang diungkapkan oleh Ibrahim (2008:29) bahwa sistem adalah suatu totalitas (entitas) yang kompleks yang terdiri dari seperangkat bagian-bagiannya (subsistem-subsistem) yang saling berinteraksi sesamanya dan lingkungannya dalam bentuk saling ketergantungan yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang telah kita ketahui, baik kelurahan maupun Bappelitbangda Kota Pasuruan sama-sama membutuhkan penyajian data dalam bentuk *website* tersebut.

Hal ini dapat membuktikan jika keduanya saling ketergantungan satu sama lain, Bappelitbangda Kota Pasuruan butuh data untuk perencanaan pembangunan, dan kelurahan merasa terbantu dengan fasilitas pengarsipan data lewat *website* yang disediakan oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* ini termasuk dalam kategori *e-government* berbentuk *website*, yang menurut Al Gore dan Tany Blair dalam Andrian (2007:17) ada manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government*. Untuk saat ini memang manfaat ini belum terlihat karena sistem ini masih dalam tahap pengenalan, namun berikut adalah analisis peneliti jika dilihat dari tujuan-tujuan yang dibawa dalam sistem ini, maka nantinya akan ada manfaat dari *e-government* ini berdasarkan pendapat Andrian (2007:17):

a) *Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industry), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.*

Layanan informasi data kelurahan sebelumnya, sebelum diciptakan *website* ini adalah melalui papan yang ditempel pada masing-masing kantor kelurahan. Sekarang sudah lewat *website* yang akan diupdate datanya tiap 6 bulan sekali, hal ini tentu membuktikan bahwa lewat *website* ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

b) *Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.*

Disajikannya data ke dalam *website* artinya semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Dengan ini, tentu tercipta transparansi data yang

membuat masyarakat bisa mengontrol kegiatan dan perkembangan dari kelurahan-kelurahan di Kota Pasuruan, sehingga tercipta pula akuntabilitas dari pemerintah sebagai pelayan public itu sendiri.

- c) *Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.*

Dengan adanya website ini, akan mengurangi biaya pengarsipan karena ini akan mendukung gerakan *paperless*, karena saat Bappelitbangda Kota Pasuruan atau siapapun yang membutuhkan data tersebut dari kelurahan, pihak kelurahan tidak perlu lagi mencetak, namun langsung bisa diakses di *website*.

- d) *Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.*

Manfaat secara tidak langsung yang membuat munculnya daya saing antar kelurahan, secara tidak langsung pula memberikan peluang bagi pemerintah desa (kelurahan) untuk mengembangkan wilayahnya, misalnya menumbuhkan kegiatan UMKM di wilayahnya, dari sini akan tercipta sumber-sumber pendapatan yang baru bagi pihak kelurahan maupun masyarakatnya.

- e) *Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.*

Pelatihan-pelatihan yang akan diberikan Bappelitbangda Kota Pasuruan kepada Kelurahan Se-Kota Pasuruan terkait dengan website ini akan menciptakan forum baru pula bagi Bappelitbangda Kota Pasuruan dan Kelurahan untuk saling berbagi dan mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan, ini akan membantu keduanya mencari pemecahan masalahnya lewat keputusan-keputusan yang nantinya akan dibuat.

- f) *Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan public secara merata dan demokratis.*

Tujuan akhir dari inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan adalah untuk masyarakat. Untuk kemajuan Kota Pasuruan juga, diciptakan website ini diciptakan untuk menciptakan pengoptimalan layanan kelurahan secara merata se-Kota Pasuruan.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sejauh ini, sejak tiga bulan setelah dilaunching memang belum menyajikan data real pada website-nya dikarenakan deadline pengumpulan data masih belum habis, mengingat akhir penyajian informasi pada semester awal ini adalah pada Juli 2018. Namun, berdasarkan pada upaya-upaya Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk menyajikan *output* seperti yang telah disajikan di atas, dapat membuktikan bahwa sistem ini telah mendukung ke arah layanan informasi kelurahan yang baik untuk Kota Pasuruan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web*

a. Faktor Penghambat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* di Kota Pasuruan, hal yang menjadi penghambat dalam inovasi ini ada dua macam, yakni sebelum launching dan setelah dilaunching. Hambatan sebelum launching adalah hambatan-hambatan yang membuat inovasi ini tak kunjung di launching hingga 4 tahun lamanya. Hambatan sebelum launching tersebut diantaranya:

1) *Data yang akan diolah tidak tersedia*

Sumber utama dari penyajian informasi ini adalah data. Namun sejak pertama kali digagas pada tahun 2013, Bappelitbangda Kota Pasuruan kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Hal ini membuat sistem ini berbanding terbalik dengan tujuannya yang akan membuat perencanaan pembangunan dengan didasarkan data, sebagaimana teori Supranto (2008:2) bahwa kegunaan data pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*).

Ketidakterediaan data tersebut terjadi karena pada awalnya data akan diambilkan dari Bappemas Kota Pasuruan, namun tiba-tiba ada keputusan bahwa Bappemas di Kota Pasuruan dihapus. Selain itu ingin menggandeng Pusat Data Elektronik dari pemerintah kota, namun Pusat Data Elektronik tersebut berubah menjadi Infokom (Informasi dan Komunikasi). Kedua hal tersebut menyebabkan Bappelitbangda semakin kesulitan memperoleh sumber data, sebab pihak-pihak

yang digantungkan telah tidak ada. Kemudian Bappelitbangda memilih untuk langsung mengambil data dari kelurahan, namun lagi-lagi tidak ada data yang terbaru, sebab data yang dimiliki kelurahan adalah sama dengan milik Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sebenarnya Bappelitbangda juga sudah mengantongi data seperti milik kelurahan dari *Pasuruan Dalam Angka* (format baku dari BPS). Padahal data tersebut tidak *update* atau terbaru.

Bappelitbangda sempat mengurungkan niat untuk meluncurkan program ini dikarenakan adanya berbagai permasalahan tersebut. Dari sini dapat terlihat bahwa ada ketidaksiapan pihak Bappelitbangda dalam proses input, dimana mereka kurang menyiapkan rencana untuk pengumpulan data. Sebab mereka awalnya hanya menggantungkan pihak-pihak lain, yakni Bapemas; Pusat Data Elektronik; dan Kelurahan yang mana pihak kelurahan pun tidak dibekali bagaimana caranya bisa mendapatkan data itu sendiri. Harusnya sejak awal saat Bappelitbangda Kota Pasuruan menyiapkan sistem ini yang jelas-jelas sangat membutuhkan data yang valid dan *update*, Bappelitbangda Kota Pasuruan juga menyiapkan pula Standard Operasional Procedure (SOP) yang jelas dari bagaimana mereka mengambil atau memperoleh data tersebut agar tidak terlalu lama menunda *launching*. Misalnya membekali kelurahan dengan membentuk tim-tim untuk menyurvei warga di wilayah kelurahannya, kelurahan pun bisa meminta tolong RT/RW untuk menyurvei masing-masing warganya. Namun, Bappelitbangda Kota Pasuruan baru melakukan pembinaan kepada kelurahan setelah menyadari ketidaktersediaan data ini, seperti yang penulis bahas pada faktor penghambat berikutnya.

2) Pihak Kelurahan yang kurang kooperatif

Bappelitbangda Kota Pasuruan memilih untuk membina kelurahan terlebih dahulu dikarenakan adanya faktor penghambat yang pertama. Karena bagaimana pun, pilihan terakhir data bisa diambil dari kelurahan sendiri. Dilakukanlah pembinaan sebanyak dua kali pada tahun 2014 dan 2015. Setelah pembinaan, Bappelitbangda Kota Pasuruan menagih data-data yang diinginkan ke kelurahan, namun pihak kelurahan selalu menunda untuk mengumpulkan data tersebut, hingga Bappelitbangda Kota Pasuruan tidak lagi meminta data ke kelurahan. Hal ini membuat Bappelitbangda Kota Pasuruan kembali menunda peluncuran program ini, meskipun pada saat itu program sudah dimasukkan dalam Renja dan RKPD Tahun 2015. Dari sini terlihat bahwa Bappelitbangda dan Kelurahan kurang melakukan koordinasi dengan baik selayaknya proses administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (1992:2), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adanya kurang koordinasi antara pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan dengan pihak kelurahan sebenarnya tidak akan terjadi apabila Bappelitbangda Kota Pasuruan pada waktu itu memberikan *deadline* yang jelas kepada kelurahan dalam mengumpulkan data. Selain itu, *deadline* yang jelas juga harusnya dibarengi dengan *reward and punishment* untuk kelurahan sebagai motivasi untuk

mereka. Kelurahan yang menunda-nunda dan tak kunjung mengumpulkan data akan mendapatkan hukuman dan kelurahan yang mengumpulkan tepat waktu akan mendapatkan hadiah untuk mengapresiasi kerjanya. Hadiah itu misalnya bisa berbentuk *award* atau penghargaan, bisa juga fasilitasi pegawai kelurahan dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Hal ini akan menumbuhkan motivasi untuk pihak kelurahan.

3) *Perpindahan wewenang dalam mengurus Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Kelurahan (SIMDASKEL)*

Sistem informasi ini yang pada saat itu masih bernama SIMDASKEL dan dipegang oleh Bidang Litbang, dipindahkan ke Bidang Sosial Budaya. Hal tersebut dikarenakan ada kelembagaan baru yang pindah ke bidang Sosial Budaya, berdasarkan peraturan baru tentang tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Pasuruan, dalam Pasal 16 Perwali No.74 Tahun 2016 tentang Tupoksi Bidang Sosial Budaya. Perpindahan ini memang bagian dari langkah perbaikan kinerja Bapplitbangda Kota Pasuruan, seperti menurut Lynn dalam Osborne (2010:55), inovasi merupakan langkah perubahan bagi organisasi, langkah perubahan ini tentunya adalah langkah-langkah perbaikan bagi kebaikan organisasi tersebut. Meskipun perpindahan ini untuk kebaikan Bappelitbangda Kota Pasuruan juga untuk Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web, namun perpindahan ini tentunya kembali menghambat waktu *launching*, karena pasti ada penyesuaian pada Bidang Sosial Budaya, mengingat ini adalah baru bagi mereka dan dulu yang menggagas adalah Bidang Litbang, istilahnya Bidang Sosial Budaya ini sedang

diberi tanggung jawab atas tugas orang lain yang sekarang menjadi tugasnya. Penyesuaian ini menjadi salah satu faktor penghambat inovasi sistem informasi ini.

Penyesuaian akan berjalan cepat apabila Bidang Litbang dan Bidang Sosial Budaya waktu itu memiliki komunikasi yang jelas mengenai dasar dan arah sistem ini. Namun, kenyataannya Bidang Sosial Budaya kurang mengetahui dasar-dasar dan sejarah dari sistem ini. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafu'ari dan Ibu Ratih dari Bidang Sosial Budaya, mereka tidak mengetahui sejarah dan sejauh mana perkembangan sistem ini sampai dipindahkan ke bidangnya. Begitupun juga dengan Bidang Litbang yang terkesan lepas tangan saat sistem ini dipindahkan ke Bidang Sosial Budaya, hal ini terbukti saat wawancara kepada Ibu Emy Wirasati dari Bidang Litbang, yang mengatakan setelah dipindahkannya program ini ke Bidang Sosial Budaya, tidak lagi menjadi tugas mereka sehingga Bidang Litbang juga tidak mengetahui apa langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Bidang Sosial Budaya untuk menjalankan sistem ini. Harusnya Bidang Litbang pun masih membantu dan mengontrol, karena bagaimana pun mereka yang membawa gagasan sistem ini sampai setengah jalan.

4) Kesibukan Pihak Ketiga

Faktor penghambat diluncurkannya program ini tidak berhenti di Bidang Litbang saja, sebab setelah Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* dipindahkan ke Bidang Sosial Budaya pun masih ada hal yang menghambat

diluncurkannya program ini. Saat mulai dipindahkan ke Bidang Sosial Budaya, apabila saat itu dilaksanakan acara *launching*. Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web ini tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yakni Bappelitbangda Kota Pasuruan dan Kelurahan se-Kota Pasuruan. Namun juga ada pihak ketiga selaku pembuat website, yakni CV. Khasanah Konsultama.

CV. Khasanah Konsultama sebagai pembuat dari *website* ini (pihak ketiga) belum bisa hadir. Sebab CV. Khasanah Konsultama memiliki jam terbang yang tinggi, sibuk untuk melatih dan *me-launching e-government* lain di hampir seluruh kota di Indonesia.

Keberadaan CV Khasanah Konsultama pada saat *launching* tentu sangat dibutuhkan, sebab informasi seputar konten dalam *website* akan lebih baik apabila disampaikan oleh si pembuatnya secara langsung. Setelah beberapa kali CV.Khasanah Konsultama tidak bisa memberikan waktu untuk Bappelitbangda Kota Pasuruan, akhirnya pada tanggal 22 Desember 2017 Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* *dilaunching*. Bagaimana pun, antara Bappelitbangda Kota Pasuruan, Kelurahan se-Kota Pasuruan, dan CV. Khasanah Konsultama telah menjadi suatu sistem untuk program Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web ini. Ketiganya harus ada dan saling berpengaruh, sebagaimana teori sistem menurut Ibrahim (2008:29), bahwa sistem adalah totalitas yang kompleks yang terdiri dari seperangkat bagian-bagiannya yang saling berinteraksi sesamanya dan lingkungannya dalam bentuk saling ketergantungan yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Harapannya setelah *di-launching*, ketiganya juga saling berinteraksi untuk menghidupkan sistem ini. Misalnya pada saat pelatihan-

pelatihan yang akan diadakan selanjutnya juga menghadirkan perwakilan CV. Khasanah Konsultama lagi, agar pihak kelurahan dan pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan dapat menanyakan secara langsung tentang kesulitan-kesulitan dalam menginput dan mengolah data kepada pembuat *website*-nya sendiri. CV Khasanah Konsultama pun juga akan mengetahui secara langsung kesulitan dan hambatan yang dirasakan pengguna atas *website* yang mereka buat, sehingga pada nantinya akan dijadikan dasar untuk pemeliharaan *website* itu sendiri.

Setelah *dilaunching*, ternyata juga masih ada hambatan untuk inovasi sistem informasi ini. Berikut adalah faktor penghambat setelah *dilaunching*:

5) *Kelurahan belum diberi security system*

Security system adalah akses *login* yang diberikan kepada kelurahan, berupa *username* dan *password*. Setelah *dilaunching* pada tanggal 22 Desember 2017, ternyata pihak kelurahan belum diberi *security system*. Padahal, *security system* ini tentu dibutuhkan oleh pihak kelurahan agar bisa segera menginput data. Menurut hasil penelitian kepada pihak kelurahan, *security system* dijanjikan akan diberikan pada saat pelatihan yang akan diadakan selanjutnya oleh Bappeitbangda Kota Pasuruan.

Dari hambatan ini, dapat diketahui bahwa informasi ini masih belum bisa diakses oleh masyarakat. Ini artinya sampai saat ini Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* yang ditujukan untuk mendukung layanan informasi kelurahan di Kota Pasuruan belum memenuhi konsep keterbukaan informasi publik. Sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Implikasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap masyarakat adalah terbukanya akses publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk akses, sudah ada akses untuk masyarakat melalui *website* ini. Namun informasi yang disediakan belum ada, sehingga menghambat tersampainya informasi kepada masyarakat.

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dalam inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis *Web* di Kota Pasuruan memiliki faktor pendukung yang membuat Bappelitbangda Kota Pasuruan harus tetap dan terus menjalankan inovasi ini. Hal yang menjadi faktor pendukung adalah:

- 1) Kebutuhan Bappelitbangda Kota Pasuruan terhadap informasi kelurahan sebagai bahan perencanaan pembangunan*

Adanya dasar bahwa perencanaan harus didasarkan pada data yang valid, pada Pasal 31 Bab VII Data dan Informasi dalam UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Hal ini membuat Bappelitbangda Kota Pasuruan akan terus membutuhkan data untuk menjalankan tugas perencanaan pembangunan. Selain itu saat ini Sistem Informasi Data Kelurahan telah dipegang oleh Bidang Sosial Budaya, yang mana tugas utama dari Bidang Sosial Budaya adalah membantu Kepala

Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.

Berdasar pada tugas yang dipegang bidang Sosial Budaya tentang perencanaan pembangunan, tentunya ketersediaan data akan mendukung jalannya tugas mereka. Sebagaimana menurut Supranto (2008:2) yang menjelaskan data akan berguna untuk dasar suatu perencanaan, alat pengendalian terhadap pelaksanaan dan implementasi perencanaan tersebut agar diketahui dengan segera kesalahan yang terjadi, serta dasar evaluasi hasil kerja akhir untuk melihat apakah hasil kerja yang telah ditargetkan bisa dicapai berapa persen dari tujuan mereka.

Untuk itu, inovasi sistem informasi ini terus dipertahankan, walaupun beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami banyak hambatan.

2) *Komitmen Bappelitbangda Kota Pasuruan untuk tetap melanjutkan program ini.*

Program Sistem Informasi Data Kelurahan ini sempat terhenti pada saat di Bidang Litbang, kemudian dihidupkan kembali dengan dipindahkan ke Bidang Sosial Budaya. Program ini sebenarnya tidak ingin dilanjutkan karena mengingat banyak kendala dalam membangun *website* ini. Namun, dikarenakan tingginya kebutuhan informasi kelurahan di Kota Pasuruan membuat Bappelitbangda Kota Pasuruan berkomitmen untuk tetap melanjutkan program ini. Dengan dipindahkannya ke Bidang Sosial Budaya, tentu dengan harapan agar program ini berjalan lebih baik dan lebih

berdayaguna nantinya. Dari sini menunjukkan bahwa pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan juga berkomitmen untuk melaksanakan administrasi public dengan baik, sebab sesuai dengan pernyataan Siagian dalam Ibrahim (2008:15) bahwa administrasi publik diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Suatu program tidak akan bertahan apabila tidak ada komitmen dari penyelenggaranya, dan Bappelitbangda Kota Pasuruan membuktikan bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk terus melanjutkan inovasi ini meskipun 4 tahun lamanya program ini memiliki banyak kendala.

3) *Antusiasme dan kebutuhan pihak kelurahan terhadap Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web*

Kelurahan memiliki andil yang sangat besar pula dalam sistem ini. Sebagai obyek dari sistem ini, apabila tidak ada kemauan atau respon dari kelurahan, tentu akan menggagalkan berjalannya inovasi ini. Namun saat ini, kelurahan menjadi faktor pendukung dari sistem ini. Sebab antusiasme dari pihak kelurahan menyambut inovasi ini sangat luar biasa. Seluruh perwakilan dari kelurahan se-Kota Pasuruan menghadiri acara launching dan pengenalan sistem informasi berbasis *website* ini.

Setelah pengenalan tersebut, respon positif muncul dari pihak kelurahan. Sebagaimana hasil penelitian bahwa pihak kelurahan menyambut baik kehadiran sistem ini, sebab mereka pun butuh sistem ini

untuk pengarsipan data yang lebih efisien; bisa membantu tugas kelurahan juga yang sering dimintai data oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya saat akan pemilu; juga memajukan kelurahan di Kota Pasuruan. Artinya, sistem informasi ini dapat memenuhi karakteristik Sistem Informasi Manajemen (Darmawan, 2013:7), yakni *amount of information* (kualitas informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola oleh SIM mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Intinya kelurahan senang dan merasa terbantu dengan hadirnya sistem ini.

4) Perkembangan zaman yang menuntut semua serba teknologi

E-government saat ini sedang banyak dikembangkan tidak hanya di pemerintah pusat namun juga dari daerah-daerah oleh pemerintah daerahnya. Zaman teknologi yang saat ini kita ketahui, apa-apa serba internet menuntut pemerintah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana konsep e-Government menurut Millar dalam Andrianto (2007:16) bahwa e-government adalah prinsip-prinsip *business* terhadap proses pemerintahan, dengan segala kelebihanannya internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahan implementasi transparansi dan akuntabilitas public di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, Bappelitbangda Kota Pasuruan membuat layanan informasi kelurahan yang berbasis *website*. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Selain itu untuk melancarkan tugas-tugas Bappelitbangda Kota Pasuruan dan

Kelurahan se-Kota Pasuruan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.

Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Website ini hadir untuk memberikan layanan informasi. Hal ini menjawab manfaat yang diperoleh dari e-government menurut Andrian (2007:17), yakni memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis *website* di Kota Pasuruan adalah sistem ini berawal dari gagasan Bappelitbangda Kota Pasuruan yang ingin memenuhi kebutuhan data untuk bahan perencanaan pembangunan. Bersama kebutuhan ini, Bappelitbangda membuat inovasi berupa *website* sistem informasi yang juga mengarah kepada layanan informasi kelurahan untuk masyarakat Kota Pasuruan. Namun hingga saat ini, informasi yang akan disajikan tak kunjung dapat diakses oleh masyarakat dikarenakan kelurahan belum bisa masuk (*login*) ke *website* untuk menginput dan mengolah data. Namun dengan tingginya kebutuhan akan informasi kelurahan dan dukungan dari pihak kelurahan sendiri, Bappelitbangda Kota Pasuruan selalu berusaha untuk mempertahankan dan menjalankan inovasi sistem informasi ini.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasar hasil penelitian, ditemukan fakta yakni belum dibagikannya *security system* (*username* dan *password*) kepada pihak kelurahan, diharapkan

Bappelitbangda Kota Pasuruan segera melaksanakan pelatihan lanjutan tentang Sistem Informasi Data Kelurahan berbasis *website* untuk kelurahan se-Kota Pasuruan, agar mereka bisa segera menginput dan mengolah datanya sebelum mengakhiri semester awal pengumpulan data untuk sistem informasi ini, yakni pada Juli 2018. Agar tidak terulang kembali kegagalan-kegagalan untuk menjalankan sistem ini. Koordinasi kepada pihak kelurahan dengan cara mengadakan pelatihan lanjutan pada semester awal (Januari-Juni 2018), perlu juga untuk mengadakan pelatihan atau pertemuan lanjutan untuk semester-semester selanjutnya (Juli-Desember 2018, Januari-Juni 2019, dan seterusnya) agar pihak kelurahan tetap memiliki tanggung jawabnya untuk menginput dan mengolah data.

- 2) Berdasar hasil penelitian, bahwa di 2014-2015 terjadi lemahnya niat kelurahan untuk mengumpulkan data, maka Bappelitbangda Kota Pasuruan perlu memberikan *reward dan punishment* kepada seluruh kelurahan se-Kota Pasuruan. *Reward* bisa dibuatkan kompetisi dan diberikan dengan cara mengadakan kegiatan penghargaan (*awards*) setiap tahunnya. *Reward* ini diberikan bukan hanya untuk kelurahan yang tepat waktu mengumpulkan data, tapi juga untuk kelurahan-kelurahan yang berprestasi, sebab dalam *website* Sistem Informasi Data Kelurahan juga menyajikan program-program unggulan kelurahan, pengarsipan yang baik, juga perkembangan daerahnya. Dengan ini juga akan memotivasi kelurahan untuk selalu bersaing mengembangkan daerahnya masing-masing. Juga memberikan *punishment* bagi kelurahan yang melanggar atau tidak menginput data.

- 3) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui tingginya kebutuhan terhadap data dan informasi kelurahan sebagai dasar dari perencanaan pembangunan, maka dari itu diharapkan Bappelitbangda Kota Pasuruan selalu menjaga komitmen untuk mempertahankan dan membawa program Sistem Informasi Data Kelurahan untuk lebih baik lagi agar keputusan-keputusan yang dibuat untuk pengembangan Kota Pasuruan juga lebih baik. Untuk menjaga komitmen ini, Bappelitbangda Kota Pasuruan harus memiliki target yang harus dipenuhi, misalnya berhasil mengumpulkan seluruh data kelurahan se-Kota Pasuruan dalam waktu satu semester (6 bulan), target ini harus dicapai dengan usaha terjun langsung ke lapangan dengan melakukan *monitoring*, memantau sejauh mana kelurahan sudah menyiapkan data untuk diinput dan diolah. Target yang kedua adalah melakukan *evaluasi*, dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat rutin, bisa 3 bulan sekali (per setengah semester) bersama perwakilan seluruh kelurahan se-Kota Pasuruan untuk menilai sejauh mana ketercapaian sistem informasi ini pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pedoman yang diberikan kepada kelurahan, yakni hanya *manual book*, jadi penulis menyarankan pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan juga harus siap sedia ketika dibutuhkan pihak kelurahan yang masih merasa kesulitan dalam menginput dan mengolah datanya. Selain itu, Bappelitbangda Kota Pasuruan bersama CV. Khasanah Konsultama juga harus rutin melakukan pemeliharaan (*maintenance*) pada website untuk menghindari *error* atau gangguan-gangguan yang biasanya terjadi pada sebuah *website*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia.
- Anggadini, Dewi Sri. 2011. *Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Universitas Padjajaran Bandung. Jurnal Unikom. Vol 11 No 02.
- Djamal, Mohammad. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Deni. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fariha, Henni. 2015. *Penerapan Electronic Government Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayati, Nur. 2016. *E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus tentang Faktor-faktor Penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim di Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).

- Kementrian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Efektivitas Pembentukan Komisi Informasi di Daerah Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional RI.
- Kountur, Ronni. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV. Teruna Grafica.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Osborne, Stephen P. 2010. *The New Public Governance?*. Hong Kong: Graphicraft Limited.
- O'Brien, James, George M. Marakas. 2014. *Management Information Systems*. Jakarta: Salemba.
- Ruslan, Rosadi. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Said, Mas'ud. 2007. *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building Dan Perilaku Inovatif*. Malang: UIN Press.
- Siagian, S.P. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutanta, Edhy. 2011. *Basis Data dalam Tinjauan Konseptual*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Supranto. 2008. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.
- Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Permendagri No.13 Tahun 2012 tentang *Monografi Desa dan Kelurahan*.

Perwali Pasuruan No.36 Tahun 2015 tentang *Perubahan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.*

Perwali Pasuruan No.74 Tahun 2016 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.*



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

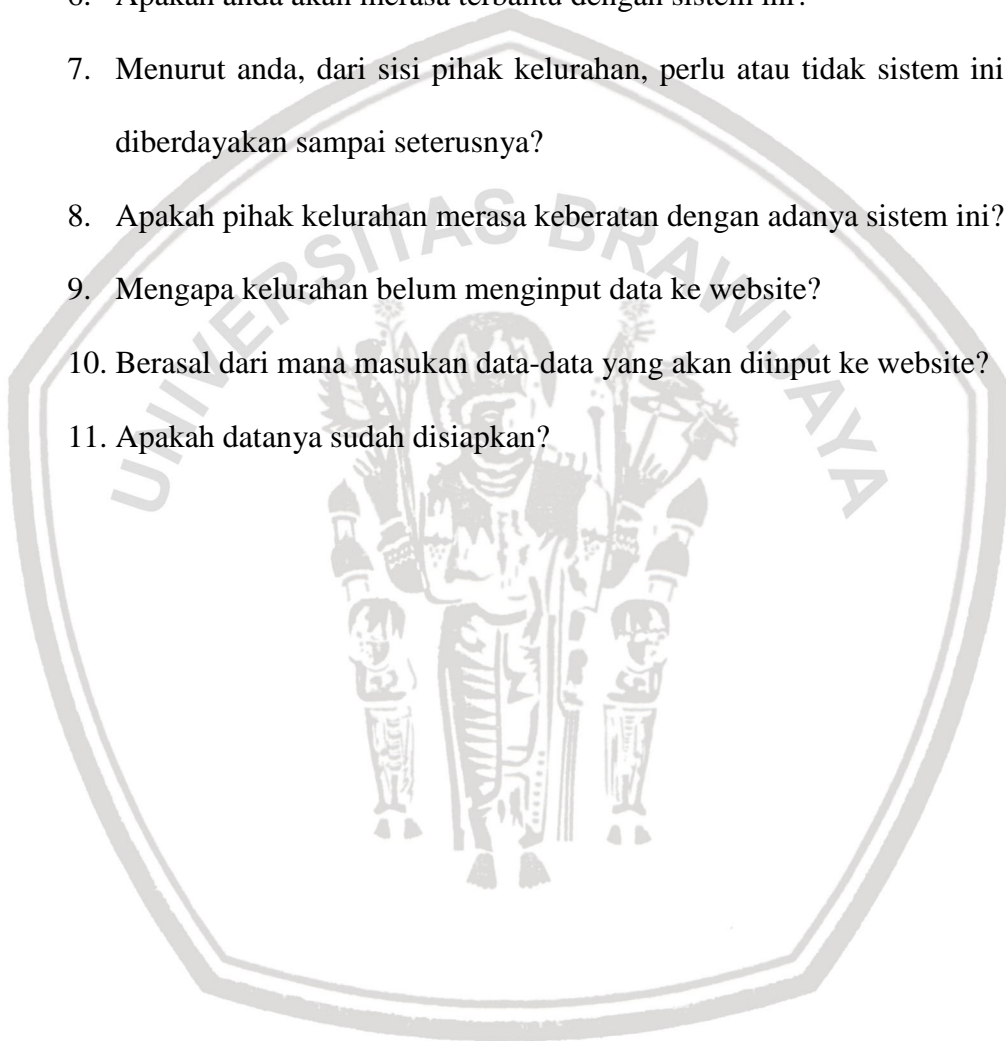
Bagi Pihak Bappelitbangda Kota Pasuruan:

1. Apa alasan dibuatnya sistem informasi data kelurahan?
2. Kapan mulai berfikir untuk membuat sistem ini?
3. Kesulitan-kesulitan sebelum diciptakannya sistem ini?
4. Dasar Hukum dari sistem ini?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan sistem ini?
6. Selama proses menuju launching, apa saja yang sudah dikerjakan untuk sistem ini?
7. Mengapa kewenangan sistem ini dipindahkan dari Bidang Litbang ke Bidang Sosbud?
8. Mengapa baru dialunching akhir tahun 2017?
9. Perubahan apa yang ingin didapatkan dari adanya sistem ini?
10. Mengapa pilih berbentuk website?
11. Bagaimana cara kelurahan menginput data?
12. Berapa lama waktu yang diberikan untuk kelurahan menginput data?
13. Kapan semua data bisa terkumpul menjadi informasi?

Bagi Pihak Kelurahan:

1. Apakah anda tahu Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Website?
2. Sejak kapan anda tahu sistem ini?

3. Apakah menghadiri acara launching pada tanggal 22 Desember 2017?
4. Apa saja kegiatan launching kemarin? Apakah diajarkan bagaimana cara menginput data ke website?
5. Apakah anda senang menyambut sistem ini?
6. Apakah anda akan merasa terbantu dengan sistem ini?
7. Menurut anda, dari sisi pihak kelurahan, perlu atau tidak sistem ini terus diberdayakan sampai seterusnya?
8. Apakah pihak kelurahan merasa keberatan dengan adanya sistem ini?
9. Mengapa kelurahan belum menginput data ke website?
10. Berasal dari mana masukan data-data yang akan diinput ke website?
11. Apakah datanya sudah disiapkan?



Lampiran 2

Surat Ijin Pra Penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 16632 /UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Pra Penelitian/Survey

Kepada : Yth. Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan
Jl. Sultan Agung No. 32
Kota Pasuruan

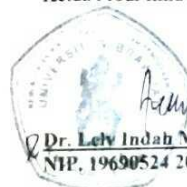
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra penelitian/survey bagi mahasiswa :

Nama : Heny Mayorita
Alamat : Jl. Slamet Riyadi 26 RT 1 RW 4 Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan 67139
NIM : 145030107111052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Inovasi SIMDASKEL Berbasis Web Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi Pada Bappelitbangda Kota Pasuruan)
Lokasi : Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan
Lamanya : 2 (dua) minggu
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 November 2017

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik



Dr. Lety Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Lampiran 3

Surat Ijin Penelitian ke Bappelitbangda Kota Pasuruan dari Fakultas


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 18577 /UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Walikota Pasuruan
Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Heny Mayorita
Alamat : Jl. Slamet Riyadi 26 RT 1 RW 4 Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan 67139
NIM : 145030100111003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Inovasi SIMDASKEL Berbasis *Web* Sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi Pada Bappelitbangda Kota Pasuruan)
Lokasi : Kantor Bappelitbangda Kota Pasuruan
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Desember 2017

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Lampiran 4

Surat Ijin Penelitian ke Kelurahan dari Fakultas


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~537~~ /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Walikota Pasuruan
Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Heny Mayorita
Alamat : Jl. Slamet Riyadi 26 RT 1 RW 4 Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan 67139
NIM : 145030100111003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Inovasi SIMDASKEL Berbasis *Web* Sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan Di Kota Pasuruan (Studi Pada Bappelitbangda Kota Pasuruan)
Lokasi : 1. Kantor Kelurahan Gentong
2. Kantor Kelurahan Bukir
3. Kantor Kelurahan Sehani
Lamanya : 2 (dua) minggu
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 Januari 2018

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik



Lampiran 5

Surat Ijin Pra Riset dari Bakesbangpol Kota Pasuruan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
NOMOR : 072/2017 / 423.600.02/2017

Membaca : Surat dari KAPRODI FIA Universitas Brawijaya Malang
 Nomor : 16632/UN10.F/#.11.11/PN/2017
 Tanggal : 06 November 2017
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL kepada :

Nama : **Heny Mayorita**
 NIM / NIK : 145030107111052
 Alamat : Jln Mayjen Haryono 163 Malang
 Tema Survei/Riset/PKL : **“INGVASI SIMDASKEL BERBASIS WEB DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI KELURAHAN DI KOTA PASURUAN (STUDI PADA BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN)**
 Sasaran Survei/Riset/PKL : **BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN**
 Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari tanggal 09 November 2017 s/d 23 November 2017
 Peserta pengikut : -
 Nama Penanggungjawab : **Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL.
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah selambat – lambatnya 6 (Enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 09 November 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA PASURUAN**


Drs. H. MAS DJOKO BAROTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591007 198502 1001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan
2. Kepala BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN
3. KAPRODI FIA Universitas Brawijaya Malang

Lampiran 6

Surat Ijin Penelitian Untuk Bappelitbangda Kota Pasuruan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28e Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
 NOMOR : 072/ 2020/423.600.02/2017

Membaca : Surat dari KAPRODI FIA Universitas BRAWIJAYA Malang
 Nomor : 17922/UN10.F03.11.11/pn/2017
 Tanggal : 13 Desember 2017
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian / Magang / PKL / Observasi
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL kepada :

Nama : **HENY MAYORITA**
 NIM / NIK : 145030600111003
 Alamat : Jln Mayjen Haryono 163 Malang
 Tema Survei/Riset/PKL : **INOVASI SIMDASKEL BERBASIS WEB SEBAGAI PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI KELURAHAN DI KOTA PASURUAN (STUDI PADA BAPELITBANGDA KOTA PASURUAN)**
 Sasaran Survei/Riset/PKL : **BAPELITBANGDA KOTA PASURUAN**
 Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari tanggal 02 JANUARI 2018 s/d 02 MARET 2018
 Peserta pengikut : -
 Nama Penanggungjawab : **Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah selambat – lambatnnya 6 (Enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 27 Desember 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
 Sekretaris

IQBAL RAHIM JAILANI, MM
 Pembina Tk.I
 NTP. 19600620 197903 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan
3. KAPRODI FIA Universitas BRAWIJAYA Malang

Lampiran 7

Surat Ijin Penelitian untuk Kelurahan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL

NOMOR :072/423.600.02/2018

Membaca : Surat dari KAPRODI FIA Universitas Brawijaya Malang
 Nomor : 537/UN10.F03.11.11/PN/2018
 Tanggal : 23 Januari 2018
 Perihal : Ijin Penelitian / Magang / Riset / PKL / Observasi
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL kepada :

Nama : HENNY MAYORITA
 NIM / NIK : 145030107111023
 Alamat : Jln. MT. Haryono 163 Malang
 Tema Survei/Riset/PKL : "INOVASI SIMDASKEL BERBASIS WEB SEBAGAI PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI KELURAHAN DI KOTA PASURUAN (STUDI PADA BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN

Sasaran Survei/Riset/PKL : KEL. GENTONG, KEL. BUKIR, KEL. SEBANI KOTA PASURUAN
 Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari tanggal 29 JANUARI 2018 s/d 12 FEBRUARI 2018
 Peserta pengikut : -
 Nama Penanggungjawab : Lely Indah Mindarti, Dr.,M.Si

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah selambat – lambatnya 6 (Enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 29 JANUARI 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. MAS DJOKO BAROTO, M.Si
 Pembina Urusan Muda
 NIP. 195910071985021001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan (Sebagai Laporan)
2. LURAH GENTONG KOTA PASURUAN
3. LURAH BUKIR KOTA PASURUAN
4. LURAH SEBANI KOTA PASURUAN
5. KAPRODI FIA Universitas Brawijaya Malang

Lampiran 8

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Sultan Agung No. 32 Telp (0343) 424064
 PASURUAN 67117

Pasuruan, 2 Maret 2018

Nomor	: 050 / 1561 / 423 203 / 2018	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth. Bpk. Dekan Fakultas Ilmu	
Lampiran	: -	Administrasi Universitas Brawijaya	
Perihal	: <u>Penelitian/Survey/Research</u>	di-	
			<u>MALANG</u>

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Nomor 072/2020/423 600.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian/Magang/PKL/Observasi maka :

Nama : HENY MAYORITA
 NIM : 145030100111003
 Alamat : Jl. Mayjen Haryono 163 Malang
 Organisasi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Tujuan/Tema : Inovasi SIMDASKEL berbasis Web pendukung Layanan Informasi Kelurahan di Kota Pasuruan (studi pada Bappelitbanga Kota Pasuruan)
 Lama Penelitian : 02 Januari 2018 s/d 02 Maret 2018

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Survey/Research di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan dengan baik sesuai dengan bidang studinya.

Demikian surat keterangan Penelitian/Survey/Research kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA PASURUAN



Des. Adri Djoko Sriyono, M. Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19610513 198603 1 015

Lampiran 9

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa dan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Monografi Desa dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja kecamatan;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Pemerintah Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Monografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan;
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Kepala Desa dan Lurah bertanggungjawab terhadap monografi desa dan kelurahan.

BAB II DATA

Pasal 3

Monografi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. data umum;
- b. data personil;
- c. data kewenangan;
- d. data keuangan; dan
- e. data kelembagaan.

Pasal 4

- (1) Data Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi antara lain data sosial, ekonomi, ketenteraman dan ketertiban, dan bencana serta kewilayahan.
- (2) Data Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berisi antara lain data personil penyelenggara pemerintahan desa

dan Pemerintah kelurahan.

- (3) Data kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berisi antara lain data kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan
- (4) Data keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi antara lain data pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan desa.
- (5) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berisi antara lain data kelembagaan desa dan kelurahan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala desa dan Lurah melakukan pengisian dan pengumpulan data monografi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai pada setiap awal dan pertengahan tahun anggaran.
- (2) Pengumpulan data monografi pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir monografi.

Pasal 6

Hasil pengumpulan data monografi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk:

- a. buku monografi desa dan buku monografi kelurahan; dan
- b. papan monografi desa dan papan monografi kelurahan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Lurah melaporkan monografi desa dan kelurahan

dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

- (2) Bupati/Walikota melaporkan data monografi desa dan kelurahan yang ada diwilayahnya dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan data monografi desa dan kelurahan yang ada di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada Menteri.

Pasal 8

Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghimpun dan menganalisa laporan monografi desa dan kelurahan dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota atas pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisai; dan
 - c. bimbingan pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan;
- (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman;
- b. supervisi;
- c. monitoring; dan;
- d. koordinasi pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada Desa dan Lurah atas pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan;
 - b. monitoring dan supervise teknis pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan beserta pelaksanaannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pembinaan Bupati /Walikota dalam pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan pembinaan Gubernur dalam pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan

dibebankan pada APBD provinsi.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan pembinaan Menteri dalam pengisian dan pengumpulan monografi desa dan kelurahan dibebankan pada APBN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Format pengisian, buku dan papan monografi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

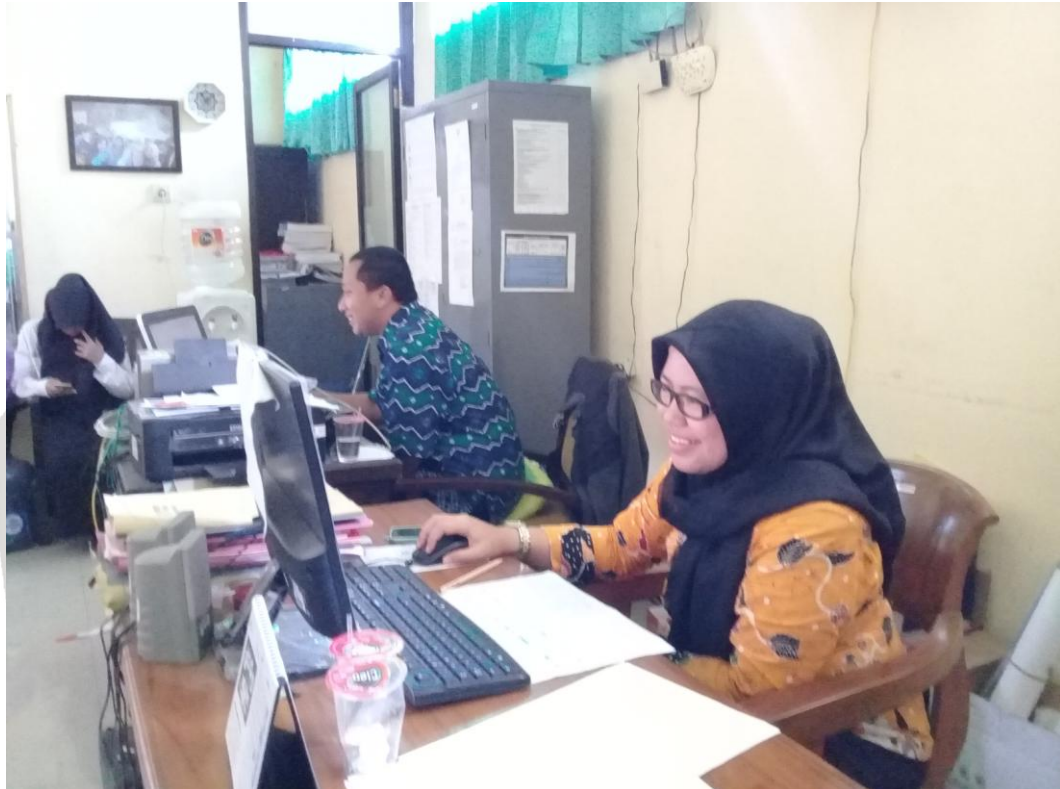
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari
2012

MENTERI DALAM
NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Lampiran 10**Foto Operator Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web dari
Bappelitbangda Kota Pasuruan**

Ibu Ratih dan Bapak Arvino selaku operator dari Sistem Informasi Data
Kelurahan Berbasis Web